**BAB I**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 mengemban amanat Penyelenggaraan 2 Urusan yaitu Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Alokasi Dana berdasarkan DPPA untuk kedua urusan tersebut sebesar Rp. 37.765.628.989,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.427.440.456,- (48,79 %) dan sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan urusan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setiap akhir tahunnya melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan baik realisasi fisik maupun keuangan.

1. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Wajib adalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebanyak 4 Program dengan 15 Kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini Rp. 21.024.257.964,- .

1. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib BidangLingkungan Hidup Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari kegiatan:
2. Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan.
3. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
4. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
5. Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
6. Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH.
7. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.
8. Identifikasi dan Inventarisasi Serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah.
9. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah. .
10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
11. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan.
12. Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP.
13. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam :
14. Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
15. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16. Pembinaan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
17. Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH.
18. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
19. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
20. **Realisasi Program dan Kegiatan**
21. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari:**

**1) Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 216.900.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya Identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan (13 Kabupaten) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 168.073.150,- (77,49 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

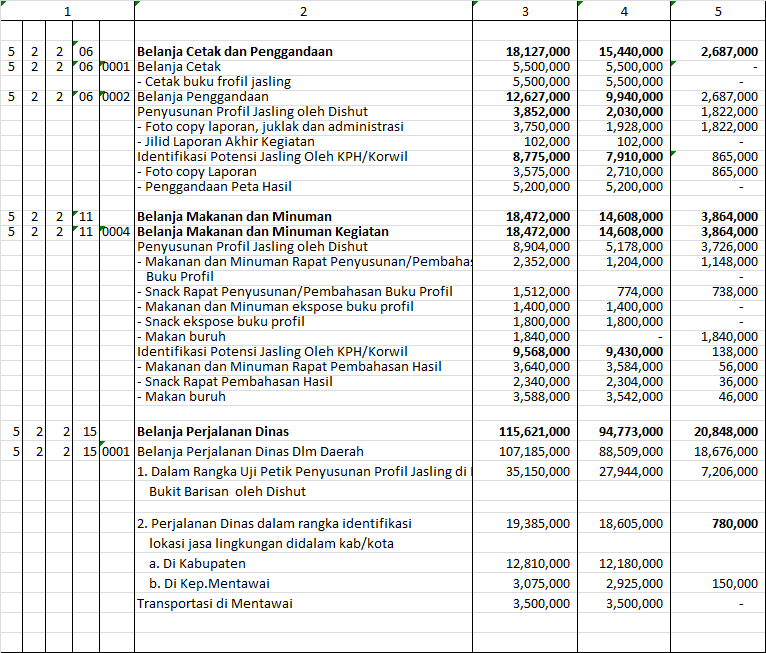
Alokasi anggaran untuk kegiatan **Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan** ini sebesar Rp. 216.900.000,- (*dua* *ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang dalam pelaksanaanya sebagian besar dilakukan oleh KPHL/KPHP yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

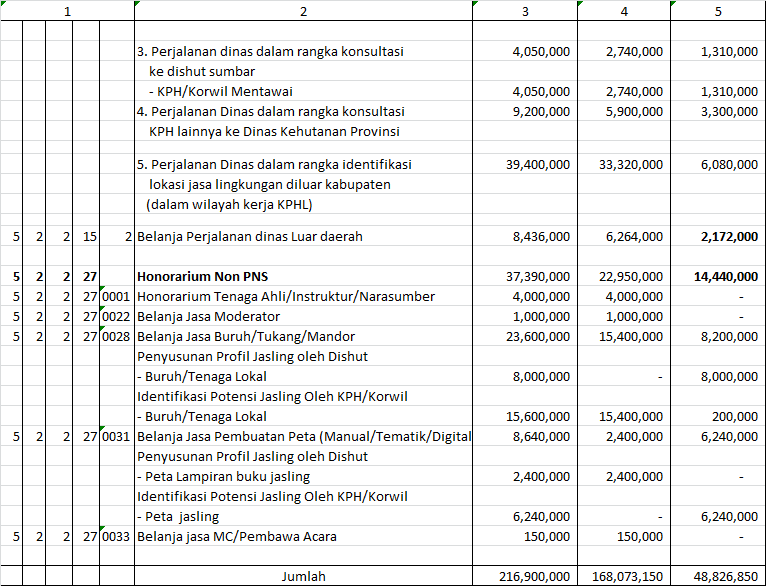
Adapun realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 168.073.150,- atau 77,49 % dengan realisasi fisik 100 %. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp. 48.826.850,- atau 22,51 % yang telah dikembalikan ke KAS Negara.

Terdapatnya sisa anggaran tersebut disebabkan adanya sub belanja anggaran berupa belanja biaya penginapan personil dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas karena tidak memungkinkan dilakukan namun secara keseluruhan kegiatan telah terealisasi sebagaimana diharapkan. Rincian dan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 1 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan







Tidak tercapainya/terserapnya anggaran sebagaimana yang direncanakan disebabkan oleh :

1. Adanya sisa anggaran dalam beberapa item belanja, yang merupakan sisa mati.
2. Sisa anggaran dari biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya penginapan di masing-masing kabupaten/kota.
3. **Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| - | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Pagu DPPA). |
| - | Output | : | Terlaksananya pengumpulan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan (PEP) RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan |
| - | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani (100%) |
| - | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100%  Realisasi Keuangan : Rp. 175.096.850,- ( 87,55%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Kecilnya realisasi penyerapan anggaran secara optimal dikarenakan sistem APBD yang menerapkan kebijakan, yang secara substansial hasil akhirnya adalah pencapaian output maksimal dengan realisasi pembiayaan minimal.

Secara umum, untuk mengatasi hal di atas, adalah dilakukannya penyesuaian-penyesuaian target, serta pengetatan belanja dengan menghemat belanja penunjang, menghemat belanja perjalanan dinas.

Terdapat sedikit penghematan/efisiensi dari belanja sub kegiatan sebagai berikut:

* penggandaan
* rapat kegiatan
* perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan sisa tiket pesawat.

**3) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 99.163.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 90.228.050,- (90,99) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Secara umum kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan ini terdiri dari :

\*) Identifikasi Pemantauan Bio Fisik kerusakan hutan dan lahan, dengan sasaran kegiatan 4 kali ke Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman/Kota Padang. Laporan pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan peta hasil identifikasi.

\*) Sosialisasi bahaya kerusakan hutan sebanyak 6 kali ke Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data kerusakan hutan dan lahan, sampai sejauh mana kerusakan dan akibat yang akan di timbulkan serta penyebab dari kerusakan hutan tersebut. Kemudian data tersebut di lakukan sosialisasi dan diinformasikan kepada stake holder terkait, sebagai bahan tindak lanjut langkah antisipasi pengurangan resiko bencana akibat kerusakan hutan selanjutnya.

Data lokasi hasil pelaksanaan identifikasi pemantauan kerusakan hutan dan lahan berserta analisanya sebagaimana terlampir dalam laporan ini .

Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yakni telah teridentifikasinya beberapa lokasi rawan bencana dalam kawasan hutan pada 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman/Kota Padang. Dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan sebanyak 6 kali di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan yakni tersedianya data kawasan hutan rawan bencana yang lebih mutakhir, kemudian dapat di lakukan sosialisasi kepada badan instansi terkait dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang rawan bencana untuk menjaga kelestarian hutan sehingga dapat menekan tindak pidana pelanggaran kehutanan dan meminimalisir resiko yang diakibatkan apabila terjadinya bencana.

Dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan di peroleh outcome berupa diketahuinya oleh instansi/badan terkait dan pahamnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan terhadap kondisi kawasan hutan yang rawan bencana tersebut, sehingga langkah-langkah untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan serta upaya antisipasi untuk meminimalkan dampak kerugian apabila terjadi bencana dapat dilakukan sebelumnya.

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 99.163.000,- dengan realisasi anggaran (keuangan) sebesar Rp. 90.228.050 (90,99 %), dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 8.934.950,- yang merupakan sisa mati serta efesiensi dan efektiftas pelaksanaan anggaran yang berasal dari penghematan belanja ATK sebesar Rp. 57.000, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 709.950, belanja penggandaan sebesar Rp. 650.000, Belanja Makan Minum Kegiatan sebesar Rp. 2.603.000,- , Belanja Jasa buruh tenaga kerja lokal sebesar Rp. 800.000,-, dan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 4.115.000.-

**4) Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 8.148.041.064,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi refresif/pamhut, monev kasus dan tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan koordinasi (14 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100.00 %  Realisasi Keuangan : Rp. 1.599.037.748 ,- (19,62 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pada tahun 2017, Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

Mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Pengamanan Hutan Fungsional.

Kegiatan Refresif atau Penegakan Hukum

Bimbingan Masyarakat dgn Patroli Simpatik dan Penyuluhan.

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan melaksanakan anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.148.041.064,- (Delapan milyar seratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu enam puluh empat rupiah). Terdapat beberapa sub kegiatan dalam kegiatan tersebut antara lain Latihan Menembak, Psikotes, Intelijen/Pulbaket, Operasi Gabungan Pengamann Hutan, Patroli Simpatik, Monev Pengamanan Hutan, Penyelesaian Kasus Tipihut, Patroli Pengamanan Hutan bersama dengan Provinsi Tetangga, koordinasi Ke Kementrian LHK.

Sampai tanggal 31 Desember 2017, realisasi anggaran pada Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan sebesar Rp.1.599.037.748,-atau sebesar ***19,62%*** dari pagu dana sebesar Rp. *8.148.041.064*.- dengan capaian Fisik sebesar ***100 %.*** Sisa dana sebesar Rp. *6.549.003.316,-*- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari belanja bahan bakar dan belanja penginapan serta sub kegaitan penyegaran Paolhut dan sub kegiatan penanganann barang bukti.

Target Kinerja Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diatas adalah Terlaksananya Psikotes, Operasi Intelijen, Opersai Pulbaket/Prefesif, Monev Kasus Tipihut, Tindak Lanjut TIPIHUT, Koordinasi dan pembinaan,

1. ***Ouput dan Outcome yang terukur***

Pengamanan dan Perlindungan Hutan terealisasi sebanyak 17 Kabupaten/ Kota sebagaimana yang telah direncanakan, diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto.

1. **Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 474.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data jenis satwa dan tumbuhan liar di kawasan hutan wilayah kelola KPH |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 410.288.250,- (86,56%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Secara umum kegiatan pokok dalam Perlindungan dan Konservasi Alam

pada Wilayah Kelola KPH adalah terdiri dari :

1. Administrasi

Kegiatan ini merupakan persiapan dan penyiapan kelengkapan administrasi berupa ATK, penyusunan juklak dan persiapan administrasi lainnya.

1. Koordinasi ke Wali Nagari dalam rangka Persiapan Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar.

Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan mengantisipasi belum terbentuknya kelembagaan dan belum adanya penugasan personil ditingkat resort pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sehingga untuk pelaksanaan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati dan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, perlu dilakukan koordinasi ke Nagari sasaran sebagai persiapan pelaksanannya.

1. Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPH;

Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 wilayah kelola KPHL di Sumatera Barat dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat disekitar hutan tentang prinsip-prinsi Konservasi Keanekaragaman hayati dan upaya perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan terutama yang dilindungi.

1. Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPH;

Merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan pada 10 wilayah kelola KPHL di Sumatera Barat, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh ketersediaan data satwa dan tumbuhan liar di kawasan hutan di wilayah kelola KPH di Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah KPHL Bukit Barisan sebagai bahan pengembangan potensi KPH baik dalam pemanfaatan maupun upaya perlindungan terhadap potensi yang ada.

1. Sinkronisasi / konsultasi ke Pusat

Kegiatan Sinkronisasi dan konsultasi ini sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan dukungan dari pusat dalam upaya pengembangan kegiatan di tingkat tapak, khususnya dalam masalah penganggaran.

Sebagai dasar dalam pengukuran penilaian kinerja Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum seluruh kegiatan tersebut di atas dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :

1. **KPHL BUKIT BARISAN**
2. Perjalanan Koordinasi ke Wali Nagari dalam rangka Persiapan Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, hanya dilaksanakan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan mengantisipasi belum terbentuknya kelembagaan dan belum adanya penugasan personil ditingkat resort pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sehingga untuk pelaksanaan Sosialisasi ini, perlu dilakukan koordinasi ke Nagari sasaran sebagai persiapan pelaksanannya, terlaksana sebanyak 8 kali yaitu:

* Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok
* Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kabupaten Tanah Datar
* Nagari Sitanang, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Duku, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman
* Nagari Sepakai Silantai, Kabupaten Sijunjung.
* Desa Silungkang Duo, Kota Sawahlunto.
* Kelurahan Jaho, Kota Padang Panjang

Secara umum pelaksanaan koordinasi ke Nagari berjalan lancar dan adanya hubungan timbal balik terkait dengan informasi yang diperlukan dari masing-masing pihak, seperti pihak Nagari mendapatkan informasi terkait dengan kelembagaan dan kebijakan pembangunan kehutanan pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada pihak lain Dinas Kehutanan mendapatkan informasi dari pihak Nagari terkait dengan potensi dan gangguan keamanan hutan yang ada di nagari yang bersangkutan, disamping informasi lainnya yang berkaitan dengan potensi nagari setempat.

Rekafitulasi kegiatan koordinasi Koordinasi ke Wali Nagari dalam rangka Persiapan Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar disajikan pada daftar terlampir.

1. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan terlaksana sebanyak 11 kali yaitu

* Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok
* Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kabupaten Tanah Datar
* Nagari Sitanang, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Duku, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman
* Nagari Sepakat Silantai, Kabupaten Sijunjung.
* Desa Silungkang Duo, Kota Sawahlunto.
* Kelurahan Jaho, Kota Padang Panjang
* Nagari Guguak, Kabupaten Padang Pariaman
* Kelurahan Limau Manis Selatan, Kota Padang
* Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang

Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Keanekaragaman hayati di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan diharapkan akan menambah wawasan masyarakat yang berada di sekitar hutan akan pentingnya kenekaragaman hayati dalam kehidupan, dan akan timbul kesadaran masyakat untuk turut serta menjaga keanekaragaman hayati yang berada dilingkungannya, tentunya dengan tetap menjaga hutan tetap lestari.

Pada saat sosialisasi umumnya terjadi diskusi dan timbul beberapa pertanyaan yang secara umum adalah terkait dengan batas kawasan hutan, gangguan kera, babi terhadap kegiatan lading masyarakat.

Terkait dengan pertanyan tersebut umumnya tim dapat menjelaskan bahwa pada prinsifnya batas kawasan hutan itu ada yang sudah ditata batas dan ada Pal batasnya namun ada pula yang memang belum dilakukan tata batas, tetapi secara faktual bahwa batas kawasan hutan dapat ditentukan dengan melakukan pengecekan lapangan melalui GPS, sehingga bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait dengan batas kawasan hutan dapat menghubungi KPH setempat.

Terkait dengan gangguan satwa liar yang merusak tanaman pada prinsifnya masyarakat dapat melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengendalian baik itu pengusiran maupun perburuan, melalui kearifan lokal setempat sepanjang dilakukan pada jenis binatang yang tidak dilindungi dan tidak dilakukan pada daerah perlindungan satwa tertentu.

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Bukit Barisan terlaksana sebanyak 11 kali yaitu

* Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok
* Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kabupaten Tanah Datar
* Nagari Sitanang, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Duku, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman
* Nagari Sepakat Silantai, Kabupaten Sijunjung.
* Desa Silungkang Duo, Kota Sawahlunto.
* Kelurahan Jaho, Kota Padang Panjang
* Nagari Guguak, Kabupaten Padang Pariaman
* Nagari Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar
* Kelurahan Limau Manis Selatan, Kota Padang

1. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Sinkronisasi dan Konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, untuk meminta dukungan fasilitasi anggaran pelaksanaan kegiatan terkait dengan Perlindungan dan Konservasi Alam.

Perjalanan dalam rangka sinkronisasi dan konsultasi ini dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu :

* Pada tanggal 14 s/d 15 September 2017 dengan personil pelaksana adalah Kepala KPHL Bukit Barisan dan Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan isyu utama selain untuk koordinasi kegiatan PKA juga untuk memenuhi Surat Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakum Kementerian LHK Nomor S.39/PHP-1/PPNS/2017 tanggal 12 September 2017 tersebut di atas bahwa dalam rangka kepentingan proses penyelidikan dan atau pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup di Kawasan Teluk Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, perlu kehadiran Kepala KPHL Bukit Barisan untuk memberikan keterangan /klarifikasi/penjelasan secara langsung terkait adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup tersebut yang berada diwilayah kerja KPHL Bukit Barisan.
* Pada tanggal 29 s/d 30 November 2017 dengan personil pelaksana adalah Kepala KPHL Bukit Barisan dengan isyu utama selain untuk koordinasi kegiatan PKA juga untuk memenuhi surat Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor UN.129/KPHL/BK/Keu.o/11/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan Rapat Pembekalan Kepala KPH dengan tema “Penajaman Tupoksi KPH Pasca Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014” dalam rangka penyamaan persepsi dalam pembangunan KPH.

1. **KPHL AGAM RAYA**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Agam Raya terlaksana sebanyak 4 kali yaitu :

* Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Agam
* Nagari Sitalang, Kabupaten Agam
* Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Agam Raya terlaksana sebanyak 4 kali yaitu :

* Nagari Koto Kaciak, Kabupaten Agam
* Nagari Sitalang, Kabupaten Agam
* Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. **KPHL PASAMAN RAYA**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman
* Nagari Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat
* Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman
* Nagari Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat
* Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat

1. **KPHL HULU BATANG HARI**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Hulu Batang Hari terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Lubuak Gadang, Kabupaten Solok Selatan
* Nagari Surian, Kabupaten Solok
* Nagari Timpeh, Kabupaten Dharmasraya

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Hulu Batang Hari terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Lubuak Gadang, Kabupaten Solok Selatan
* Nagari Surian, Kabupaten Solok
* Nagari Timpeh, Kabupaten Dharmasraya

1. **KPHL LIMA PULUH KOTA**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Lima Puluh Kota terlaksana sebanyak 4 kali yaitu :

* Nagari Pauh Sangik, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Taram , Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Lima Puluh Kota terlaksana sebanyak 4 kali yaitu :

* Nagari Pauh Sangik, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Taram , Kabupaten Lima Puluh Kota
* Nagari Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota

1. **KPHL SIJUNJUNG**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Sijunjung terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Sisawah, Kabupaten Sijunjung
* Nagari Tanjung Labuh, Kabupaten Sijunjung
* Nagari Silokek, Kabupaten Sijunjung

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Sijunjung terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Sisawah, Kabupaten Sijunjung
* Nagari Tanjung Labuh, Kabupaten Sijunjung
* Nagari Silokek, Kabupaten Sijunjung

1. **KPHL SOLOK**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHL Solok terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Sirukam, Kabupaten Solok
* Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok
* Nagari Aia Batumbuk, Kabupaten Solok

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHL Solok terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Sirukam, Kabupaten Solok
* Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok
* Nagari Aia Batumbuk, Kabupaten Solok

1. **KPHP DHARMASRAYA**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHP Dharmasraya terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Bonjol, Kabupaten Dharmasraya
* Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya
* Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHP Dharmasraya terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Bonjol, Kabupaten Dharmasraya
* Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya
* Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya

1. **KPHP PESISIR SELATAN**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan
* Nagari Sungai Liku, Kabupaten Pesisir Selatan.

1. **KPHP KEPULAUAN MENTAWAI**
2. Perjalanan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati, di wilayah kelola KPHP Kepulauan Mentawai terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Desa Saumanganya, Kabupaten Kepulauan Mentawai
* Desa Sioban, Kabupaten Kepulauan Mentawai
* Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. Perjalanan Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan Liar, di wilayah kelola KPHP KPHP Kepulauan Mentawai terlaksana sebanyak 3 kali yaitu :

* Desa Saumanganya, Kabupaten Kepulauan Mentawai
* Desa Sioban, Kabupaten Kepulauan Mentawai
* Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sebagaimana tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data satwa dan tumbuhan liar di wilayah kelola KPH di Sumatera Barat, maka dalam pelaksanaan operasinal di lapangan, sebagai pelaksana dari kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keanekkaragaman hayati dan inventarisasi satwa dan tumbuhan liar dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing KPH.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2017, jumlah anggaran awal kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam di wilayah kelola KPH adalah sebesar Rp. 500.000.000,-, namun dalam rangka optimalisasi serapan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran kegiatan ini dirasionalisasi menjadi Rp. 474.000.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 410.285.100,- (86,56 %) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 63.714.900,-.

Sisa anggaran sebesar Rp. 63.714.900,- merupakan sisa mati serta sisa efesiensi dan efektiftas pelaksanaan anggaran yang berasal dari penghematan:

- Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 7.048.600,

- Belanja Peralatan Perlengkapan pakai habis Rp. 4.710.000,-

- Belanja Bahan/ Material Rp. 749.500,-

- Belanja Cetak/ Penggandaan Rp. 5.970.000,-

- Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 11.954.000,-

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 26.810.000,-

- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 6.472.800,-

1. **Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 994.700.00,- (Pagu DPPA). |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan PPHBN (2 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100%  Realisasi Keuangan : Rp. 963.044.700,- ( 96,82 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA merupakan kegiatan penguatan dan menfasilitasi kelembagaan masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta dalam perlindungan hutan. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan sarana prasarana atau insentif, pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada Anggota PHBN dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Bantuan insentif yang diberikan untuk penguatan kelembagaan PHBN sebanyak 483 orang, diserahkan kepada Anggota PHBN di kabupaten/kota yakni :

\*) Kabupaten Pasaman sebanyak : 63 orang

\*) Kabupaten Solok sebanyak : 42 orang

\*) Kabupaten Agam sebanyak : 47 orang

\*) Kabupaten Pasaman Barat : 33 orang

\*) Kabupaten Pesisir Selatan : 39 orang

\*) Kabupaten Lima Puluh Kota : 30 orang

\*) Kabupaten Padang Pariaman : 34 orang

\*) Kabupaten Sijunjung : 51 orang

\*) Kabupaten Tanah Datar : 20 orang

\*) Kota Sawahlunto : 15 orang

\*) Kabupaten Solok Selatan : 48 orang

\*) Kabupaten Dharmasraya : 48 orang

\*) Kota Solok : 06 orang

\*) Kota Padang : 07 orang

Mekanisme penyerahan insnetif diatas, diantar kepada masing-masing kab/kota yang didukung dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah. Pada saat penyerahan bantuan insentif, sekaligus diberikan juga sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para anggota PHBN.

Sumber dana anggaran untuk insentif PHBN ini berasal dari APBD melalui DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 423 orang, dan sebanyak 60 orang berasal dari APBN melalui DIPA BP2HP Wila III Pekanbaru untuk satgas PHBN yang berada di sekitar KPHP Dharmasaraya dan KPHP Pesisir Selatan.

Catatan pada tahun 2011 jumlah kelembagaan PPHBN yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota di banding tahun 2012 naik secara signifikan yaitu dari 64 Nagari dengan jumlah anggota 243 menjadi 91 Nagari dengan Jumlah 325 orang, untuk tahun 2013 juga terdapat peningkatan menjadi 104 nagari dengan jumlah 418 orang, pada tahun 2014 telah terbentuk 127 Nagari dengan jumlah satgas PPHBN sebanyak 482 Orang, untuk tahun 2015 telah terbentuk sebanyak 139 Nagari dengan jumlah satgas PPHBN sebanyak 565 orang, sedangkan untuk tahun 2016 telah terbentuk satgas PPHBN pada 151 Nagari dengan jumlah anggota sebanyak 588 orang. Pada tahun 2017 terbentu 146 Nagari dan 483 satgas PHBN.

Disamping penyerahan bantuan insentif dan sosialisasi, kepada anggota PHBN juga di berikan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terbaru bagi Petugas Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) sehingga dapat lebih berperan aktif ikut serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan bidang kehutanan dan menjaga fungsi dan keberadaan hutan secara lestari.

Pelatihan Petugas Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) tahun 2017 dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 28 Agustus 2017 s/d Tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Gedung Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP) Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) Jl Air Tawar Padang.

Peserta Pelatihan Petugas Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) tahun 2017 ini adalah perwakilan Petugas Perlindungan Berbasis Nagari (PHBN) yang berasal dari seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan jumlah peserta seluruhnya 80 orang, jumlah peserta di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pelatihan dilaksanakan melalui metode Ceramah, Diskusi dengan narasumber berasal dari lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 (enam) orang, dengan Pokok materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembangunan Kehutanan Sumatera Barat

2. Kebijakan Perlindungan Hutan Sumatera Barat

3. Rehabilitasi hutan dan Lahan

4. Pemanfaatan Hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

5. Pola kemitraan Pengelolaan hutan bersama masyarakat

6. Program Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM)

7. Konsep Dasar PPHBN dan Perda N0 11 Tahun 2015.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta dalam perlidungan hutan melalui pemberian bantuan insentif dan sosialisasi,pembinaan serta pelatihan kepada anggota PHBN di 12 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah termotifasinya masyarakat (baik lembaga/kelompok maupun individu) untuk lebih berperan serta dalam perlindungan hutan sehingga terjaga kelestarian hutan yang berdampak kepada penurunan tindak pidana kehutanan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPHBN diperoleh outcome berupa terbentuknya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mapan untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan hutan sehingga terjaga kelestarian hutan serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 994.700.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 963.044.700, atau 96,82 %-, sedangkan untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 31.655.300,- yang merupakan sisa mati berasal dari penghematan pembelian Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 279.800,- , belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 2.117.250,- , belanja transportasi sebesar Rp. 496.250,- , belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 322.500 dan Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 8.280.000.- serta Belanja jasa petugas lapangan sebesar Rp. 20.100.000,- .

1. **Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Serta Pengembangan Kawasan Ekosisten Essensial dan Daerah Penyanggah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 417.702.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat (5 Lokasi) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 354.745.200,- (84,93%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan ekosistem esensial tersebut di atas terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yakni :

-) Identifikasi calon lokasi EE

Identifikasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 05 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Kab. Kep. Mentawai.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data potensi kawasan ekosistem esensial yang dimiliki, baik dari aspek teknis maupun sosial budaya.

-) Sosialisasi Pengembangan Calon Lokasi EE

Sosialisasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 07 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kab. Solok, dan Kab. Kep. Mentawai.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang potensi kawasan ekosistem esensial yang dimiliki dan manfaat/fungsi dari kawasan tersebut untuk kelangsungan mahkluk hidup kepada seluruh lapisan masyarakat dan stake holder tekait.

-) Kesepakatan Para Pihak Calon Lokasi EE

Kesepakatan para pihak calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 04 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Solok Selatan tepatnya di areal konservasi / HCVF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia berupa koridor satwa ke Taman Nasional Kerinci Seblat, kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan berupa Habitat Buaya Muara di Lunang Silaut, kabupaten Lima Puluh Kota berupa Ekosistem Danau Buatan PLTA Koto Panjang di Tanjung Balit, Kota Solok berupa Habitat Burung Belibis, Kabupaten Pasaman Barat berupa Ekosistem Mangrove dan habitat Buaya Muara, Kabupaten Agam berupa hidupan liar dan koridor satwa liar, dan Kab. Kep. Mentawai berupa ekosistem mangrove.

Dalam rangkaian pembentukan kawasan ekosistem esensial kesepakatan para pihak merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan walaupun secara prosedural tidak di wajibkan mengingat kesepakatan ini adalah komitmen bersama seluruh stake holder untuk mendukung pengelolaan kawasan ekosistem esensial sehingga dapat mengantisipasi adanya gangguan/penolakan dari salah satu pihak yang mengakibatkan terkendalanya pembentukan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

-) Pembentukan Forum Kolaburasi Calon Lokasi EE

Pembentukan Forum Kolaburasi calon lokasi ekosistem esensial dilaksanakan pada 3 (tiga) Kabupaten/kota yakni di Kabupaten Solok Selatan berupa di areal konservasi / VCF PT Tidar Kerinci Agung dan PT Kencana Sawit Indonesia, Kabupaten dan Kota Solok berupa Habitat Burung Belibis, dan kabupaten Lima Puluh Kota berupa Ekosistem Danau Buatan PLTA Koto Panjang.

Pembentukan forum ini bertujuan untuk mengsinkronkan dan meningkat peran/partisipasi masing-masing stake holder dalam mendukung pembentukan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, yang akan dituangkan dalan suatu rencana aksi sehingga siapa akan melakukan apa dapat lebih jelas.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik kegiatan Identifikasi calon lokasi ekosistem esensial, sosialisasi calon lokasi ekosistem esensial, kesepakatan para pihak calon lokasi ekosistem esensial dan pembentukan Forum Kolaburasi sehingga dapat dilakukan penetapan kawasan ekosistem esensial untuk dilakukan pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik.

Hasil dari pelaksanaaan kegiatan ini adalah terhimpunnya data dan informasi potensi lokasi yang dapat dilakukan pengelolaan ekosistem esensial serta dipetakan secara digital, pahamnya stake holder terkait dan seluruh lapisan masyarakat terhadap keberadaan kawasan eksosistem esensial, dan adanya dukungan serta peran aktif dari stake hoder terkait dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial di peroleh outcome berupa peningkatan kapasitas baik berupa luas maupun fungsi Kawasan Konservasi yang berada diluar Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Sumatera Barat, sehingga keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang terdapat di areal tersebut dapat terus dilestarikan.

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 354.745.200,- (84,93 %) dari total dana sebesar Rp. 417.702.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa Anggaran sebesar Rp. 62.956.800 merupakan sisa mati karena adanya efesiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa Belanja ATK sebesar Rp. 614.100, belanja BBM sebesar 12.409.200, Belanja Seminar KIT sebesar Rp. 125.000, Belanja Transportasi sebesar Rp. 1.000.000, Belanja Penggandaan sebesar Rp. 6.000.000, Belanja Sewa Gedung sebesar Rp. 6.365.000, Belanja Makanan dan Minum sebesar Rp. 5.939.000, belanja jasa buruh/tukang/mandor sebesar Rp. 1.500.000, Belanja jasa pembuatan peta sebesar Rp. 1.760.000, belanja jasa MC/Pembawa Acara sebesar Rp. 450.000 dan belanja perjalanan sebesar Rp.26.794.500,-

1. **Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Menurunnya gangguan keamanan dan kerusakan hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 38.300-.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 27.995.750,- (73,10 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem esensial dilakukan pada kawasan ekosistem esensial yang sudah terbentuk dan sudah memulai proses dalam rangka penetapan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat yakni, di Kabupaten Padang Pariaman berupa konservasi penyu, Kabupaten Pesisir Selatan berupa habitat buaya muara serta kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dharmasraya berupa hidupan liar dan koridor satwa.

Monev dilakukan untuk melihat gambaran pengelolaan kawasan ekosistem esensial tersebut saat ini , baik realisasi rencana aksi yang sudah di buat, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi dan pemecahan masalahnya, maupun melihat proses pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem yang sedang dalam proses.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari pelaksanaaan kegiatan ini adalah terhimpunnya data, bahan dan informasi tentang gambaran pengelolaan kawasan ekosistem esensial sebagai bahan pertimbangan melakukan perbaikan dan koreksi untuk lebih baiknya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial di peroleh outcome terlaksananya pengelolaan kawasan Ekosistem Esensial di Provinsi Sumatera Barat dengan baik dan partisipatif dengan melibatkan peran serta aktif selruh stake holder terkait.

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 27.995.750,- (73,10%) dari total dana sebesar Rp. 38.300.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa Anggaran sebesar Rp. 10.304.250 merupakan sisa mati karena adanya efesiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa Belanja ATK sebesar Rp. 35.000, belanja BBM sebesar 849.250, Belanja Transportasi sebesar Rp. 500.000, Belanja Makanan dan Minum sebesar Rp. 920.000, dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.8.000.000,-.

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :**
2. **Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.249.270.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersusunnya data dan informasi kehutanan (2 Judul) |
| **-** | Outcome | : | Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 202.546.750, ,- (81,26 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan data dan informasi kehutanan yang pelaksanaanya dapat diuraikan sebagai berikut:

* *Penyusunan Buku Statistik Dinas Kehutanan Tahun 2016*

Buku Statistik merupakan media untuk menginformasikan tentang Sumber daya Hutan dan hasil-hasil pembangunan kehutanan pada lima tahun terakhir. Buku ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap akses informasi kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengumpulkan data statistik kehutanan Tahun 2016 maka tim melakukan pengumpulan data ke BPS Kab/Kota dan UPTD KPH di Kab/Kota. Setelah direkapitulasi data yang dihimpun dari Kabupaten/Kota tersebut di rekonsiliasi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari rekonsiliasi tersebut akan menjadi input penyusunan data dan informasi pada buku statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

* *Pameran Indo Green di Jakarta*

Personil pelaksana kegiatan Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVII Tahun 2017 di Kota Sawahlunto Tahun 2017 ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/3787/Sekr-2017 terdiri dari: Ita Rahmawati, S.Hut, MM, Feby Androw, S.Hut, Waluyo, S.Sos, Liza Eka Putri, S.Sos

Kegiatan Pameran IndoGreen Environment & Forestry Expo ke-9 (IEFE) Tahun 2017 merupakan kegiatan rutin tiap tahunnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan T. Wahyu Promo Citra selaku penyelenggara. IndoGreen Environment & Forestry Expo ke-9 (IEFE) Tahun 2017 diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Hutan Internasional ke-5 dan Hari Bakti Rimbawan ke-34, dengan tema “Perhutanan Sosial – Saatnya Untuk Rakyat“,

Pameran ini juga mengkampanyekan dan menyebarluaskan informasi penyelamatan hutan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia, cadangan pangan bagi kehidupan manusia dan menumbuhkan gerakan untuk menanam dan memelihara pohon. Selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, ditampilkan berbagai potensi yang sangat besar dari sector kehutanan seperti potensi hutan tanaman industri, jasa ekowisata, jasa perdagangan dan keanekaragaman hayati, serta agroforestry.

IndoGreen Environment & Forestry Expo ke-9 (IEFE) Tahun 2017 diikuti oleh 97 peserta yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, BUMN sector kehutanan, perusahaan kehutanan, pertambangan serta perusahaan yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungannya.

Selama berlangsungnya pameran diadakan juga sejumlah acara pendukung yaitu : Operning Ceremony, Talk Show Potensi Energi Baru Terbarukan di Hutan Indonesia, Presentase mengenai Perubahan Iklim dan Penganugerahan Duta Hutan, Lomba Kostum Flora dan Fauna di Hutan Indonesia, Presentasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Kunjungan ke Taman Nasional Halimun Salak, Area Trekking dan Suaka Elang Loji, Business Matching Potensi Investasi Usaha di Industri Kehutanan Non Kayu, Green Acoustic Festival (Penyisihan), Seminar dan Bedah Buku Sistem Ekonomi Pancasila, Menjalin Desa-Kota, Upaya Membangun Indonesia dari Pinggirin, Business Mactching Ayo ke Taman Nasional, Lomba Menggambar bertema Hutanku Masa Depanku, Presentasi Kerajinan Kokoru, Presentasi Cerdas Memilih Produk Obat Tradisional, Fun Dance and DJ. Performance dll.

Pelaksanaan Kegiatan IndoGreen Environment & Forestry Expo ke-9 (IEFE) Tahun 2017 menurut rencana di buka oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun karena sesuatu hal diwakilkan kepada Sekretaris Jenderal Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Acara pembukaan dibuka pada tanggal 13 April 2017 pada jam 10.00 WIB, yang dihadiri oleh para undangan baik dari para Duta Besar Negara Asing maupun Pejabat Negara, para peserta stand yang berasal dari seluruh perwakilan provinsi yang ada di Indonesia.

Peserta yang ikut dari Sumatera Barat yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Taman Nasional Siberut dan BKSDA Sumatera Barat).

Para pengunjung berasal dari masyarakat umum, anak-anak sekolah baik dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, Pegawai, Pejabat Negara dan duta besar yang berasal dari luar negeri.

Dengan mengikuti IndoGreen Environment & Forestry Expo ke-9 (IEFE) Tahun 2017 di Jakarta, tempat-tempat wisata yang berada di Sumatera Barat akan lebih terkenal di publik hal ini akan memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat untuk ke depannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya respon pengunjung pameran yang menanyakan tentang perhutanan sosial dan lokasi ekowisata jasa lingkungan di Sumatera Barat.

* *Pameran Hari Pangan Sedunia di Sawah Lunto*

Personil pelaksana kegiatan Pameran Hari Pangan Sedunia ke XXXVII Tahun 2017 di Kota Sawahlunto Tahun 2017 ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/3787/Sekr-2017 terdiri dari: Ita Rahmawati, S.Hut, MM, Feby Androw, S.Hut, Waluyo, S.Sos, Liza Eka Putri, S.Sos.

Dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia ke XXXVII Tahun 2017, Pemerintah Kota Sawahlunto selaku penyelenggara menyelenggarakan Hari Pangan Sedunia ke XXXVII Tahun 2017 dengan tema “Menggerakkan Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia “, dengan kegiatan antara lain : memperkenalkan olahan pangan lokal dari berbagai daerah, promosi potensi wisata di masing-masing daerah, promosi produk-produk kerajinan tangan dari berbagai daerah, promosi hasil tanaman pangan baik berupa tanaman buah-buahan, cabai, terung, sayur-sayuran, perikanan, berbagai macam perlombaan, musik dan lain-lain. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempromosikan potensi wisata di kawasan hutan : taman nasional, taman wisata alam, pariwisata alam, mangrove, jasa lingkungan, serta mempromosikan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa : rendang jamur, coklat jamur, galamai jamur, madu, serta produk-produk lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan Hari Pangan Sedunia ke XXXVII Tahun 2017 dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat.

Acara pembukaan dibuka pada tanggal 29 September 2017 pada jam 10.00 – 11.00 dihadiri oleh Bupati/Wali kota se Sumatera Barat, Forkompindo Kota Sawahlunto, Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kepala SKPD Lingkup Pertanian/Kelautan Perikanan/Kehutanan se Sumatera Barat, Ketua KTNA Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Pengurus Kelompok tani berprestasi se Sumatera Barat.

Peserta yang ikut dari Sumatera Barat yaitu dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, BUMN sektor pertanian, Badan POM, dan lain-lain.

Para pengunjung berasal dari masyarakat umum, anak-anak sekolah baik dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, Pegawai, Pejabat Daerah/Provinsi.

Dengan mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia di Kota Sawahlunto Tahun 2017, tempat-tempat wisata yang berada di Sumatera Barat akan lebih dikenal masyarakat hal ini akan memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat untuk ke depannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya respon pengunjung pameran yang menanyakan tentang perhutanan sosial dan lokasi ekowisata jasa lingkungan di Sumatera Barat.

* *Pameran Sumbar Expo di Batam*

Personil pelaksana kegiatan Sumatera Barat Expo Tahun 2017 ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.2/4579/Sekr-2017 terdiri dari

Yozarwardi UP, S.Hut, M.Si, Ita Rahmawati, S.Hut, MM, Feby Androw, S,Hut, Mika Lestaria, S.Hut.

Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Barat Expo tahun 2017 yang berlangsung tanggal 9 sampai dengan 12 November 2017 yang bertempat di Lapangan Engku Putri Kota Batam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sumatera Barat Expo tahun 2017 dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada hari kamis tanggal 9 November 2017 jam 20.00 wib.
2. Pembukaan Sumatera Barat Expo 2017 dihadiri oleh para undangan terdiri dari kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Barat, Wali Kota Batam dan Ketua Ikatan Perantau Sumatera Barat – Batam.
3. Sumatera Barat Expo 2017 mengangkat tema Pengembangan Destinasi, Potensi dan Investasi Wisata Halal Sumatera Barat.
4. Sumatera Barat Expo tahun 2017 juga diikuti dari luar Sumatera Barat yaitu Jawa Timur dan Palembang. Stand juga di isi oleh produk-produk usaha dan perusahaan yang ada di Sumatera Barat.
5. Para pengunjung sangat antusias sekali mengunjungi stand-stand yang ada karena sangat unik dan beragam pajangan disetiap stand yang ada. Pada umumnya pengunjung stand adalah masyarkat umum, instansi Pendidikan, pegawai negeri dan para pengusaha dan para wisatawan di kota Batam
6. Pengunjung stand dinas kehutanan pada umumnya sangat tertarik dengan produk-produk olahan dari kelompok tani hutan seperti Rendang Jamur, Coklat Jamur, Galamai Jamur.
7. Ekowisata dan Jasa Lingkungan yang ditampilkan oleh Dinas Kehutanan adalah hasil binaan dari Dinas Kehutanan sendiri dan telah dikembangkan.
8. Sumatera Barat Expo Tahun 2017 diselenggarakan dalam rangka mempromosikan potensi dan investasi Sumatera Barat tingkat Nasional dan Internasional serta sebagai wujud komitmen bersama dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat dengan tema “Pengembangan Destinasi, Potensi dan Investasi Wisata Halal Sumatera Barat”.
9. Sumatera Barat Expo Tahun 2017 bertujuan untuk mengangkat potensi pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi serta meningkatkan daya saing produk unggulan dan arus wisatawan ke Sumatera Barat.
10. Materi yang dipamerkan meliputi Layanan Publik, Produk dan Jasa Parawisata, Produk Unggulan Kerajinan Daerah, Produk Ekonomi Kreatif, Produk Daur Ulang, Produk Binaan Koperasi dan UKM, Lembaga Keuangan dan Perbankan, BUMN dan CSR, Produk Energi dan Sumberdaya Mineral, Produk Perikanan dan Kelautan, Produk Pertanian dan Kehutanan, Informasi, Komunikasi dan Teknologi, Produk UMKM, dan lain – lain.
11. Sumbar Expo tahun 2017 di Kota Batam dikunjungi oleh beberapa elemen seperti para pejabat pemerintahan, potensi buyer’s dan trader’s, para expatriat, pelajar, mahasiswa, institusi pendidikan dan masyarakat umum.

Kegiatan tersebut diatas dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja karena dengan penyusunan buku statistik kehutanan diharapkan data yang digunakan untuk menyusun laporan kinerja organisasi lebih akurat.

Tabel 2 :Realisasi Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Kehutanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) |
|  | 249,270,000 | 202,546,750 | 46,723,250 | 81.26 |
| Belanja Bahan Bakar | 7,697,000 | 1,336,450 | 6,360,550 | 17.36 |
| Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) |  |  |  |  |
| Belanja Bahan | 9,000,000 | 8,810,000 | 190,000 | 97.89 |
| Percontohan/Promosi |  |  |  |  |
| Belanja cetak | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100.00 |
| Belanja Penggandaan | 4,679,000 | 1,291,000 | 3,388,000 | 27.59 |
| Belanja sewa gedung/ | 74,000,000 | 62,000,000 | 12,000,000 | 83.78 |
| kantor/tempat |  |  |  |  |
| Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias | 15,000,000 | 14,500,000 | 500,000 | 96.67 |
| Belanja makanan dan minuman rapat | 3,120,000 | 2,200,000 | 920,000 | 70.51 |
| Belanja makanan dan minuman kegiatan | 2,300,000 | 2,300,000 | - | 100.00 |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 49,690,000 | 42,410,000 | 7,280,000 | 85.35 |
| Belanja perjalanan dinas luar | 81,784,000 | 65,699,300 | 16,084,700 | 80.33 |
| daerah |  |  |  |  |

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:

* penghematan bbm
* penghematan penggandaan
* sisa sewa tempat expo
* penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan.

1. **Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 239.499.900,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya sosialisasi ISO 9001 : 2008 lingkup pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan operasional SPIP (4 laporan) |
| **-** | Outcome | : | Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 154.421.500,- (64,48 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP sub kegiatan implementasi ISO 9001:2015 terdiri dari:

* *Sosialisasi ISO 9001:2015 dan Workshop Perbaikan Dokumen ISO 9001:2008 Menjadi Dokumen ISO 9001: 2015 pada tanggal 25 s/d 27 April 2017.*

Kegiatan ini dilakukan di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang Narasumber dari Tuv Rheinland Bapak Ervi Ilyas

Sosialisasi diberikan kepada 60 orang yang berasal dari Eselon III. IV dan Staf lingkup Dinas Kehutanan. Sementara Workshop Perbaikan Dokumen ISO 9001:2008 Menjadi Dokumen ISO 9001: 2015 dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari eselon III/ IV dan tim implementasi ISO 9001:2015 pelayanan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Ringkasan hasil Sosialisasi dan Workshop Perbaikan Dokumen ISO 9001:2008 Menjadi Dokumen ISO 9001: 2015 antara lain dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3 : Notulen Sosialisasi ISO 9001:2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sesi | Kegiatan | Output |
| Hari Pertama: 25 April 2017 | | |
| 1 | Penguatan Pemahaman Konsep Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 | Menguatnya pemahaman peserta terhadap konsep SMM ISO 9000 dan peningkatan komitmen dalam penerapannya |
| 2 | Konsep mutu (Quality concept) | Pemahaman peserta terhadap konsep mutu berikut dimensi-dimensi mutu khususnya mutu pelayanan (Servqual) |
| 3 | Awareness ISO 9001:2015 dan Persyaratan ISO 9001:2015 | Pemahaman peserta terhadap latar belakang dan tujuan perubahan ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 serta cakupan perubahan yang signifikan |
| Hari Kedua: 26 April 2017 | | |
| 4 | Evaluasi Existing Dokumen Sistem Manajemen Mutu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | Hasil Evaluasi |
| 5 | Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan 9001:2015 | Pemahaman peserta terhadap dokumen SMM ISO 9001:2008 dan perubahan dokumen yang terjadi pada SMM ISO 9001:2015 |
| 6 | Penyusunan Pedoman Mutu | Draft dokumen Pedoman Mutu mengacu pada persyaratan ISO 9001:2015 |
| Hari ketiga: 27 April 2017 | |  |
| 7 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Manajemen Mutu (SOP MM) | Draft dokumen Standar Operasional Prosedur Manajemen Mutu (SOP MM) |
| 8 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) | Draft dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) mengacu pada Permen PAN dan RB No 35 Tahun 2015 |
| 9 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) | Draft dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) mengacu pada UU No 25 Tahun 2009, PP No 96 Tahun 2012 dan permen PAN dan RB no 15 Tahun 2014 |

* Sosialisasi ISO 9001:2015 diberikan kepada aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPH. Hal ini agar nantinya setelah pelantikan KPH juga akan mengimplementasikan ISO 9001:2015 di unit kerja KPH.
* ISO 9000 adalah standar Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System, ISO 9000 bukanlah standar produk.
* Quality Management System (QMS) Seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses-proses untuk mencapai sasaran tersebut.
* Tujuan QMS ISO 9000 Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem secara efektif, termasuk proses perbaikan sistem dan kepastian kesesuaiannya dengan persyaratan pelanggan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.
* Tantangan Global dan Reformasi Birokrasi adalah UU Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No 29-2014), Penilaian Kinerja PNS (PP No 46 Tahun 2011) & Sistem Penggajian Berbasis Kinerja (Remunerasi), Pencitraan Instansi Pemerintah –Good Governance sehingga penerapan ISO 9001:2015 dianggap sangat perlu dalam menjawab tantangan tersebut diatas.
* Latar belakang perubahan ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015 adalah memastikan bahwa standar tetap up to date untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
* Setiap unit kerja dapat dinilai kinerjanya dalam pelayanan melalui isian formulir kepuasan pelanggan yang dibagikan kepada para stake holders sebagai pelanggan unit kerja tersebut.
* Kepala Dinas kehutanan yang berada pada manajemen atas tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bukan hanya untuk mendapat sertifikat namun lebih kepada untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggannya.
* Workshop Perbaikan Dokumen ISO 9001:2008 Menjadi Dokumen ISO 9001: 2015 dilakukan dengan tujuan melakukan penyesuaian manajemen pelayanan menjadi ISO 9001:2015.
* Workshop Perbaikan Dokumen dilakukan agar proses penyusunan dokumen manual mutu dan dokumen lain yang dipersyaratkan pada ISO 9001:2015 dilalakukan melalui kesamaan persepsi tentang konsep dan implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 serta menguatnya pemahaman dan motivasi semua Staf Dinas Kehutanan dalam menerapkan SMM ISO 9001:2015 pada seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
* Pada Workshop perbaikan dokumen ternyata tidak banyak yang harus dipersiapkan oleh Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi beberapa persyaratan antara lain telah memiliki SOP-AP dan SPP, analisa resiko dan pengendaliannya yang tertuang dalan buku Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Namun beberapa dokumen yang harus dilengkapi antara lain buku manual mutu, dilengkapi dengan SOP MM sesuai ISO 9001:2015, identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku serta matrik komunikasi.
* Pada ISO 9001:2015 terdapat sepuluh klausul yang harus dipenuhi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan pada *work shop* tersebut telah dilakukan simulasi penyusunan identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku serta matrik komunikasi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang terdiri dari seluruh peserta workshop sehingga dapat didiskusikan jika ada kesalahan penyusunan matrik diharapkan seluruh peserta mengerti dalam penyusunan dokumen tersebut.
* Tindaklajut dari sosialisasi ini dan workshop perbaikan dokumen ISO 9001:2008 menjadi dokumen ISO 9001:2015 adalah, Eselon IV lingkup Dishut Sumatera Barat melakukan penyempurnaan SOP-AP dan SPP, penyusunan dokumen Manual Mutu oleh Tim Implementasi ISO 9001:2015, penyusunan identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku serta matrik komunikasi yang setelah dilkukan audit eksternal dapat dikategorikan sesuai dengan yang dipersayaratkan ISO 9001:2015.
* *Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil)*

Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) Sosialisasi ISO Tahun 2017 dilaksanakan di lima KPH/Kab dengan rincian sebagai berikut : Kab. 50 Kota, Kab. Pessel, Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman.

* Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kab. Dharmasraya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094.3/2066/Sekr-2017 tanggal 13 Juni 2017. Personil Pelaksana Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si, Ita Rahmawati, S. Hut, MM dan Sasri Anita, SS. Waktu dan Tempat : Tanggal 21 s.d 22 Juni 2017 ke Kabupaten Dharmasraya.
* Workshop implementasi ISO 9001:2015 di wilayah Dharmasraya bertujuan untuk: Memahami Dasar Perubahan Standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, memahami konsep dan interpretasi persyaratan ISO 9001:2015, dapat mengaktualisasikan persyaratan ISO 9001:2015 di masing-masing unit kerja wilayah Dharmasraya.
* Workshop implementasi ISO 9001:2015 pada wilayah Dharmasraya membahas hal-hal sebagai berikut:

• Perubahan Standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015

• Pembahasan persyaratan ISO 9001:2015

• Contoh Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure)

* Workshop implementasi ISO 9001:2015 di Dharmasraya dilakukan dengan metode paparan dari nara sumber dilanjutkan dengan workshop penyusunan SOP, pembuatan matrik komunikasi dan identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Workshop penyusunan SOP, pembuatan matrik komunikasi dan identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan dilakukan dengan membagi peserta workshop menjadi dua kelompok dan worksop difasilitasi oleh tim Dinas Kehutanaan Provinsi Sumatera Barat.
* Workshop dihadiri oleh Korwil Dharmasraya dan staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Wilayah Dharmasraya beserta tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan kantor wilayah Dharmasraya. Workshop dibuka oleh Koordinator Wilayah Dharmasraya dan dilanjutkan oleh paparan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dalam pembukaannya Korwil Dharmasraya menyatakan kesiapan wilayah Dharmasraya untuk menerapkan ISO 9001:2015 pada Tahun 2018. Paparan oleh nara sumber antara lain menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
* Hal yang baru dalam ISO 9001:2015 adalah persyaratan explisit tentang berpikir berbasis risiko (risk based thinking) untuk mendukung dan meningkatkan pemahaman dan aplikasi dalam pendekatan proses yang sudah ada pada versi standar ISO 9001 sebelumnya. Risiko adalah efek ketidakpastian pada hasil yang diharapkan dan konsep pemikiran berbasis risiko selalu tersirat dalam pasal persyaratan ISO 9001:2015. Standar internasional ini membuat berpikir berbasis risiko lebih eksplisit dan terwujud dalam persyaratan untuk pembentukan, pelaksanaan, pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus dari sistem manajemen mutu.
* Manajemen senior harus mampu menunjukkan pemahaman risiko bisnis dan bagaimana risiko tersebut dapat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebuah proses manajemen risiko yang efektif akan menjadi bagian yang mewarnai dari design sistem manajemen mutu organisasi yang mengadopsi standar ISO 9001:2015 ini. Dengan menerapkan berpikir berbasis risiko ini, organisasi memastikan sistem manajemen dapat mencapai yang diinginkan hasil dan mencapai peningkatan terus-menerus. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, dalam standar persyaratan ISO 9001:2015 membahas apa, siapa, bagaimana, dan kapan manajemen risiko perlu dilaksanakan secara efektif.
* Organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan dalam nya sistem manajemen proses dan mengevaluasi efektivitas tindakan ini.
* Organisasi perlu untuk mengidentifikasi di mana risiko timbul dan memastikan kendali berada di tempat yang tepat untuk mengelolanya. Perlu diingat bahwa risiko yang didefinisikan sebagai efek ketidakpastian pada hasil yang diharapkan menjadi pemikiran berbasis risiko yang lebih eksplisit pada standar ISO 9001:2015. Tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama dalam hal kemampuan organisasi untuk memenuhi sasarannya, dan konsekuensi dari proses, produk, pelayanan atau ketidaksesuaian sistem atau tidak sama untuk semua organisasi.
* Setelah Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan paparan dilanjutkan dengan diskusi. Hasil diskusi adalah sebagai berikut:

1. Ali Nafri: apakah implementasi ISO 9001:2015 akan dilaksanakan di seluruh calon UPTD KPH nantinya.

Tanggapan: Iya, scope implementasi ISO 9001:2015 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan.

1. Wira: apakah dasar yang digunakan untuk penyusunan SOP adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012.

Tanggapan: Iya

* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Wilayah Dharmasraya berkomitmen untuk mengimplementasikan ISO 9001:2015. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat wilayah Dharmasraya telah melakukan pembelajaran penyusunan Standar Operasional Prosedur kegiatan, pembuatan matrik komunikasi dan identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang nantinya akan mereka laksanakan jika UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Dharmasraya terbentuk,
* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat wilayah Dharmasraya telah menyusun SOP kegiatan pada Tahun 2016 dan SOP tersebut akan tetap digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun selanjutnya karena masih relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan saat wilayah Dharmasraya disahkan menjadi UPTD Kesatuan Pengelola Hutan nantinya.
* Dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan diketahui bahwa secara umum pelayanan wilayah Dharmasraya masih memerlukan peningkatan mulai dari keramahan, kedisiplinan, dan kecepatan penyelesaian pelayanan.
* Matrik komunikasi yang disusun oleh wilayah Dharmasraya sudah baik namun harus di implementasikan.
* Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kabupaten Pasaman Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 094.3/2062/Sekr-2017 tanggal 13 Juni 2017. Personil pelaksanaan Workshop Implementasi ISO di wilayah Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh Tim Fazlul Taufik, ST, M.Eng, Feby Androw, S.Hut, Sasri Anita, Ss
* Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebelum melakukan Workshop Implementasi ISO di wilayah Kabupaten Pasaman terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Korwil Kabupaten Pasaman terkait dengan undangan, peserta, tempat dan makan/minum.
* Pelaksanaan Workshop Implementasi ISO di wilayah Pasaman Raya dilaksanakan di kantor Korwil Pasaman pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 mulai jam 10.00 WIB s/d 18.30 WIB yang dihadiri oleh Karyawan/ti lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Wilayah Pasaman Raya sebanyak 30 orang dan Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
* Workshop Implementasi ISO dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Koordinator Wilayah Pasaman Raya.
* Acara selanjutnya adalah arahan dan paparan oleh Narasumber (Fazlul Taufik,ST, M.Eng), hal-hal yang disampaikan antara lain (bahan terlampir) :
* Selain hal tersebut di atas, juga dilaksanakan Work Shop Penyusunan SOP-AP.
* Disamping itu juga pelaksanaan Work Shop penyusunan matrik komunikasi dan Work Shop Identifiksi Pemangku Kepentingan dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
* Koordinator wilayah Pasaman Raya mempuyai komitmen akan melaksanakan dan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan akan melakukan penyiapan kelembagaan/dokumen dan peningkatan kapasitas aparatur terkait ISO 9001:2015 agar dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
* Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kabupaten Dharmasraya Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 094.3/2059/Sekr-2017 tanggal 13 Juni 2017. Personil pelaksanaan Workshop Implementasi ISO di wilayah Kabupaten Agam dilaksanakan oleh Tim Sayogo Hutomo, Ita Rahmawati dan Ninin Asriani.
* Sambutan dan pembukaan oleh Koordinator Wilayah Dharmasraya. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Wilayah Dharmasraya memiliki komitmen akan melaksanakan dan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan akan melakukan penyiapan kelembagaan/dokumen dan peningkatan kapasitas aparatur terkait ISO 9001:2015 agar dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2015.
* Nara Sumber memparkan manfaat penerapan ISO adalah membuat sistem kerja dalam organisasi menjadi efektif, efisien dan sesuai tata aturan yang berlaku, membuat standar kerja yang terdokumentasi dan mempunyai aturan kerja yang baik sehingga memuudahkan dalam pengendalian.
* Tujuan dari Workshop ini adalah untuk memahami dasar perubahan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, memahami konsep dan mengaktualisasikan penerapan ISO 9001:2015 pada unit kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat wilayah Agam Raya.

Alasan perubahan ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015 adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi dari 2000 hingga 2008 maka 9001:2015 lebih mudah dipahami dan dapat diaplikasikan untuk seluruh organisasi berbagai jenis dan ukuran.

* Prinsip Manajemen Mutu:

1. Customer Fokus: organisasi pemerintah fokusnya adalah pelayanan terhadap pelanggan.

2. Leadership: pemimpin berperan untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan yang akan dicapai organisasi untuk menciptakan kondisi anggota organisasi agar dapat mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.

3. Engagement of people: semua anggota organisasi terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Process Approach: pendekatan proses

5. Improvement: peningkatan

6. Evidense besed decision making: keputusan berdasarkan analisa dan evaluasi

7. Relationship Management: manajemen hubungan.

* Workshop penyusunan SOP-AP
* Workshop penyusunan matrik komunikasi
* Workshop penyusunan identifikasi kebutuhan dan harapan stake holders
* Diskusi:

a. Ali Nafri: apakah implementasi ISO 9001:2015 akan dilaksanakan di seluruh calon UPTD KPH nantinya.

Tanggapan: Iya, scope implementasi ISO 9001:2015 pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan.

b. Wira: apakah dasar yang digunakan untuk penyusunan SOP adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012.

Tanggapan: Iya

* Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kabupaten Kabupaten Solok Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2061/Sekr-2017 tanggal 13 Juni 2017. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 19 s/d 20 Juni 2017 . Personil yang ditugaskan adalah Kusworo, SP, M.Si, Ita Rahmawati, S.Hut, MM, Nensi, SE, Ak.
* Workshop Implementasi ISO dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kehutanan Wilayah Kabupaten Solok. Pada kesempatan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ISO 9001 : 2015 adalah salah satu Standar yang dikeluarkan oleh ISO mengenai Sistem Manajemen Mutu. Sistem adalah kesatuan berbagai proses yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mutu adalah kemampuan suatu produk atau layanan untuk memenuhi persyaratan Pelanggan. Sedangkan Manajemen adalah perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengaturan. Standar internasional ini menetapkan persyaratan ditujukan terutama untuk memberikan kepercayaan pada produk dan layanan yang diberikan oleh suatu organisasi dan dengan demikian meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. Untuk dapat menjalankan ISO 9001:2015, dibutuhkan pengertian dan pemahaman yang baik mengenai management system itu sendiri.

3. Acara workshop dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Solok, Penyuluh Kehutanan, Polhut dan staf Dinas Kehutanan Wilayah Kabupaten Solok.

4. Tujuan dilaksanakan workshop adalah agar dapat memahami dasar perubahan Standard ISO 9001: 2008 menjadi ISO 9001:2015, memahami konsep dan interpretasi persyaratan ISO 9001:2015 serta dapat mengaktualisasikan persyaratan ISO 9001:2015 di masing-masing unit kerja masing-masing

5. Isi Pembahasan Workshop :

- Perubahan standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015

- Pembahasan persyaratan ISO 9001:2015

- Contoh Pembuatan SOP

6. Alasan perubahan ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015 adalah :

- Menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk jangka panjang

- Menjadi persyaratan umum yang tetap relevan untuk semua ukuran dan jenis organisasi

- Mendukung efektifitas proses manajemen dalam rangka mencapai target yang diinginkan

- Mempertimbangkan perubahan implementasi sejak revisi versi 2000 dan 2008

- Penggunaan istilah-istilah yang lebih sederhana untuk memastikan pemahaman umum dan interprestasi yang konsisten dari persyaratan

7. Persyaratan ISO 9001 : 2015 diantaranya adalah :

- Harus menetapkan isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu

- Harus memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal tersebut

- Menetapkan ruang lingkup dengan mempertimbangkan masalah eksternal dan internal.

8. Contoh pembuatan Standar Operating Procedure (SOPD) juga dibahas pada workshop ISO 9001:2015 yang dibuat secara berkelompok dan dibuat untuk 2 (dua) seksi pada kantor wilayah Kabupaten Solok.

* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan di bidang kehutanan diharapkan dapat dikelola secara professional dengan mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015
* Workshop Implementasi ISO 9001:2015 ditujukan agar dapat meningkatkan pola leadership, sistem manajerial, budaya kerja, motivasi kerja, dan aspek lainnya yang akan menghasilkan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
* Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kabupaten Lima Puluh sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2058/Sekr-2017 tanggal 3 Juni 2017. Personil Pelaksana yang ditugaskan adalah: Ir. Ruswin Rustam, Afrial Muhamad S.Pt, M.Si, Berta Dewita, S.Hut. Pelaksanaan tugas dilakukan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 15 s/d 16 Juni 2017 di Kantor Korwil Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
* Workshop ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 mengenai Manajemen Mutu dihadiri oleh peserta yang terdiri dari ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
* Acara workshop dibuka dan dipimpin oleh Sdr. Nevin, S.Hut.M.Si/ selaku Koordinator Kehutanan Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh.
* Narasumber, terdiri dari Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Perintah Nomor 094.3/2058/Sekr-2017 tanggal 3 Juni 2017, yakni :
* Ir. Ruswin Rustam selaku Wakil Manajemen Mutu (WMM) sekaligus sebagai auditor internal ISO 9001:2008,
* Afrial Muhamad, S.Pt.M.Si selaku auditor internal ISO 9001: 2008 dan,
* Berta Dewita, S.Hut selaku pemandu teknis workshop.
* Susunan acara workshop, setelah
* Pembukaan oleh Korwil Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh (Nevin, S.Hut.M.Si),
* Penyampaian materi workshop oleh Ir. Ruswin Rustam,
* Penyampaian materi workshop oleh Afrial Muhamad, S.Pt.M.Si,
* Latihan pendalaman materi workshop yang dipandu oleh Berta Dewita, S.Hut
* Pokok-pokok materi yang disampaikan oleh Narasumber adalah, sbb: Tujuan workshop ISO 9001:2015, alasan perubahan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, struktur Klausul ISO 9001:2015, prinsip-prinsip Manajemen Mutu, perubahan utama ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015, persyaratan ISO 9001:2015, contoh Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure), pembuatan Matrik Identifikasi Kebutuhan Pelanggan, Matrik Komunikasi dan matrik Identifikasi Standar Pelayanan Publik.
* Jalannya acara Workshop sebagai berikut:
* Pembukaan dari Koordinator Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh (Nevin, S.Hut, M.Si).
* Penyampaian materi oleh Nara Sumber Ir. Ruswin Rustam Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDAS RHL) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
* ISO 9001:2008/9001:2015 adalah wujud kegiatan kita sehari-hari seperti prosedur kerja, sistem komunikasi yang distandarkan sehingga ISO bertujuan untuk menyeragamkan semua pekerjaan yang ada di instansi agar setiap personil mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Dalam ISO yang sangat penting adalah komunikasi antara pihak yang menyampaikan informasi dan yang menerima informasi.
* Konteks Organisasi
* Mengetahui pekerjaan yang ada di suatau organisasi/instansi
* Mengetahui mamahami kebutuhan dan harapan pelanggan
* Kepemimpinan dan komitmen
* Kebijakan yang akan digunakan
* Peran organisasi dan kekuasaannya
* Perencanaan/ kita semua bekerja pasti ada resiko
* Tindakan
* Operasi
* Penilaian KPH yang akan dibentuk di daerah nanti nya akan menerapakan prinsip-prinsip ISO 9001:2015 dan akan diaudit baik internal maupun eksternal.
* Manajemen Review seperti rapat monitoring dan evaluasi
* Perubahan untuk perbaikan
* PDCA (Plan, Do, Check Action)
* Quality Management System, performance dari kinerja suatu organisasi/ instansi tergantung dari kepuasan pelanggan atau konsumen.
* Prinsip Manajemen Mutu: fokus pada pelanggan yang bisa dari internal sendiri bisa dari luar instansi kita, berusaha melebihi dari harapan pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses, hasil yang konsisten tercapai lebih efektif dan efisien bila dipahami kegiatan dan dikelola sebagai proses yang saling terkait, perubahan untuk perbaikan, bukti berdasarkan keputusan, hubungan manajemen berupa hubungan baik dengan instansi terkait baik itu instansi internal maupun instansi eksternal
* Perubahan utama ISO 9001 : 2008: ISO 9001:2008 mempunyai 8 klausul sedangkan di ISO 9001 : 2015 mempunyai 10 klausul yang lebih jelas dan lebih lengkap diantaranya : konteks organisasi, risiko dan tindakan pencegahan, kita telah memprediksi apa hal-hal yang akan menghambat pekerjaan, informasi terdokumentasi, kepemimpinan, bagaimana pimpinan bisa menggerakkan / mengajak orang untuk mencapai tujuan, manual mutu, spesifikasi mengenai isi manual mutu tetap berlaku tetapi tidak ada persyaratan khusus mengenai itu.
* Inti dari ISO adalah hal-hal yang akan kita kerjakan sehari-hari atau apa yang kita lakukan mulai dari Pimpinan tertinggi sampai staf harus memahami apa yang akan kita kerjakan.
* Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu :
* Sesuai dengan persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen mutu
* Persyaratan standar internasional ini secara efektif diimplementasikan dan dipelihara
* Manajemen Review, Manajaemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana.
* Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu.
* Diskusi
* Adanya keinginan daerah untuk mempercepat pembentukan dan kejelasan Organisasi di daerah (pertanyaan YUSUF NUR)

Jawaban narasumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar akan membentuk Organisasi UPTD KPH di Kabupaten tapi sekarang kita terkendala regulasi sesuai Permendagri Nomor 12 2017 yang mensyaratkan naskah akademis untuk membentuk UPTD KPH. Saat ini Dinas Kehutanan sudah menyusun naskah akademis, draf Pergub tentang UPTD KPH, draf SOTK dan Tupoksi.

* Untuk mencapai atau menerapkan ISO atau standar yang kita rencanakan harus ada faktor pendukung baik itu internal atau eksternal, baik itu SDM personil maupun sarana dan prasarana (pertanyaan JONI SAPUTRA)

Jawaban narasumber:

* Setelah UPTD KPH terbentuk di daerah maka Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melengkapi semua personil dan sarana prasarana yang ideal di suatu KPH untuk mencapai tujuan organisasi/ instansi. Polisi Kehutanan apakah bisa menerapkan ISO jumlah personil yang tidak mencukupi (pertanyaan ALNOFA SONTA MEGA)

Jawaban narasumber:

* Setelah UPTD KPH dibentuk nanti akan dibahas perbandingan antara kebutuhan personil dengan kawasan hutan di wilayah KPH. ISO ini mengubah pimpinan yang selama ini dijabat Kepala Dinas akan mengarah ke Manajer seperti di perusahaan (pertanyaan MELFENDRI)

Jawaban narasumber:

* ISO akan di laksanakan setelah dibentuknya KPH, memang sekarang ini masih wacana yang apa bila KPH sudah dibentuk maka lansung dapat kita laksanakan.
* Apakah KPH hanya mengurus dalam kawasan atau juga di luar kawasan dan apa regulasinya (pertanyaan ISMET FANANI)

Jawaban narasumber:

* Kita membuat SOP sesuai dengan SOTK yang akan dibentuk, rencananya nanti KPH juga akan menangani urusan di luar kawasan bukan hanya di dalam kawasan.
* Implementasi ISO akan diimplementasikan di KPH nantinya jika sudah ditetapkan kelembagaannya secara defenitif.
* Workshop ISO bertujuan agar peserta memahami Dasar Perubahan Standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, memahami konsep dan interpretasi persyaratan ISO 9001:2015 dan dapat mengaktualisasikan persyaratan ISO 9001:2015 di masing-masing unit kerja.
* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam mendukung implementasi ISO 9001:2015.
* Selalu dilakukan audit internal secara berkala di Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terbuka untuk komunikasi lebih lanjut.

• Workshop implementasi ISO 9001-2015 ke KPHkab/kota (korwil) ke Kabupaten Solok Selatan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/2065/Sekr-2017 tanggal 13 Juni 2017. Personil Pelaksana, personil yang ditugaskan Ir. Ruswin Rustam, Afrial Muhamad S.Pt, M.Si, Waluyo, S.Sos

Pelaksanaan tugas dilakukan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 4 s/d 5 Juli 2017 di Kantor Korwil Kehutanan Kabupaten Solok Selatan.

* Workshop ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 mengenai Manajemen Mutu dihadiri oleh peserta yang terdiri dari ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.
* Acara workshop dibuka dan dipimpin oleh Hamdani, S.Sos/Koordinator Kehutanan Wilayah Kabupaten Solok Selatan.
* Susunan acara workshop, sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Korwil Kabupaten Solok Selatan (Hamdani, S.Sos),

- Penyampaian materi workshop oleh Ir. Ruswin Rustam,

- Penyampaian materi workshop oleh Afrial Muhamad, S.Pt.M.Si,

- Latihan pendalaman materi workshop yang dipandu oleh Waluyo, S.Sos

* Pokok-pokok materi yang disampaikan oleh Narasumber adalah, sbb:

- Tujuan workshop ISO 9001:2015

- Alasan perubahan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015

- Struktur Klausul ISO 9001:2015

- Prinsip-prinsip Manajemen Mutu

- Perubahan utama ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015

- Persyaratan ISO 9001:2015

- Contoh Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure)

- Pembuatan Matrik Identifikasi Kebutuhan Pelanggan, Matrik Komunikasi dan matrik Identifikasi Standar Pelayanan Publik.

* Diskusi

Pertanyaan :

1. Pak Hasan:Apa keuntungan bagi kita dengan implementasi ISO di OPD tempat kita bekerja?, Siapakah yang mengeluarkan sertifikat ISO ?

2. Pak Joni Putra :Terkait klarifikasi lahan, kita sebagai petugas, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, petugas mendapatkan dana yang belum ada standarnya, sehingga para petugas sekarang takut memungut biaya terkait dengan adanya pungli, sehingga tidak berani lagi memungut biaya tersebut. Apa yang harus dilakukan?, Apakah ke depannya perlu adanya SOP ?

3. Pak Anton Gusman: Dalam penerapan ISO ketika memuaskan pelanggan, sementara harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan lama sertifikat status tanah masih berlaku, sedang dengan adanya aturan baru sertifikat status tanah tidak berlaku lagi, kalau dikaitkan dengan ISO, bagaimana menurut pendapat Bapak hubungannya dengan ISO ?

Jawab :

1. Dengan diterapkannya ISO ada dua keuntungan yang diperoleh: Keuntungan pribadi : kepuasan kita melayani masyarakat ketika masyarakat puas terhadap layanan yang kita berikan, Keuntungan dinas : ISO sebagai alat untuk memenuhi harapan masyarakat dengan syarat bahwa pelayanan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila pelayanan kita masih kurang terhadap masyarakat, kita harus memperbaikinya terus menerus.

2. Sertifikat ISO 9001:2008 dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Internasional yang berkantor pusat di Swiss yakni : TUVRheinland.

3. Mengenai standar biaya pengurusan klarifikasi lahan :

- Harus ada dasar hukumnya.

- Harus sesuai dengan aturan.

- Harus ada keputusan dari Pemerintah yang lebih tinggi.

- Pemerintah harus menganggarkan baik bersumber dana dari APBD maupun APBN.

- Peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Standar Biaya dan Kegiatan untuk pelaksanaan survey.

4. Terkait dengan status tanah, antara aturan lama dan aturan baru, mana yang dipakai, yang dipakai adalah aturan yang baru yang kita pakai dalam segala urusan termasuk urusan status tanah yang berada di Solok Selatan.

* Implementasi ISO akan diimplementasikan di KPH nantinya jika sudah ditetapkan kelembagaannya secara defenitif.
* Workshop ISO bertujuan agar peserta memahami Dasar Perubahan Standar ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015, memahami konsep dan interpretasi persyaratan ISO 9001:2015 dan dapat mengaktualisasikan persyaratan ISO 9001:2015 di masing-masing unit kerja.
* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam mendukung implementasi ISO 9001:2015.
* Selalu dilakukan audit internal secara berkala di Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terbuka untuk komunikasi lebih lanjut.

Dari pelaksanaan workshop implementasi ISO 9001:2015 maka Sub Bagian Program sebagai pelaksana kegiatan menyarankan:

a. Perlu pemahaman yang dalam lagi bagi setiap ASN terutama yang berada di korwil di kab/kota agar mudah dalam mengimplementasikan ISO 9001:2015.

b. Tata cara penyusunan SOP yang merupakan cikal bakal isi dokumen mutu ISO juga perlu dialokasikan waktu khusus untuk diworkshopkan di Korwil/Kabupaten/Kota.

c. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus baik terhadap dokumen mutu ISO maupun dalam implementasi ISO di lingkup Dinas

* *Audit Internal*

Sesuai jadwal audit plan maka audit internal implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan selama 2 hari yaitu mulai tannggal 19 s.d 20 september 2017.

Audit internal dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai kompetensi yang dimiliki.

Dari hasil audit internal maka tim auditor melakukan rekapitulasi terhadap hasil audit sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4 : Rekapitulasi hasil audit internal lingkup pelayan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  **Lap. Audit** | **Unit Kerja** | **Aktivitas/fungsi yang diaudit** | **Auditor** | ***Auditee*** | **Tanggal Audit** | **Temuan Audit** | **Koreksi** | **Tindakan korektif** | **Status**  **Audit** |
| 1 | UPTD BPTH | Kasubag TU UPTD BPTH, Kasi Pengembangan Sumber Benih dan Kasi Informasi Perbenihan | Jusmalinda, S.Hut, M.Si | Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si | 19-9-2017 | * Benih/bibit yang rusak di persemaian UPTD BPTH tidak dicatat dalam buku register bibit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP AP Nomor SOP/BPTH/PSB/02/Dishut/2017 (SOP penerimaan Bibit Persemaian UPTD BPTH). * Kondisi bibit di persemaian UPTD BPTH belum dilaporkan secara berkala oleh petugas persemaian kepada Kasi Pengembangan Sumber Benih sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP AP Nomor SOP/BPTH/PSB/02/Dishut/2017 (SOP penerimaan Bibit Persemaian UPTD BPTH). | Petugas persemaian UPTD BPTH akan membuat buku register dan laporan berkala tentang kondisi bibit kepada Kasi Pengembangan Sumber Benih | Menambah Pegawai persemaian jika tersedia anggaranPage | Belum Selesai |
|  |  |  |  |  |  | * Informasi persentase tumbuh dan persentase kematian bibit di persemaian UPTD BPTH belum dilaporkan secara berkala oleh petugas persemaian kepada Kasi Pengembangan Sumber Benih sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP AP Nomor SOP/BPTH/PSB/04/Dishut/2017 (SOP penerimaan Bibit Rekalsitran di Persemaian UPTD BPTH). | Petugas persemaian UPTD BPTH akan membuat Informasi persentase tumbuh dan persentase kematian bibit di persemaian UPTD BPTH secara berkala kepada Kasi Pengembangan Sumber Benih | Menambah pegawai persemaian jika tersedia anggaran |  |
|  |  |  |  |  |  | * Telaah Staf untuk penugasan staf yang akan melakukan penilaian lapangan terhadap usulan pengada/ pengedar benih dari Kasi Informasi Perbenihan kepada Kepala UPTD BPTH belum dibuat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP AP Nomor SOP/BPTH/IPB/01/Dishut/2017 (SOP Penetapan Pengada/ Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar). | Membuat Telaah Staf untuk penugasan staf yang akan melakukan penilaian lapangan terhadap usulan pengada/ pengedar benih kepada Ka. UPTD BPTH | Melaksanakan semua Prosedur Penetapan Pengada/ Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar sesuai dengan SOP/BPTH/IPB/01/Dishut/2017 |  |
| 2 | Sekretariat | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program dan Anggaran | Ir. Ruswin Rustam  Ch. Agustian, S.Hut | Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 19-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 3 | Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan, Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan | Afrial Muhammada, S.Pt, M.Si | Ir. Mgo Sinatung, MP | 19-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 4 | Wakil Manajemen Mutu (WMM) | Manajemen Mutu (MM) | Sayogo Hutomo, S.Hut, M.Si  Fazlul Taufik, ST, M.Eng | Ir. Ruswin Rustam  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  Jusmalinda, S.Hut, M.Si | 19-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 5 | UPTD KPHL Bukit Barisan | Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Bambang Suyono, S.Hut  Nensi, SE.Ak | Ir.Eka Meinarsih | 20-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 6 | Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE | Seksi Pengendalian Karhutla, Seksi Pengendalian Hutan dan Pengamanan Hutan, Seksi KSDAE dan Ekosistem | Ir. Hendri Octavia, M.Si  Kusworo, SP, M.Si | Dudi Badrudin, S.Hut | 19-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 7 | Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat | Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Penyuluhan, Seksi Hutan Adat | Dudi Badrudin, S.Hut | Kusworo, SP, M.Si  Rini Hasmira, SH  Tito Trio Putra, S.Hut | 20-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 8 | Bidang Pengelolaan DAS dan RHL | Seksi Pengelolaan DAS, Seksi RHL, Seksi Pengendalian Perubahan Iklim | Novi Hendri, S.Hut, M.Si | Ir. Ruswin Rustam  Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si  Ir. Saidah R.Nauli  Zarmawandi, S.Hut | 26-9-2017 | Hasil rapat dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang sesuai Pedoman Mutu 05.3 belum terdokumentasi dengan baik. | Membuat hasil pelaksanaan rapat dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serta melaporkan kepada hasil tersebut kepada Kepala Dinas | Menunjuk staf atau salah satu peserta rapat sebagai notulen yang bertanggung jawab membuat hasil pelaksanaan rapat dan evaluasi dengan baik. | Belum selesai |
|  |  |  |  |  |  | Hasil rapat dan evaluasi capaian kinerja masing-masing eselon sebagai bentuk upaya mencapai sasaran mutu dan perencanaan sesuai Pedoman Mutu 06.2 belum terdokumentasi dengan baik. | Membuat hasil pelaksanaan rapat dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan . | Menunjuk staf atau salah satu peserta rapat sebagai notulen yang bertanggung jawab membuat hasil pelaksanaan rapat dan evaluasi capaian kinerja. | Belum selesai |
|  |  |  |  |  |  | Hasil rapat dan evaluasi pengembangan pegawai dan peningkatan SDM staf sebagai bentuk melaksanakan kompetensi sesuai Pedoman Mutu 07.2 belum terdokumentasi dengan baik. | Membuat hasil evaluasi pengembangan pegawai dan peningkatan SDM staf masing-masing seksi dan menyampaikan kepada Kasubag Umum dan kepegawaian | Melaksanakan tatacara evaluasi pengembangan pegawai dan oeningkatan SDM staf sesuai SOP ……. |  |
|  |  |  |  |  |  | Beberapa dokumen sistem management mutu seperti Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu sebagai bentuk upaya melaksanakan informasi terdokuemntasi sesuai Pedoman Mutu 07.5 belum dimiliki oleh masing-masing seksi. | Melakukan penyimpanan dan pengarsipan dokumen system management mutu pada masing-masing seksi dengan baik. | Menunjuk staf yang bertanggung jawab melakukan penyimpanan dan pengarsipan dokumen system management mutu secara rutin. |  |
|  |  |  |  |  |  | Dokumen hasil pengukuran dan pemantauan kepuasan pelanggan yang telah dilakukan sesuai Pedoman Mutu 09.1 belum dilakukan penyimpanan dan pengarsipan oleh masing-masing seksi. | Melakukan penyimpanan dan pengarsipan dokumen dokumen hasil pemantauan dan pengukuran pelanggan pada masing-masing seksi dengan baik | Menunjuk staf yang bertanggung jawab melakukan penyimpanan dan pengarsipan dokumen secara rutin. |  |
|  |  |  |  |  |  | Dokumen hasil analisis dan evaluasi pengukuran dan pemantauan kepuasan pelanggan yang telah dilakukan sesuai Pedoman Mutu 09.1 belum dilakukan penyimpanan dan pengarsipan oleh masing-masing seksi. | Membuat hasil analisi dan evlauasi pemantauan dan pengukuran pelanggan pada masing-masing seksi dengan baik. | Menunjuk staf yang bertanggung jawab melakukan pembuatan hasil analisis dan evaluasi pemantauan dan pengukuran pelanggan |  |
|  |  |  |  |  |  | Hasil evaluasi terhadap kejadian ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan sebagai sesuai Pedoman Mutu 10.2 belum terdokumentasi dengan baik. | Membuat hasil evaluasi kejadian ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dan mengarsipkan dengan baik. | Menunjuk staf yang bertanggung jawab membuat hasil pelaksanaan evaluasi dan melakukan penyimpanan dengan baik. |  |
|  |  |  |  |  |  | Dokumen hasil pelaksanaan penanganan ketidak sesuaian dan hasil tindakan korektif sesuai Pedoman Mutu 10.2 belum dibuat oleh masing-masing seksi. | Membuat hasil evaluasi kejadian ketidak sesuaian pelaksanaan pelaksanaan penanganan ketidak sesuaian dan hasil tindakan korektif dan mengarsipkan dengan baik. | Menunjuk staf yang bertanggung jawab membuat hasil pelaksanaan evaluasi sesuai lampiran SOP MM-02 dan SOP MM-04 dan melakukan penyimpanan dengan baik. |  |
| 9 | Top Management | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | Faridil Afrasy, S.Hut, MM | Ir. Hendri Octavia, M.Si | 19-9-2017 | Nihil | Nihil | Nihil |  |

* *Tinjauan Manajemen*

Tinjauan manajemen merupakan tindak lanjut dari hasil audit internal yang dilakukan pada tanggal 19 s.d 20 September 2017. Tinjauan manajemen dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat diaula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tinjauan manajemen dihadiri oleh 40 orang peserta terdiri dari Kepala Dinas, PLt. KaKPH, Tim Implementasi ISO 9001:2015, Auditee lingkup Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

* Laporan tinjauan manajemen merupakan laporan yang terdiri dari tindak lanjut hasil tinjauan manajemen terdahulu, perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan manual mutu, pencapaian kinerja, organisasi dan hal-hal penting lainnya.
* Adapun yang menjadi masukan (input) tinjauan manajemen antara lain adalah:

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya

Tinjauan Manajemen sebelumnya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil laporan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 : Laporan Tinjauan Manajemen

|  |  |
| --- | --- |
| Tinjuan Manajemen  23 Desember 2016 | Tindak Lanjut |
| 1. Seluruh aparatur harus memahami ISO 9001:2008 dan dapat membedakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta keterkaitan antara keduanya (ISO dengan SOP). | Telah dilakukan sosialisasi ISO pada tanggal 25 April 2017 bertempat di Aula Dinas Kehutanan |
| 1. SOP sebagai acuan dalam melaksanakan Standar Mutu Manajemen agar selalu dievaluasi, sehingga dengan perubahan peraturan akan berakibat pada perbaikan/revisi dari SOP atau menghilangkan SOP yang telah ada. | SOP telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 065/097/Sekr-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. |
| 1. Pada Audit internal agar fungsi manajemen dapat berjalan sesuai dengan prosedur, maka penerapan SOP dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan didukung dengan dokumen, perekamannya. | Dokumen ISO 9001:2008 telah di upgrade ke 9001:2015 dan telah dilaksanakan dan dilakukan audit internal versi 9001:2015 pada tanggal 19 s/d 20 September 2017. |
| 1. Perbaikan metoda pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan sesuai dengan saran Auditor eksternal | Pengukuran kepuasan pelanggan telah dilakukan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik |

1. Perubahan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu
2. Isu strategis yang ada di Renstra

* Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
* *Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim* melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi, dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan gangguan kerusakan hutan.
* Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
* *Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan*, diarahkan kepada peningkatan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan, melalui penyediaan bibit berkualitas, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pengelolaan dan operasionalisasi KPH.
* *Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi* melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK serta eksport melalui perbaikan perijinan, PHPL, SVLK, penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
* *Percepatan* perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan yang lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya melalui upaya penyuluhan dan pemberian akses pengelolaan kawasan hutan dalam bentuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
* *Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan* melalui forum koordinasi antara Institusi yang terkait di bidang kehutanan ditingkat *Kabupaten*/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1. Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) No.88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) pada 6 September 2017.

* Apabila lokasi penguasaan dan pemanfataan dan/atau hak diperoleh sebelum kawasan hutan ditunjuk, maka pola penyelesaiannya yaitu dikeluarkan dari kawasan hutan (Pasal 7). Namun, apabila waktu dimulainya PTKH setelah kawasan hutan ditunjuk, pola penyelesaiannya ada empat alternatif, yaitu: dikeluarkan dari kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, diberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial atau dipindahkan (resettlement) (Pasal 8).
* Untuk kawasan hutan konservasi, apapun kondisinya, semua jenis penguasaan dan pemanfaatan tanah diselesaikan dengan pola resettlement (Pasal 9).
* Untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi, pola penyelesaiannya ditentukan oleh jenis pemanfaatan, luas kawasan hutan lebih atau kurang 30%, serta lama penguasaan lahan lebih atau kurang dari 20 tahun.
* Jenis pemanfaatan lahan yang berupa lahan garapan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi diselesaikan dengan perhutanan sosial apabila luas kawasan hutan kurang dari 30%. Tetapi di lokasi ini, apabila jenis pemanfaatannya berupa pemukiman dan fasilitas sosial, harus dilakukan resettlement.
* Untuk provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30%, lahan garapan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan lindung dan produksi apabila penguasaanya lebih dari 20 tahun. Apabila kurang dari 20 tahun, pola solusinya menggunakan perhutanan sosial. Dengan catatan lahan-lahan garapan yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut masuk kedalam lokasi sumber tanah obyek reforma agraria (peta TORA) dari kawasan hutan (Pasal 11 dan Pasal 13).

1. Perubahan perjanjian penetapan kinerja eselon II dengan III, eselon III dengan IV Tahun (terlampir)
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah :

* Pembentukan OPD Dinas Kehutanan dengan Peratuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah
* Pembentukan UPTD KPH dengan Peratuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kehutanan,
* Pembentukan UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan masih dalam proses.

1. Pengisian struktur organisasi UPTD KPH dan UPTD BSTH

* Plt Kepala UPTD KPH telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 875/3837/Sekr-2017 tanggal tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
* Untuk pengisian struktur organisasi UPTD KPH dan BSTH akan segera dilakukan uji kempotensi (Usulan nama peserta sudah disampaikan ke BKD).

1. Penempatan staf yang belum sesuai dengan kompetensi dan kapasitas SDM yang belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan sehingga hasil kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan staf belum mengacu kepada hasil analisis beban kerja. Untuk itu perlu dilakukan :

* Evaluasi terhadap kinerja staf berdasarkan penempatan yang ada (kondisi riil).
* Redistribusi Staf atau rotasi staf sesuai dengan kompentensi dan hasil analis beban kerja
* Penyusunan Rencana Pengembangan SDM/peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis
* Penambahan formasi pegawai

1. Informasi kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu yang mencakup:
2. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak-pihak berkepentingan

Telah dilakukan pengolahan data koesioner kepuasan pelanggan pada tanggal 12 s/d 13 Agustus 2017 dengan (hasil pengolahan terlampir)

Ringkasan Hasil pengolahan :

* Nilai IKM pada pelayanan internal (naik pangkat, cuti, KGB) sebesar 79,97 maka mutu layanan masuk kriteria Baik karena terletak pada selang 62,51-81,26.
* Nilai IKM pada pelayanan PIPPIB sebesar 77,59 maka mutu layanan masuk kriteria Baik karena terletak pada selang 62,51-81,25
* Nilai IKM pada pelayanan RPBI sebesar 82.2 maka mutu layanan masuk kriteria Sangat Baik karena terletak pada selang 81,26-100
* Nilai IKM pada pelayanan distribusi bibit sebesar 87,98 maka mutu layanan masuk kriteria Sangat Baik karena terletak pada selang 81,26-100

Langkah Perbaikan :

* Perlu ada 2 orang personil yang khusus untuk menjelaskan kepada pelanggan tentang cara pengisian koesioner
* Personil ini juga bertanggung jawab menyerahkan hasil layanan kepada pelanggan eksternal dan internal.
* Perlu disediakan ruang khusus untuk melayani pelanggan eksternal yang akan berkonsultasi dan melakukan koordinasi terkait bidang kehutanan.
* Khusus untuk UPTD BPTH, koesioner langsung diserahkan oleh petugas persemaian pada saat bibit diserahkan kepada pelanggan (pemohon bibit)

1. Ketercapaian sasaran mutu

Data laporan kegiatan dan kinerja sampai dengan bulan September 2017 (Triwulan III) sebagaimana terlampir.

1. Kinerja proses dan kesesuaian jasa layanan

Jenis SPP yang ada dan rekapitulasi jumlah layanan yang telah diberikan apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum

(Rekapitulasi kesesuaian jasa layanan terlampir)

1. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif (hasil audit terlampir)
2. Hasil pemantauan dan pengukuran

Tabel 6 : Realisasi kegiatan s.d Desember 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sumber Dana** | **Target** | | **Realisasi** | | **Kinerja** | |
| **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** | **Fisik** | **Keuangan** |
| APBD | 88,21 | 88,21 | 67,64 | 53,33 | 76,68 | 60,46 |
| * B. Lansung Urusan | 88,89 | 88,89 | 43,50 | 30,91 | **48,94** | **34,77** |
| * B. Langsung Pokok | 77,29 | 77,29 | 57,45 | 41,52 | 74,33 | **53,72** |
| * Gaji | 89,56 | 89,56 | 77,47 | 62,80 | 86.5 | 70,12 |
| APBN |  |  | 83,24 | 70,96 |  |  |

Realisasi hasil pengecekan lapangan kegiatan tahun 2017 (rekapitulasi kegiatan yang sudah dimonev).

1. Hasil-hasil audit baik audit internal maupun eksternal

* Inspektorat Provinsi Sumatera Barat : Jumlah temuan 55 buah yang telah selesai 55 buah
* BPK : : Jumlah temuan nihil
* Irjen KemenLHK : Jumlah temuan 2 buah dan telah selesai tapi ada tunggakan temuan tahun 2015 tentang Satker 05 (PPH/PHKA) masih ada temuan yang dalam proses yaitu memerintahkan petugas SIMAK BMN melakukan reklasifikasi menjadi asset tetap dalam laporan keuangan tahunan Tahun 2015
* Temuan Tahun 2008 :Terdapat kegiatan penataan batas dan penetapan kawasan hutan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dishutprov. Sumbar
* Kadishutprov telah menyampaikan surat Nomor 522.1/1715/INTAG-2008 tanggal 25 Juni 2008 kepada Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Perihal Kegiatan Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditembuskan kepada Kepala Balai BPKH Wilayah I Medan.
* Status :Tuntas untuk Tingkat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Substansi temuan (Baplan) masih dalam proses
* Tindaklanjut : Dinas Kehutanan telah membuat surat kembali kepada BPKH Wilayah I Medan untuk mengalokasikan dana penataan batas dan penetapan Kawasan hutan pada tahun 2016 dengan Surat No. 522.1/2905/Sekr-2015 tanggal 2 Desember 2015 khususnya untuk HPT Malampah sepanjang 14 Km. (Surat ke BPKH sudah ditandatangani dan diserahkan ke Irjen KLHK tapi surat belum dikirim ke BPKH karena belum ada lampiran BAP pemancangan sementara HPT Malampah.

1. Kinerja penyedia eksternal

Tahun 2017 jumlah penyedia jasa ekternal adalah sebagaimana yang terdapat dalam RUP. Realisasi sebagaimana laporan RUP terlampir.

Hasil evaluasi penyedia jasa pengamanan dan jasa kebersihan, penyedia ATK, Barang Cetakan dan lainnya (jasa pihak ketiga) terlampir

1. Kecukupan sumberdaya
2. Sumber daya Manusia

* Kekurangan tenaga verifikasi dan penatausahaan keuangan
* Kekurangan tenaga ahli perpetaan dan pengukuran
* Kekurangan tenaga untuk verifikasi laporan harian
* Kekurangan tenaga Polhut
* Kekurangan tenaga kepegawaian terutama terkait pengecekan angka kredit fungsional polhut

Kekurangan SDM perlu ditindaklanjuti dengan :

* Analisa kecukupan SDM mengacu kepada hasil analisis beban kerja
* Pengusulan formasi tambahan pegawai dalam rangka mengganti pegawai yang pensiun
* Untuk tenaga Polhut sudah ditindak lanjuti dengan menyurati KemenpanRB
* Perlu perencanaan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan serta bintek seperti PPNS, polhut diklat Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
* Perlu sikronisasi anggaran dengan rencana diklat (jadwal dan peserta diklat serta biaya yang diperlukan)

1. Ketersedian sarana prasarana

* Kekurangan kendaraan roda empat dan Roda dua untuk ke lapangan
* Kekurangan sarana penunjang/pekerjaan kantor seperti laptop, PC dan printer.

Kekurangan sarana prasarana perlu ditindaklanjuti dengan :

* Distribusi barang hasil pengadaan harus disesuaikan dengan RKBMD.
* Kekurangan sarana prasarana harus diakomodir dalam RKBMD (penyusunan RKBMD harus mengakomodir hasil inventarisasi sarana prasarana yang dibutuhkan).
* Pengadaan sarana pendukung kerja diprioritaskan kepada pengadaan Personal Computer (PC). Minimal pada masing-masing bidang memiliki 1 PC yang dapat digunakan oleh semua orang pada ruangan tersebut.
* Untuk kendaraan dinas perlu diinventarisasi keberadaannya dan diatur pemakaiannya sesuai aturan yang berlaku

1. Efektifitas tindakan yang diambil dalam menghadapi risiko dan peluang

Belum ada laporan untuk penilaian resiko karena baru pada tahap penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

1. Peluang untuk perbaikan
2. Perbaikan perjanjian kinerja sesuai arahan MenpanRB.
3. Perlu ada 2 orang personil yang khusus untuk menjelaskan kepada pelanggan tentang cara pengisian koesioner kepuasan pelanggan. Personil ini juga bertanggung jawab menyerahkan hasil layanan kepada pelanggan eksternal dan internal.
4. Perlu disediakan ruang khusus untuk melayani pelanggan eksternal yang akan berkonsultasi dan melakukan koordinasi terkait bidang kehutanan.
5. Khusus untuk UPTD BPTH, koesioner langsung diserahkan oleh petugas persemaian pada saat bibit diserahkan kepada pelanggan (pemohon bibit).
6. Koesioner kepuasan pelanggan diberikan kepada semua pelanggan baik internal maupun eksternal terutama kegiatan yang memiliki standar pelayanan publik/SPP (langsung diberikan setelah pelanggan diberikan layanan) hal ini diperlukan untuk memberikan masukan terhadap pelayanan yang telah diberikan.
7. Laporan Kinerja ketercapaian sasaran mutu disampaikan paling lambat kamis tanggal 19 Oktober 2017.
8. Penambahan atau pengalihan ASN yang ada di Kabupaten/kota ke kantor provinsi sehingga kekurangan ASN untuk kegiatan penatausahaan keuangan, kepegawaian dan perpetaan dapat diminimalisir.
9. Perlu dilakukan pengecekan dan inventarisasi distribusi peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan (RKBMD).
10. Pemakaian kendaraan sesuai dengan kegiatan prioritas
11. Rencana Pelantikan Kepala UPTD KPH dan UPTD BSTH dan jajarannya diharapkan dapat segera dilakukan sehingga pada awal tahun 2018 sudah bisa langsung operasional.
12. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penyedia Jasa pengamanan dan kebersihan, penyedia ATK, penyedia barang cetak dan pihak ketiga lainnya.
13. Pemeriksa barang harus memperhatikan kesesuaian spesifikasi barang dengan rencana pengadaan.
14. Distribusi barang hasil pengadaan harus disesuaikan dengan RKBMD.
15. Kekurangan sarana prasarana harus diakomodir dalam RKBMD (penyusunan RKBMD harus mengakomodir hasil inventarisasi sarana prasarana yang dibutuhkan).
16. Pengadaan sarana pendukung kerja diprioritaskan kepada pengadaan Personal Computer (PC). Minimal pada masing-masing bidang memiliki 1 PC yang dapat digunakan oleh semua orang pada ruangan tersebut.
17. Perlu dilakukan analisa kecukupan SDM mengacu kepada hasil analisis beban kerja
18. Perlu pengusulan formasi tambahan pegawai dalam rangka mengganti pegawai yang pensiun
19. Perlu kolaborasi antara bidang PHKSDAE dengan PPMHA dalam pelaksanaan operasi perlindungan pengamanan hutan di lapangan
20. Kepala KPH didorong untuk dapat “berbisnis” pada masa lima tahun yang akan datang sehingga Wilayah kelola KPH dapat menjadi sumber penerimaan (PAD).
21. Perhutanan sosial yang telah memperoleh izin diharapkan dapat beraktifitas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (anggota kelompok).
22. Perlu disiapkan Data base tentang tenaga fungsional (polhut, PEH, Penyuluhan dan lainnya) sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM.
23. Perbaikan pedoman mutu sesuai dengan tupoksi terbaru dan perbaikan daftar istilah dalam yang digunakan dalam pedoman mutu.
24. Dana DBHDR merupakan tambahan alokasi dana untuk Dinas Kehutanan, setiap tahun diperkirakan alokasi dana ini akan masuk ke alokasi dana Dinas Kehutanan. Alokasi pendanaan ini digunakan untuk kegiatan RHL dan beberapa kegiatan penunjang seperti pengamanan dan perlindungan, Tahura dll. Untuk itu diharapkan Kepala Bidang PDASRHL dapat mengkoordinasikan dan mengkosultasikan kepada Kementerian LHK secepatnya.
25. Diharapkan pola pendanaan kegiatan pada Tahun 2018 mendatang sudah memberikan kewenangan paripurna untuk KPH dan tidak tergantung kepada bidang yang ada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hal ini dapat mempercepat operasional KPH pada waktu mendatang

* *Audit Eksternal*

Tabel 7 : Hasil temuan dan tindak lanjut audit eksternal

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Ref** | **Nonconformity**  [Discussed with whom and where?] | **proof** | **Cause analysis**  [by whom?] | 1. **Corrections** 2. **Corrective Action** | **Verification (evidences and decision) by auditor** |
|  | 6.1 | **Discussed with:**  Ita Rahmawati  **Department:**  MR & ISO Team  **Nonconformity:**  Belum ditemukan identifikasi risiko dan mitigasinya terhadap pelaksanaan kegiatan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen sedangkan kegiatan ini memiliki potensi bermasalah disebabkan dinamika kegiatan para auditor maupun auditee yang sering dinas keluar kantor. | D | **Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Root causes:**  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat hanya mengetahui bahwa Penilaian Risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko (sub unsur 2.1) atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian **menganalisis risiko** (sub unsur 2.2) yang memiliki *probability* kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum mengetahui bahwa identifikasi dan mitigasi risiko juga perlu dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang akan berdampak kepada kurang efektifnya manajemen organisasi seperti identifikasi dan mitigasi pelaksanaan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. | **Correction Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Correction:**  Membuat identifikasi dan mitigasi risiko audit internal dan rapat tinjauan manajemen pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  **Corrective Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Corrective Action:**  Melakukan sosialisasi tentang implementasi SPIP (termasuk identifikasi dan mitigasi kegiatan audit internal dan rapat tinjauan manajemen pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) kepada aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga risiko dapat diminimalkan dan dikendalikan. Pada Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan sosialisasi SPIP dengan narasumber dari BPKP. |  |
|  | 9.3 | **Discussed with:**  Ita Rahmawati  **Department:**  MR & ISO Team  **Nonconformity:**  Belum ditemukan action plan dan pemantauan tindak lanjut hasil Management Review Periode Oktober 2017. | D | **Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Root causes:**  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum mengetahui bahwa *Management Review* harus dibuatkan *action* *plan* dan pemantauan tindak lanjut. Sepengetahuan kami, laporan hasil *management* *review* telah menggambarkan temuan hasil *audit* *internal* yang statusnya telah selesai ataupun yang belum selesai dan setelah laporan hasil internal audit dibacakan pada rapat *management* *review*, maka auditee akan segera menindaklanjuti temuan yang belum tuntas WMM akan menutup kasus jika auditee telah memberikan tindak lanjut hasil temuan. | **Correction Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Correction:**  Membuat *action* *plan* dan pemantauan tindak lanjut hasil *management* *review* Tahun 2017  **Corrective Responsible person:**  Ir. Ruswin Rustam  **Corrective Action:**  Akan dilakukan sosialisasi kepada auditee dan auditor bahwa *management* *review* harus dilengkapi dengan *action* *plan* dan pemantauan tindak lanjut. Mengadakan pertemuan auditor internal untuk meningkatkan kapasitas auditor internal dalam pengisian *action* *plan* dan pemantauan tindak lanjut |  |
|  | 7.1 | **Discussed with:**  Kasubag. Umum dan Kepegawaian  **Department:**  Sekretariat  **Nonconformity:**  Tidak ditemukan Kartu Kendali sebagai Bukti Hasil perawatan berbagai jenis fasilitas yang membutuhkan perawatan rutin, misalnya AC Ruangan Kantor dan Genset |  | **Responsible person:**  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  **Root causes:**  Kasubag Umum dan Kepegawaian belum mengetahui bahwa setiap barang yang dipelihara diperlukan kartu kendali pemeliharaan yang terpasang pada barang tersebut. | **Correction Responsible person:**  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  **Correction:**  Akan dibuat dan dipasang Kartu Kendali sebagai bukti hasil perawatan berbagai jenis fasilitas yang membutuhkan perawatan rutin, misalnya AC ruangan kantor dan Genset.  **Corrective Responsible person:**  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  **Corrective Action:**  Melakukan penyempurnaan SOP pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna peralatan agar mengetahui dan melaksanakan ketentuan sesuai SOP tersebut |  |
|  | 7.5 | **Discussed with:**  Kasubag. Umum dan Kepegawaian  **Department:**  Sekretariat  **Nonconformity:**  Penanganan Folder Dokumen Pegawai rentan tidak mampu telusur akibat belum ditentukan ketentuan isi folder, penyimpanan folder yang acak, penamaan folder yang tidak seragam dan akses bebas kepada siapapun terhadap semua dokumen pegawai yang tersedia. | D | **Responsible person:**  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  **Root causes:**  Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk pembelian sarana penyimpanan dokumen. | **Correction Responsible person:**  Yozarwardi UP., S.Hut, M.Si  **Correction:**  Akan menentukan isi folder kepegawaian, menyimpan folder secara urut, melakukan penamaan folder yang seragam dan akses dokumen terbatas.  **Corrective Responsible person:**  Yozrwardi UP., S.Hut, M.Si  **Corrective Action:**  Akan ditunjuk petugas khusus yang menangani dan bertanggungjawab terhadap dokumen kepegawaian. |  |

Selain kegiatan pembangunan di atas kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sub Bagian Program Anggaran pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian kinerja empat Sasaran Strategis yang menjadi tanggungjawab Sub Bagian Program Anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Rutin yang telah dilaksanakan Sub Bagian Program Anggaran secara umum sesuai dengan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Sub Bagian Program antara lain :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program anggaran serta pelaporan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program anggaran di lingkungan Dinas;
3. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
4. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program anggaran;
5. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program anggaran di lingkungan Dinas; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tabel 8 : Realisasi Kegiatan Implementasi Iso Pelayanan dan SPIP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) |
|  | 239,499,900 | 154,421,500 | 46,723,250 | 64.48 |
| Belanja alat tulis kantor | 1,814,000 | 1,768,000 |  |  |
| Belanja Bahan Bakar | 5,500,000 | 1,266,700 | 4,233,300 | 23.03 |
| Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) |  |  |  |  |
| Belanja peralatan/perlengkapan | 300,000 | 300,000 | - | 100.00 |
| pakai habis |  |  |  |  |
| Belanja jasa akomodasi | 2,800,000 | 2,520,000 | 280,000 | 90.00 |
| Belanja Transportasi | 2,952,000 | 1,950,000 | 1,002,000 | 66.06 |
| Belanja Penggandaan | 6,448,000 | 4,873,000 | 1,575,000 | 75.57 |
| Belanja makanan dan minuman kegiatan | 36,000,000 | 28,078,000 | 7,922,000 | 77.99 |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 107,593,900 | 47,055,000 | 60,538,900 | 43.73 |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | 16,592,000 | 13,310,800 | 3,281,200 | 80.22 |
| Belanja jasa lembaga sertifikasi | 35,000,000 | 30,800,000 | 4,200,000 | 88.00 |
| Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber | 19,200,000 | 19,000,000 | 200,000 | 98.96 |
| Belanja Jasa Moderator | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.00 |
| Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 150,000 | - | 150,000 | 0.00 |
| Belanja Pembaca Doa/Al-Quran | 150,000 | - | 150,000 | 0.00 |
| Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 87.50 |

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:

* Penghematan bahan bakar
* Penghematan sisa tiket akomodasi nara sumber
* penghematan biaya penggandaan
* Penghematan biaya makan minum kegiatan dikarenakan sewaktu melakukan kegiatan jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dari jumlah peserta yang diundang.
* Penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan dan pengehamatan uang harian karena direncanakan eselon III/IV namun dilaksanakan oleh staf.
* penghematan sisa biaya sertifikasi lembaga

1. **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam :**
2. **Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terbangunnya bangunan konservasi tanah (2 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Rp. Keuangan : 93.054.050,- (93,05 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/4604/PDASRHL-2017 tanggal 09 November 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah Tahun 2017.  Hasil pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah Tahun 2017 berupa hasil monitoring/evaluasi hasil kegiatan pembangunan konservasi tanah dan air tahun 2012 s/d 2017 pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh).  Tabel 9 : Hasil Monitoring/Evaluasi Pembangunan Konservasi Tanah dan Air dari Tahun 2012 s/d 2017 di Kabupaten/Kota   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Kabupaten/Kota | Jenis Bangunan KTA | Volume (Unit)/ Tahun Pembuatan | | Kondisi saat monitoring | | Thn | *Vol.* | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1. | Kab.Padang Pariaman | Dam penahan | 8 | Unit | 1 rusak/jebol, 7 unit baik | | 2. | Kabupaten Agam | Dam penahan  Dam pengendali  Embung | 6  4  8 | Unit  Unit  Unit | 5 baik/1 tidak terpelihara  4 baik  6 baik, 2 rusak/jebol | | 3. | Kab.Sijunjung | Embung  Dam pengendali | 1  1 | Unit  Unit | 1 unit baik  1 Unit baik | | 4. | Kab. Solok | Embung | 3 | Unit | 3 unit baik | | 5. | Kota Solok | Dam pengendali Embung  Sumur resapan | 1  5  12 | Unit  Unit  Unit | 1 unit baik  5 unit baik  12 unit rusak | | 6. | Kota Sawahlunto | - |  | Unit | nihil | | 7. | Kab. Pasaman | Dam penahan | 23 | Unit | 5 unit baik, 17 rusak/jebol, 1 tidak terpelihara | | 8. | Kab. Tanah Datar | Dam penahan  Dam Pengendali  Embung | 8  1  10 | Unit  Unit  Unit | 8 baik, 4 tidak terpelihara  1 baik, 1 tidak terpelihara  10 unit baik, diantaranya 4 unit tidak terpelihara | | 9. | Kab. Dharmasraya | Dam penahan  Dam pengendali  Embung  Sumur resapan | 1  1  6  10 | Unit  Unit  Unit  Unit | 1 unit baik  1 unit baik  6 unit baik  2 rusak/jebol, 8 unit baik | | 10. | Kab. Solok Selatan | Dam pengendali  Embung | 14  1 | Unit  Unit | 3 rusak/jebol, 5 baik, 6 tidak terpelihara  1 unit baik | | 11. | Kab. Lima Puluh Kota | Dam penahan  Embung  Sumur resapan | 3  4  6 | Unit  Unit  Unit | 1 baik, 2 tidak terpelihara  4 unit baik  4 baik, 2 rusak | | 12. | Kota Payakumbuh | Dam penahan | - | - | - | | | |
|  |  | | |

1. **Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 370.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi DAK oleh Kab/Kota (10 Kabupaten/Kota) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 95,00 %  Rp. Keuangan : 348.338.150,- (94,15%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/238/PDASRHL-2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2017.  Hasil pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan: | | |

1. Hasil evaluasi keberhasilan tanaman tahun 2012 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Tabel 10 : Hasil evaluasi keberhasilan tanaman tahun 2012 di Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Lokasi | Luas (Ha) | Hasil Evaluasi | | |
| Jenis Tanaman | % Tumbuh | Berhasil (Ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Kabupaten Sijunjung** |  |  |  |  |
| a. | HL Bk. Lantiak Purian | 100 | Karet dan Mahoni | 81,65 | 100 |
| b. | HL Mudiak Kako I | 100 | Karet dan Mahoni | 83,00 | 100 |
| c. | HL Taruko, Jr. Taruko | 100 | Karet | 98,20 | 100 |
| d. | HR. Jr. Taratak Betung | 25 | Karet | 91.15 | 25 |
| e. | HR. Jr. Sipuah | 25 | Karet | 63.46 | 25 |
| f. | HR. Jr. Batu Ajuang | 50 | Karet, Mahoni | 65.77 | 50 |
| g. | HR. Jr. Koto Mudik | 5 | Jabon | 95.83 | 5 |
| JUMLAH 1 | | 405 |  |  | 405 |
| **2** | **Kabupaten Solok** |  |  |  |  |
| a. | HL. Nagari Salimpek | 150 | Tidak ditemukan | 0 | 0 |
| b. | HR Nagari Sirukam | 25 | Tidak ditemukan | 0 | 0 |
| c. | HR.Nagari Talang | 25 | Karet, Mahoni, Surian | 77.88 | 25 |
| JUMLAH 2 | | 200 |  |  | 25 |
| **3** | **Kab. Lima Puluh Kota** |  |  |  |  |
| a. | HR.Paninjauan/Koto Tangah | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 65.96 | 25 |
| b. | HR.Guntuang/Banja Loweh | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 73.65 | 25 |
| c. | HR.Solok Dalam/Bio Bio | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 78.26 | 25 |
| d. | HR. Jr. Bio-Bio/Bio Bio | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 71.34 | 25 |
| e. | HR.Jorong Kaludan/Sei Talang | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 81.92 | 25 |
| f. | HR.Tareh Sago Halaban | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 58.07 | 25 |
| g. | HR.Lambuak Halaban | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 64.61 | 25 |
| h. | HR.Jaringau/Suliki | 25 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 65.57 | 25 |
| JUMLAH 3 | | 200 |  |  | 200 |
| **4** | **Kab. Tanah Datar** |  |  |  |  |
| a. | Reboisasi HL.Pamusihan | 250 | Karet, Mahoni, Durian, Petai, Meranti | 48.17 | 250 |
| b. | Hutan Rakyat Koto Alam Nagari Tabek Patah | 50 | Mahoni, Alpukat, Surian, Petai, Bayur dan Durian | 82.66 | 50 |
| c. | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab | 50 | Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai | 84.06 | 50 |
| d | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012, di Jorong Gurun, Nagari Gurun Kec. Sungai Tarab | 50 | Mahoni, Surian, dan Cengkeh | 74.22 | 50 |
| e | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012, di Jorong Datar, Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung | 50 | Mahoni, Surian dan Petai, | 77.97 | 50 |
| f | Reboisasi HL Bukik Ampalung, Jorong Sikabu, Nagari Singgalang Kec. Tj. Baru | 200 | Bayur, Durian, Petai, Gaharu, Manggis, Alpokat, Surian, Mahoni | 46.2 | 0 |
| g. | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung Kec.Salimpaung | 50 | Mahoni, Surian dan Petai | 72.03 | 50 |
| h | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Payo Rapuih, Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuah | 50 | Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai | 64.83 | 50 |
| i | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara | 50 | Mahoni, Alpukat, Surian dan Petai | 72.03 | 50 |
| j | Tanaman KBR Penanaman Tahun 2012 di Jorong Piliang, Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum | 50 | Mahoni, Cengkeh, Petai dan Karet, | 93.91 | 50 |
| JUMLAH 4 | | 850 |  |  | 650 |
| **5** | **Kab. Pesisir Selatan** |  |  |  |  |
| a. | Hutan Rakyat di Kampung Kubang Nagari Kubang Koto Barapak, Kec. Bayang | 100 | Karet dan Surian, Pinang | 40.35 | 100 |
| b. | Hutan Rakyat di Nagari Sungai Lumpo | 100 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 4.35 | 100 |
| c | Hutan Rakyat di Nagari Punggasan Timur | 100 | Karet, Mahoni, Surian, Petai | 90.2 | 100 |
| JUMLAH 5 | | 300 |  |  | 300 |
| JUMLAH 1 s/d 5 | | 1.955 |  |  | 1.580 |

Evaluasi keberhasilan tanaman tahun 2012 dilaksanakan pada 31 lokasi dengan total luas 1.955 Ha, dengan hasil evaluasi kategori berhasil seluas 1.580 Ha dan tidak berhasil seluas 175 Ha.

Dengan demikian penurunan luas lahan kritis tahun 2017 tercapai 0.25 % atau seluas 1.580 Ha dari luas lahan kritis tahun 2013 seluas 630.695 Ha.

1. Hasil monitoring kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan tahun 2017 oleh KPH/BUMD/Pihak Lainnya di Kabupaten/Kota.

Tabel 11 : Hasil monitoring kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan tahun 2017 oleh KPH/BUMD/Pihak Lainnya di Kabupaten/Kota.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Lokasi/KPH | Jenis Kegiatan RHL | Volume | Sumber Dana |
| 1. | KPHL Sijunjung | Penanaman Reboisasi  Pemeliharaan Tahun II  Pemeliharaan Tahun II | 70 Ha  60 Ha  40 Ha | DIPA BPDASHL Indragiri Rokan  S.d.a |
| 2. | KPHL Solok | Penanaman Reboisasi  P1 Reboisasi  P1 Reboisasi  P2 Reboisasi | 100 Ha (2 Lokasi)  200 Ha  200 ha  300 Ha | DIPA BPDASHL Indragiri Rokan  S.d.a  S.d.a |
| 3. | KPHL Lima Puluh Kota | Pemeliharaan tahun II tanaman reboisasi Pembuatan KBR | 200 Ha  4 Unit | DIPA BPDASHL Indragiri Rokan  S.d.a |
| 4. | KPHL Bukit Barisan  Resort Tanah Datar | Penanaman Reboisasi  P2 Reboisasi  Pembuatan KBR | 100 Ha  100 Ha  2 Unit | DIPA BPDASHL Indragiri Rokan  S.d.a |
| 5. | KPHP Pesisir Selatan | Penanaman bibit KBR | 3 Lokasi @ 25 Ha | DIPA BPDASHL Agam Kuantan |
| 6. | KPHL Batanghari | Penanaman HR  Pembuatan KBR | 92 Ha (2 Lokasi)  4 Unit | DIPA BPDASHL Indragiri Rokan |
| 7. | KPHL Pasaman Raya | Penanaman bambu di kiri-kanan sungai  Penanaman reboisasi  P2 Reboisasi  P2 reboisasi  Pembuatan KBR  Penanaman KBR | 7 Km (3 sungai)  50 Ha  100 ha  80 Ha  2 Unit  4 Lokasi (200 Ha) | Keltan.Tani Anugrah,Keltan Aur Kuning dan Keltan Talang  DIPA BPDASHL Agam Kuantan  S.d.a  S.d.a  S.d.a |
| 8. | KPHL Agam raya | Penanaman Daerah TA Maninjau  Pemeliharaan Tahun I Tanaman KBR  Pembuatan KBR  Penanaman HR | 50 Ha  50 Ha  3 Unit  30 Ha | DIPA BPDASHL Agam Kuantan  S.d.a  S.d.a  S.d.a |
| 9. | KPHP Dharmasraya | - | - |  |
| 10. | KPHP Kep. Mentawai | - | - | Nihil |

1. Hasil koordinasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota, berupa hasil evaluasi faktual proposal hibah hutan rakyat, dan pengumpulan data rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

● Hasil Evaluasi Faktual Proposal Hibah Hutan Rakyat di Tiga Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 12 : Hasil Evaluasi Faktual Proposal Hibah Hutan Rakyat di Tiga Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kabupaten/Kota | Hasil Evaluasi Faktual Proposal Hibah Hutan Rakyat | Hasil Koordinasi Data RHL Tahun 2012 - 2016 | Keterangan |
| 1. | Kabupaten Agam | 2 Proposal Hutan Rakyat | Lampiran 5.3.d |  |
| 2. | Kab. Lima Puluh Kota | 3 proposal Hutan Rakyat | Lampiran 5.3.e |  |
| 3. | Kabupaten Sijunjung | 1 proposal Hutan Rakyat | Lampiran 5.6.3.j |  |

d. Hasil Pelaksanaan Hari Menanan Pohon Indonesia (HMPI) Tahun 2017

Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 berlokasi di Lokasi IUPHKm Rambaian Manduang di Jorong Sonsang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dan telah ditanam bibit tanaman produktif sebanyak 3.200 batang yang terdiri dari jenis Durian 200 batang, Manggis 1.000 batang, Petai 1.000 batang dan Jengkol 1.000 batang.

1. **Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersusunnya rencana pengelolaan DAS (1 Dokumen) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Rp. Keuangan : 167.932.268,- (83,97%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan Program pada seksi Pengelolaan DAS hanya satu satu kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.  Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/219 a/PDASRHL-2017, tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) Tahun 2017.  Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,-, Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp **167.932.268** atau sebesar 83,97%. Dana yang bersisa sebesar Rp 32.067.732,- atau sebesar 16,03% dengan rincian sebagai berikut :   * Belanja Pakai habis, berupa BBM Rp 4.959.700,- * Belanja jasa kantor Rp 4.500,000,- * Belanja cetak dan penggandaan Rp 1.500,- * Belanja makan dan minum Rp. 1.248.000,- * Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 1.855.000 * Belanja perjalanan dinas Rp. 18.603.532,- (Perjalanana dinas dalam daerah Rp. 9.570.000 dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 9.033.532) * Belanja Honorarium PNS Rp. 900.000,-   Rendahnya realisasi anggaran disebabkan efisiensi penginapan, penyesuaian perjalalanan dinas, penyesuaian pembayaran belanja trasnsportasi dengan peserta undangan, penyesuaian belanja makan minum rapat, pakaian lapangan dengan perjalanan dinas, dan pembayaran jasa narasumber dengan golongan. | | |

1. **Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 906.036.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersusunnya rencana pengelolaan DAS (1 Dokumen) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Rp. Keuangan : 613.681.300,- (67,73 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat.

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunanya, serta jasa yang berasal dari hutan

Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu bertujuan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang potensi hasil hutan bukan kayu yang dilakukan secara lengkap baik jenis, jumlah, kondisi lingkugan dan lain-lain.

Inventarisasi Jasa Lingkungan bertujuan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang potensi jasa lingkungan di suatu kawasan tertentu.

Secara garis besar Inventarisasi HHBK dan Jasling di KPHL Bukit Barisan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

Tehnik yang dilakukan dalam koordinasi ini adalah sebagai berikut :

a. Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

b. Pemberian informasi teknis baik secara pelatihan maupun referensi teknis yang terdapat pada Dinas/Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota.

c. Dalam pelaksanaan koordinasi ini, tim akan mempersiapkan tenaga kerja atau buruh rintis yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hasil Hutan Bukan kayu dan Jasa Lingkungan

2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

1. Metode

* Identifikasi HHBK ( Pengenalan nama lokal, ciri-ciri tumbuhan atau pengambilan sample untuk jenis tanaman yang tidak diketahui)
* Identifikasi tingkat pertumbuhan (perkiraan umur, tinggi tumbuhan dan diameter)
  1. Pengumpulan Data
* Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengukuran sepanjang jalur coba (unit contoh) di lapangan dengan insitas sampling sebesar 0,5 %
* Teknik penarikan dilakukan dengan Systematic Sampling, dimana unit contoh pertama ditentukan secara acak, kemudian unit contoh selanjutnya diletakkan secara sistematik (Systematic Sampling with Random Start) petak dibuat berupa jalur selebar 20 meter.
* Untuk meletakkan unit contoh dibuat jalur induk (Base Line) yaitu berupa garis terpanjang sejajar/sungai/jalan. Selanjutnya jalur coba diletkkan tegak lurus jalur induk secara sistematik.
* Penentuan titik awal jalur coba di lapangan menggunakan titik ikatan. Titik ikatan ditentukan berdasarkan titik yang ada di peta kerja dan dilapangan mudah ditemukan dan mudah dikontrol dengan koordinat UTM dengan menggunakan GPS.
* Bentuk dan ukuran jalur coba (unit contoh)
  + - 1. Petak contoh ukuran (20 x 20 meter) dibuat secara kontinyu pada jalur coba untuk mengukur tingkat pertumbuhan jenis hhbk dewasa.
      2. Petak contoh ukuran (10 x 10 meter) dibuat pada tiap jarak 100 meter secara selang-seling di kiri dan kanan sumbu jalur, untuk mengetahui pertumbuhan HHBK muda.

1. Komponen data yang diukur dan dicatat di lapangan diantaranya:

* Melakukan pengukuran lereng pada tiap jarak 50 meter.
* Pengukuran dan pencatatan terhadap beberapa jenis HHBK (nama setempat, jumlah, tinggi dan diameter).
* Pencatatan jenis-jenis pohon lainnya atau pohon dominan yang terdapat sepanjang jalur coba.
* Pengambilan sampel HHBK (Rotan, Tanaman Obat, Getah, dll)
* Peralatan lapangan
  + - 1. Kompas, digunakan untuk menentukan arah jalur
      2. Helling meter, digunakan untuk mengukur kelerengan.
      3. Tali ukur, digunakan untuk mengukur jarak
      4. Phiband, digunakan untuk mengukur diameter
      5. GPS, digunakan untuk menunjukkan posisi.
      6. Tally Sheet, sebagai acuan pengumpulan data.
      7. Camping unit untuk kelengkapan tim.

1. Tim Pelaksana terdiri dari:

* 1 orang tenaga teknis sebagai ketua regu
* 2 orang tenaga teknsi sebagai anggota regu
* 4 orang buruh rintis
* 2 orang buruh mengukur jarak lapangan
* 2 orang buruh mengukur diameter
* 1 orang pengenal jenis
* 2 orang pengurus komsumsi

1. Analisis Data

* Identifikasi potensi hhbk
* Rekap data

1. Pelaporan

Inventarisasi Jasa Lingkungan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan lokasi atau potensi Air, tutupan Lahan, Carbon, Keanekaragaman hayati dll

Tabel 13 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor Tim** | | **Pelaksana** | **Nomor Jalur** | **Panjang Track Jalur (meter)** | | **Luasan (m²)** | **Nomor Petak** | **Jumlah Pinus (pohon)** | | | **Anggaran** |
| **1** | | Ir. Eka Meinarsih | 10a - 10b | 1.000 | | 20.000 | HP 163  HP 165  HP 166  HP 167  HP 169 | 2.242 | | | Rp. 6.320.000 |
| Kamisal | 11a - 11b | 1.000 | | 20.000 |
| Prima Praditya Wahyudi  Fatma Yulis  Maju Karo Karo  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 12a - 12b | 1.000 | | 20.000 |
| Angga Febriano | 18a - 18b | 500 | | 10.000 |
| Zulyasri | 19a -19b | 500 | | 10.000 |
| Irfan Oktavianus  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 20a - 20b | 500 | | 10.000 |
| **2** | | Wandra Zulia Farma, S.Hut | 21a - 21b | 500 | | 10.000 | HL.172  HL.173 | 251 | | | Rp. 5.760.000 |
| Rucitra, S.Hut | 22a - 22b | 500 | | 10.000 |
| Fernando Simbolon  Pono Raharjo | 23a - 23b | 500 | | 10.000 |
| Anton  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 24a - 24b | 500 | | 10.000 |
| **3** | | Hendra Bakti Putra, ST | 25a - 25b | 500 | | 10.000 | HP.192HP.397  HP.205  HP.214 | 2.050 | | | Rp. 7.760.000 |
| Agitha Putri Br. Bangun | 26a - 26b | 500 | | 10.000 |
|  | 27a - 27b | 500 | | 10.000 |
| Gema Yudistira, SE | 28a - 28b | 500 | | 10.000 |
| Novita Anika, S.Hut  Herlinawati  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 | 29a - 29b | 500 | | 10.000 |
| **4** | | Boy Martin, SH | 30a - 30b | 300 | | 6.000 | HL.69 | 0 | | | Rp. 6.320.000 |
| Angga Febriano | 31a - 31b | 300 | | 6.000 |
| Nur Apni Riskiani | 32a - 32b | 300 | | 6.000 |
| Rudi Hartono,S.Sos |  |  | |  |
| Mursyid, M.SP  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 |  |  | |  |
| **5** | Hendra Bakti Putra, S.T | | 1a - 1b | 1.000 | 20.000 | | HP.128 HP.130HP.132 | | 2.179 | Rp. 6.320.000 | |
|  | | 2a – 2b | 1.000 | 20.000 | |
| Nur Apni Reskiani  Agitha Putri Bangun  Darliswarwati  Elisda Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | | 3a - 3b | 1.000 | 20.000 | |
|  | TOTAL | |  |  |  | |  | |  | **Rp. 32.480.000** | |

1. **Program Pengendalian Kebakaran Hutan**
2. **Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Penurunan luas kebakaran hutan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.8.370.646.000,- (Pagu DPPA), |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemantauan titik panas, patrol pengendalian kebakaran hutan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan bimbingan teknis kelompok MPA (8 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot)  dari rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : *Rp. 1.055.266.250,- (12,61 %)* |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat beberapa sub kegiatan, adalah : | | |

1. Koordinasi dan monitoring dengan para pihak/instansi terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan
2. Sosialisasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.
3. Bimbingan teknis kepasa Masyarakat Peduli Api (MPA)
4. Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
5. Pengecekan titik panas (Hotspot)
6. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan
7. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
8. Pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Capaian sasaran strategis diperoleh dari capaian Indikator Kinerja (IK) yang kami suguhkan pada laporan ini adalah hasil pelaksanaan pada semua sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Kegatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Seksi Pengendalain Kebakaran Hutan dan Lahan disajikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan monitoring dengan para pihak/instansi terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan :

Sasaran pelaksanaan kegiatan koordinasi adalah instansi di kab/kota yang menangani masalah kebencanaan, di antaranya kebakaran hutan dan lahan, dalam koordinasi tersebut Dinas Kehutanan menjalin hubungan kerja dengan instansi tersebut apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, dalam koordinasi tersebut didapatkan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah masuk kedalam program kebencanaan, sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan instansi seperti BPBD di kab/kota akan turut serta dalam upaya pemadaman.

Untuk pelaksanaan kegiatan monitoring ini dilakukan terhadap para pemegang IUPHHK Alam dan IUPHHK Tanaman mengenai kesiapsiagaan dari para pemegang izin dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan sasaran :

1. IUPHHK Alam PT. Minas Pagai Lumber
2. IUPHHK Alam PT. Salaki Suma Sejahtera.
3. IUPHHK Alam PT Sumpur Lisun, dan
4. IUPHHK Tanaman PT. Bukit Raya Mudisa.

Dalam monitoring tersebut dimintakan data mengenai sarana dan prasarana serta alokasi dana unutk menunjang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari pemegang izin.

Hasil dari monitoring adalah tidak semua pemegang izin merespon dengan baik penyediaan sarana dan prasarana serta alokasi dana untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya PT. Sumpur Lisun, PT Minas Pagai Lumber dan PT SSS, belum sepenuhnya meneyediakan sarpras maupun alokasi dana untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hanya IUPHHK Tanaman PT. Bukit Raya Mudisa yang sudah menyediakan sarpras sesuai dengan standar.

1. Sosialisasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sosialisasi dilaksanakan terhadap masyarakat di seputar kawasan hutan dan lahan yang rawan dengan kebakaran dengan harapan bahwa dengan dilaksanakan sosialisasi tentang dampak karhutla timbul penyadartahuan dari masyarakat akan dampak dan bahaya kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat akan hati-hati dalam pembukaan lahan untuk perkebunan yang sudah menjadi kebiaasaannya.

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh KPH dngan sasaran masyarakat seputar hutan yang rawan terhadap karhutla seperti :

1. Nagari Padang Mentinggi Kabupaten Pasaman
2. Nagari Lubuk Layang Kabupaten Pasaman
3. Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat
4. Taikako, Sikakap
5. Sikabaluan Sirebut
6. Kecamatan Lembah Gumanti
7. Nagari Koto Sani dan Nagari Aripan
8. Nagari Batu Hampa, Kab 50 Kota
9. Nagari Koto Tangah, Kab Agam.
10. Kota Sawahlunto
11. Kabupaten Tanah Datar
12. Nagari Tiku V Jorong, Kab Agam
13. Bimbingan teknis kepasa Masyarakat Peduli Api (MPA)

Bimtek dilaksanakan kepada masyarkat yang sudah terbentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah di SK-kan oleh Wali Nagari, MPA dibentuk sifatnya sukarela dengan tujuan untuk membantu aparat kehutanan dalam pencegahan dan pengendalian serta pemadaman di nagari yang bersangkutan, Bimtek dimaksudkan adalah melakukan pembekalan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada MPA agar apabila terjadi kebakaran karhutla, MPA dibekali dengan tatacara pelaporan bila terjadi kebakaran karhutla, pengenalan alat-alat karhutla serta penanganan dini karhutla dll.

1. Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Patroli dilakukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun KPH, patroli dilaksanakan pada daerah-daerah rawan terjadinya karhutla, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, disamping itu dalam pelaksanaan patrol dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang dijumpai sepajang rute patroli untuk penyadartahuan tentang bahaya karhutla.

Sesuai dengan target dan sasaran kinerja antara Seksi Dalkarhutla dengan Kepala Bidang PH dan KSDAE bahwa indikator kinerja patrol dilaksanakan sebanyak 53 kali di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, sudah dapat dilaksanakan 100 %

1. Pengecekan titik panas (Hotspot) 9 Kali

Upaya penanggulangan kebakaran hutan perlu diawali dengan mengetahui lokasi terjadinya kebakaran dan menganalisis penyebab kebakaran hutan dan lahan, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dikatakan berjalan baik yang ditunjang dengan cuaca yang mendukung dengan curah hujan yang relatif tinggi dan merata di sepanjang tahun. Tahun ini, di Sumatera Barat berdasarkan pantauan Satelit NOOA19 jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan penurunan sebesar 35,50%. Sedangkan sebaran areal kebakaran hutan dan lahan juga menunjukkan penurunan sebesar 50,60% .

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan di lapangan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dengan memobilisasi dukungan sarana dan prasarana baik di tingkat provinsi maupun daerah (KPH), serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, BNPB, TNI dan POLRI. Selain melakukan tindakan secara nyata di lapangan, KLHK juga melakukan upaya analisis data titik panas (hotspot) dan luasan kebakaran hutan dan melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui analisis data titik panas (hotspot) yang diperoleh dari citra satelit NOOA19. Adapun data sebaran dan luasan areal kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari proses deliniasi on screen berdasarkan data pemadaman di lapangan terbaru yang dipandu dengan data titik panas (hotspot).

Dari hasil pelaksanaan pemantauan titik panas (Cross check Hot Spot) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan pemantauan, baik melalui Portal SiPongi, bahwa pada tahun 2017 terdapat 50 titik api (menurun dari tahun 2016 sebanyak 90 titik api) terjadi penurunan sebesar 35,50 % yang tersebar di beberapa kab/kota, dari sebaran titik api hasil pemantauan portal SiPongi, beberapa titik dilakukan penegecekan ke lapangan dengan hasil bahwa tidak semua titik api merupakkam kebakran hutan dan lahan, ada beerapa titik bukan merupakan kebakaran seperti halnya yang teradi di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota, ternyata titik panas yang terpantau melalui portal SiPongi merupakan pantulan panas dari atap seng bangunan kandang ayam (beberapa kandang) yang cukup luas, namun demikian juga beberapa titik panas yang terpantau dari portal SIPongi memang betul-betul terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di Kecamatan Ujung Gading Pasaman Barat, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan, dimana kebakaran tersebut sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan baru oleh masyarakat.

Dari beberapa pemantauan titik panas tersebut, diharapkan dengan adanya analisis titik panas (hotspot) dan areal kebakaran hutan dan lahan ini, bisa menjadi gambaran dan alat bantu untuk pengambilan kebijakan upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan cepat. Teknologi penginderaan jauh dan SIG dapat digunakan untuk memantau kebakaran hutan dan lahan. Proses analisis data mengunakan data satelit adalah metode yang cepat, tepat dan akurat, sehingga prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Kegiatan pemantauan kebakaran hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan informasi teliti untuk cakupan wilayah luas.

Tabel 14 : Perkembangan Titik Panas Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat

*Sumber Portal SiPongi Satelite NOOA19*

1. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

Selama tahun 2017 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat terdapat 9 (Sembilan) kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luasan sebesar 147,5 Ha, hal tersebut terjadi penurunan dari tahun 2016 baik lokasi kejadian dan luasan yang terbakar sebesar 50,60 %. Data kebakaran seperti table dibawah ini :

Tabel 15 : Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Luas 147,5 Ha



1. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan pasca kebakaran hanya bias dilakukan sebanyak 1 kali untuk 2 (dua) lokasi yaitu di lokasi Tahura Bung Katta, hal ini dilakukan karena kejadian kebakaran di tempat lain berada pada fungsi Areal Penggunaan Lain (APL), sementara lokasi di Tahura berada pada fungsi kawasn Hutan Lindung (HL).

Pengumpulan data dan bahan pasca kejadian kebakaran di Tahura dapat disimpulkan bahwa suber api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh sopir.

1. Pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2 angkatan 96 orang MPA.

Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) bertujuan memberikan pelatihan kepada kepada masyarkat yang sudah terbentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah di SK-kan oleh Wali Nagari, MPA dibentuk sifatnya sukarela dengan tujuan untuk membantu aparat kehutanan dalam pencegahan dan pengendalian serta pemadaman di nagari yang bersangkutan, Pelatihan bertujuan untuk melakukan pembekalan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada MPA agar apabila terjadi kebakaran karhutla, MPA dibekali dengan tatacara pelaporan bila terjadi kebakaran karhutla, pengenalan alat-alat karhutla serta penanganan dini karhutla dan simulasi pemadaman, dll.

Pelatihan dilaksanakan di Kota Padang yaitu di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Komplek UNP Padang, sedangkan praktek dilaksakan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Paria an, dengan peserta sebanyak 96 Orang dan dibagi menjadi 2 angkatan.

Materi yang disajikan adalah :

1. Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Karhutla.
2. Fungsi dan manfaat hutan
3. Pengenalan alat-alat Karhutla
4. Pengetahuan dasar pengendalian Karhutla
5. Teknologi pencegahan Karhutla
6. Sistem Komando Karhutla
7. Pemantauan dini hot spot/titik api, dan
8. Praktek lapangan/simulasi pemdaman api

Tenaga pengajar/Instruktur yang akan memberikan materi pada pelatihan ini terdiri dari Para Pejabat Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan semua sub kegitan yang terdapat dalam program ini capaian kinerjanya sangat baik, karena semua sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasai fisik mencapai 98 % dan keuangan mencapai 97,30 % (Rp. 1.387.512.100) (Angka sebelum perubahan).

**3. Permasalahan dan Solusi**

* 1. **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2017 yang berupa Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Dengan belum definitnya UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 9 Unit menyebabkan penganggaran yang semula diperuntukkan bagi operasional KPH tersebut tidak dapat direalisasikan secara maksimal sehingga menyebabkan realisasi anggaran kecil.
2. Adanya penambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dari Pusat pada akhir anggaran 2017 dan belum ada pedoman umum/petunjuk teknis penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan belum ada aturan yang memperbolehkan Provinsi untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam kawasan hutan. Hal inilah menyebabkan realisasi rendah.
3. Adanya penghematan/efisiensi anggaran yang berasal dari :

* Penghematan belanja pakai habis.
* Penghematan belanja cetak dan penggandaan.
* Penghematan belanja makanan dan minuman.
* Penghematan belanja honorarium.
* Penghematan bahan/material.
* Penghematan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan dan BBM.
* penghematan perjalanan dinas luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan tiket pesawat.

1. **Solusi**

Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

* + - 1. Mempercepat pembentukan KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 Unit.
      2. Dengan adanya penambahan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyurati ke Pusat bahwa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang telah turun pada akhir anggaran 2017 Dinas Kehutanan tidak sanggup untuk melaksanakannya mengingat petunjuk teknis belum jelas dan waktu terbatas. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan agar dana tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2018.
      3. Sehubungan dengan adanya sisa anggaran yang merupakan penghematan/ efisiensi anggaran ke depan perencanaan akan ditingkatkan.

1. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan Pilihan Kehutanan Tahun 2017 terdiri dari 10 program dan 49 kegiatan, Alokasi anggaran sebesar Rp.16.741.371.025,-

1. **Program dan kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Urusan Pilihan Kehutanan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

* 1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, yang terdiri dari kegiatan:

1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.
2. Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.
3. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.
4. Pembuatan Petak Ukur Permanen.
   1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, yang terdiri dari kegiatan:
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan.
7. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan.
8. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan.
9. Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat.
10. Pengembangan Hutan Mangrove.
    1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang terdiri dari kegiatan:
11. Optimalisasi Penerimaan Nega Bukan Pajak (PNBP).
12. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
13. Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
14. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
15. Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH).
16. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.
17. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.
    1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Lahan yang terdiri dari kegiatan:
18. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.
19. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
20. Konservasi Sumber Daya Genetik.
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan :
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
22. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik.
23. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
24. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor.
25. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
29. Penyediaan Makanan dan Minuman.
30. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
31. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.
32. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari kegiatan:
33. Pembangunan Gedung Kantor
34. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
35. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor.
36. Pengadaan Meubeleur.
37. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
38. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess.
39. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
40. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
41. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor.
42. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan.
    1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
43. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
    1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari kegiatan:
44. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
    1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terdiri dari kegiatan :
45. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD..
46. Penatausahaan keuangan SKPD.
    1. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset yang terdiri dari kegiatan :
       1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
       2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.
       3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD.
47. **Realisasi Program dan Kegiatan**
    1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, yang terdiri dari kegiatan :
48. **Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan** .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.177.539.150,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpeliharanya batas kawasan hutan (70 Km) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya. |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 167.665.400,- (94,44%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

|  |
| --- |
| Sisa anggaran sebesar Rp. 9.873.750,- merupakan sisa anggaran mati yang berasal dari belanja tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah, personal use, penginapan dan belanja penggandaan.  Output (keluaran) dari kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2017 adalah terpeliharaanya batas kawasan hutan sepanjang ± 70 Km (Kabupaten Agam ± 30 km, Kabupaten Pasaman ± 20 km dan Kabupaten Sijunjung ± 20 km).  Outcome(hasil) dari kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2017 ini adalah bahwa untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, maka tanda batas kawasan hutan yang telah ditata batas perlu dipastikan selalu dalam keadaan baik dan jelas di lapangan. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Tahun 2017 dilakukan pada hasil tata batas kawasan hutan definitif Tahun 1992/1993 dan 1996/1997 di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Sijunjung. Sejak dilakukan pemeliharaan batas kawasan hutan pada Tahun 2011, secara akumulatif panjang kawasan hutan yang telah dipelihara sampai dengan Tahun 2017 adalah sepanjang 470 km dari total panjang batas kawasan hutan yang telah ditata batas sepanjang 4.895,30 km. Hasil pemeliharaan batas kawasan tersebut memberikan sumbangan dalam upaya pencapaian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya sebesar 100%. |

1. **Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.198.722.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 163.771.900,- (82,41 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan Kegiatan Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.722.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 163.771.900 (82,41) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 34.950.100,- merupakan sisa mati.

1. **Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.165.167.825,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpantau dan termonitornya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya (13 Kabupate/1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya. |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 131.408.700,- (79,56%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.1676.825,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 131.408.700,- (79,56 %) dengan realisasi fisik Rp. 100 %.  Sisa anggaran kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp.33.759.125,- merupakan sisa anggaran mati | | |

1. **Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Terwujudnya kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.579.070.950,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya data potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai data penghitungan carbon stock (43 Petak) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukkannya (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 440.372.500,- (76,05%) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dilaksanakan di 43 lokasi pada areal Perhutanan Sosial (Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan) atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Poin-poin penting pelaksanaan kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen adalah sebagai berikut :

Petunjuk pelaksanaan (Juklak) Pembuatan PUP yang disadur dari :

* 1. SNI 7724-2011 tentang Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon-Pengukuran Lapangan Untuk Penafsiran Cadangan Karbon Hutan (ground based forest carbon accounting).
  2. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. P.01/VIII-P3KR/2012 tentang Pedoman Penggunaan Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa dan Stok Karbon di Indonesia.
  3. Literatur-literatur lainnya.

Tabel 16 : Lokasi PHBM dan jumlah Plot PUP tahun 2017 di 16 PHBM di 10 Kabupaten/Kota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | *Kabupaten/Kota* | PHBM | Jumlah Plot |
| 1 | *Solok* | HN Sirukam | 4 |
| 2 | *SoloK Selatan* | HN Koto Baru | 3 |
| 3 | *Pasaman Barat* | HKM Gunung Leco | 3 |
| 4 | *Sijunjung* | HN Aie Angek | 4 |
| 5 | *Pasaman* | HKm Beringin Sakti | 2 |
|  |  | HKM Bukit Lestari | 2 |
| 6 | *Pariaman* | HKM Leter W | 2 |
|  |  | HKM Sialangan | 2 |
| 7 | *Dharmasraya* | HN Gn Selasih | 3 |
|  |  | HN Lubuk Karak | 3 |
| 8 | *Agam* | HN Baringin | 4 |
|  |  | HKM Padang Kubuak | 2 |
| 9 | *50Kota* | HN Taeh Bukik | 2 |
|  |  | HN Pandam Gadang | 2 |
|  |  | HN Taram | 2 |
| 10 | *Padang* | HKM Sikayan Balumuik | 3 |
|  | *JUMLAH* |  | 43 |

Hasil Pengolahan Data

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 17 : Cadangan Karbon Dalam Stratum (Ton/Ha) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **PHBM** | **HP** | **HS** | **PC** | **PLK** | **S** |
| HKM BERINGIN SAKTI |  | 60,52 |  |  | 5,46 |
| HKM BUKIT LESTARI |  | 36,94 |  |  | 67,14 |
| HKM GN. LECO |  | 316,57 |  |  | 1,76 |
| HKM LETER W |  | 57,63 | 145,66 |  |  |
| HKM PADANG KUBUAK |  | 94,17 |  | 164,69 |  |
| HKM SIALANGAN |  | 127,36 | 109,40 |  |  |
| HKM SIKAYAN BALUMUIK | 1.569,56 | 615,34 |  | 22,85 |  |
| HN AIE ANGEK |  | 359,75 | 85,17 |  |  |
| HN BARINGIN |  | 139,42 | 4,85 | 391,49 |  |
| HN GN SELASIH |  | 283,91 |  |  | 36,68 |
| HN KOTO BARU |  | 182,83 |  |  | 44,92 |
| HN LUBUK KARAK |  | 532,90 |  | 31,58 | 0,80 |
| HN PANDAM GADANG |  | 219,45 |  |  | 3,75 |
| HN SIRUKAM |  | 184,91 |  |  | 90,33 |
| HN TAEH BUKIK |  | 277,48 | 278,25 |  |  |
| HN TARAM |  | 120,57 |  |  | - |

Ket :

HP : Hutan Primer

HS : Hutan Sekunder

PC : Pertanian Campuran

PLK : Pertanian Lahan Kering

S : Semak

Tabel 18 : Perhitungan Karbon Dalam PHBN





Tabel 19 : Rekapitulasi Data Karbon di 43 plot PUP



Tabel 20 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen



Terdapat penghematan/ efisiensi dari belanja sub kegiatan sebagai berikut:

* Belanja peralatan pakai habis
* Belanja penggandaan
* Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan sisa tiket pesawat.
  1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, yang terdiri dari kegiatan :

1. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.116.171.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota (2 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 100.281.550,- (86,32 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kehutanan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi ke 10 wilayah UPTD KPH Dinas Kehutanan yang berada di Kabupaten/ Kota dalam bentuk perjalanan dinas. Data yang dikumpulkan adalah data dan informasi terkait perencanaan Pembangunan Kehutanan pada wilayah Kabupaten/ Kota.

1. *Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi*

(MUSRENBANGHUTPROV)

Musrenbanghut merupakan pertemuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mensinkronkan program dan kegiatan Pembangunan Kehutanan antara Pusat/Provinsi, UPTD KPH Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota, dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki wilayah kelola di Sumatera Barat selanjutnya akan dijadikan bahan dalam musyawarah.

Musrenbanghutprov dilakukan melalui metode paparan oleh Narasumber terkait dengan rencana Pembangunan Kehutanan yang akan dilaksanakan oleh Pusat/Provinsi, Kabupaten/Kota, di Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Discussion (FGD) untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Sumatera Barat antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Musrenbanghutprov Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Narasumber :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Biro Perencanaan Kementerian KLHK
3. Kepala BPDASHL Agam Kuantan

Peserta : Peserta rapat berjumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari :

- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Korwil Kabupaten Sesumatera Barat;

- UPT Kementerian Lingkup Provinsi Sumatera Barat

- UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan :Senin / 6 Maret 2017

* Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
* Tempat : Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar

Jalannya Rapat :

* Rapat dalam rangka penyelarasan program kehutanan ini, diawali pembukaan oleh Koordinator Wilayah Kabupaten Dharmasraya
* Arahan dan himbauan dari BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya
* Penyampaian paparan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (terlampir)
* Diskusi dan Tanya jawab

Beberapa hal yang diperoleh dalam acara Musrenbanghutprov adalah sebagai Tabel berikut :

Tabel 21 : Notulen Musrenbanghutprov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penyaji/Penanya** | **Hal yang Disampaikan/Disajikan** | **Keterangan** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Kepala Dinas Kehuta nan Prov. Sumbar | * Perencanan pembangunan kehutanan harus disesuai dengan implementasi UU No.23 * Perencanaan kegiatan harus mempedomani RPJMD dan Renstra * Kontrak Dishut dengan Gubernur terkait dengan penanganan Ilegal logging * Perlu adanya penyikapan secara khusus terhadap pembiayaan baik yg bersumber dari APBD/APBN * Tugas KPH salah satunya adalah dapat menarik investasi * Semua kegiatan dan program harus sudah masuk dalam perencanaan dan semua proses haris terdokumentasi secara baik * Arahan sekaligus pembukaan acara MUSRENBANGHUTPROV secara resmi |  |
| 2 | Biro Perencanaan Kementerian LHK | * Kebijakan RKP 2018 * Perkuatan implementasi Money Follow Program * Rancangan Tema RKP 2018 * Penyusunan Prioritas Nasional dalam RKP 2018 * Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 * Rancangan kontribusi pembangunan wilayah per pulau tahun 2018 * Jadwal penyusunan RKP 2018 * Isu strategis pembangunan sektor kehutanan dalam agenda pembangunan nasional * Usulan prioritas 2018 berdasarkan bidang tertentu * Internalisasi perubahan kedalam perubahan tapak * Urusan pemerintahan konkuren bidang LHK * Kesiapan KLHK dalam pelaksanaan RKP 2018 * Catatan penting hasil Rakortek Batam | Bahan paparan terlampir |
| 3 | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar | * 10 Program prioritas pembanguan daerah dalam RPJMD Prov. Sumbar 2016-2021 * Kebijakan prioritas 2018 * Evaluasi pelaksanan program/ kegiatan mulai tahun 2016 * Capaian IKU * Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuaid dengan Doku men Perjanjian Kinerja 2016 * Realisasi Anggaran Pembangunan kehutanan Dishut Tahun 2016 * Visi dan Misi Dinas Kehutanan Prov. Sumbar * Program Pembangunan Dinas Kehutanan 2018 sumber dana APBD Provinsi * Indikatif anggaran Dishut dari APBD th 2018 * Indikatif anggaran program pembangunan kehutanan dari APBD th 2018 | Bahan paparan terlampir |
| 3 | Kepala BPDASHL Agam Kuantan | * Organisasi dan tata kerja BPDASHL * Fungsi BPDASHL * Wilayah Kerja BPDASHL Agam Kuantan * Sebaran lahan kritis di wilayah adminstrasi kab/kota * Tema dan sub tema pembangunan biang pengendalian DASHL * Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL * Sasaran dan Indikator Program Ditjen PDASHL * Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1 s/d 3 * Program dan Kegiatan BPDASHL Agam Kuantan Tahun 2017 * Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan sasaran strategis BPDAS Agam Kuantan 2015 – 2019 * Arahan rapat koordinasi teknis BPDASHL 2017 * Arahan Rapat koordinasi Teknis BPDASHL 2017 | Bahan paparan terlampir |
| 4 | Kabid DAS RHL (Ir. Ruswin Rustam) | * Fokus kegiatan KPH (10 unit), ketika pada KPHHL terdapat lahan kritis pada kawasan HP siapa yang mengelola dan demikian sebaliknya, jadi mohon masukan jadi intinya adalah wilayah pengelolaan | Pada beberapa Provinsi mempunyai kebijakan masing-masing dan Kami juga sudah mengusulkan bagaimana KPH ini dan ini akan menjadi masukan untuk usulan ke Pimpinan bagaimana kewenangan KPH dan nanti akan ada pembahasan khusus oleh Kementerian |
| 5 | Korwil Kab. Agam (Afniwirman) | * Belum ada kesepahaman antara Pemerintah dengan masyarakat terhadap batas kawasan hutan, harapan kami adalah memfokuskan program pemantapan kawasan hutan dlm perencanaan ini | Terkait dengan konflik ini, perlu adanya dokumen pendukung/bukti seperti BA dan bukti lain guna pengusulah atau proses lebih lanjut |
| 6 | Korwil Kab. Kep. Mentawai (Tasliatul Fuadi, S.Hut) | * Provinsi lain sudah menetapkan KPH tanpa menunggu Kemendagri, namun berdasarkan UU No.23 sudah harus , sebesarapa lama naskah akademik ini akan selesai. * DAS P. Siberut, Siaebi, Sikabaluan disarankan agar melakukan evaluasi DAS untuk kedepan * Pelaksanaan RHL diluar kawasan dengan pola hibah, bagamana ini kedepan sehingga regulasinya tidak bermasalah | * Memang Provinsi lain ada yg berani mengambil resiko dan Prov. Sumbar lebih berhati-hati dalam menyikapi permendagri ini * Saat ini sedang dibuat naskah akademis dengan harapan 2-3 minggu ini sudah selesai dan Permendagri sudah selesai yg kemudian akan kita usulkan ke Gubernur tentang pembentukan KPH/ UPTD * Untuk Mentawai ada DAS yang dipulihkan (ada 16 DAS) dan DAS yg dipertahankan dan setiap 5 tahun ada review * Secara teknis, mohon maaf kami tidak dapat menjawab, cuma ada pengalaman bahwasannya kita ada koordinasi dengan daerah sehingga ada suatu usulan, karena MAK hibah itu berbeda. |
| 7 | Korwil Dharmasraya (Harwandi) | * Bagaimana penanganan Ilegal logging sehingga lebih optimal mengingat saat ini telah menjadi kewenangan Provinsi. * Permasalahan tenurial, bagaimana seperti IX koto yang masuk dalam kawasan hutan dengan harapan dalam perubahan RTRW dapat menjadi pertimbangan | * Paska PHKA dilikuidasi, maka masalah pengamanan dilimpahkan ke UPT Kementerian, apakah itu merupakan tupoksi BPDAS sehingga kami menyarankan agar dana tersebut dipindahkan ke DAK atau dilimpahkan ke Dinas agar dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan masalah pengamanan ini. * Permasalahan tenurial tetap menjadi pertimbangan buat kami, dengan catatan adanya bukti pendukung yang memadai |
|  |  | * Program perhutanan sosial guna penanggulangan permasalahan masayarakat yg ingin merubah kawasan menjadi APL | Perhuatan sosial mrp salah satu pengelolaan kawasan hutan yg berbasis masyarakat, jadi seandainya kawasan hutan dijasikan APL harus disesuaikan dengan jenis pemanfaatannya, yg jelas perhutanan sosiali tidak merubah fungsi kawasan hutan hanya diberi hak kelola bagi masyarakat |
| 8 | Kepala KSDA | Terkait dengan Program prioritas nasional, kehutanan mempunyai tugas tersendiri bahwa perlu adanya program RHL dalam kawasan konservasi | Akan dijadikan sebagai bahan usulan |
| 9 | Kepala TNKS (HAIDIR) | * Salah satu kebijakan prioritas 2016-2021 adalah pengamanan dan perlindungan dan perubahan iklim, terusterang saja saat ini kami pisah dengan PHKA menjadi lain sehingga kami hanya mempunyai anggaran sebatas patroli saja tidak sampai pada penyidikan |  |
| 10 | KPHL Bukit Barisan (Eka Meinarsih) | * Bagaimana mekanismenya dengan anggaran ada di BPDAS sedangkan kegiatan ada di KPH * Terkait dengan satgas, apakah penganggarannya digabung dengan BPDAS * Masalah RHL kami mengharap jenis tanaman karena orientasinya bisnis, kalau bisa jangan jenis tanaman yg ditebang | * Tupoksi tetap pada KPHL, tapi masalah anggaran dititipkan pada BPDASHL, mengingat salah satu tugas BPDASHL adalah pengelo laan kawasan tingkat tapak * PPKnya ada di KPHL, intinya kegiatan tetap dilaksanakan walaupun PPKnya berada pada UPT Kementerian * Anggaran Satgas menjadi tanggungjawab masing-masing sesuai wilayahnya * Ada arahan dari Direktur RHL bahwa jenis tanaman untuk kawasan HL dengan komposisi 70% jenis kayu-kayuan dan 30% dari jenis multifungsi |
| 12 | SAIDA R. Nauli | * Kita mempunyai target untuk mengurangi luas perubahan iklim sehingga harus ada kegiatan rehabilitasi, bagaimana dengan perencanaan guna mengatasi permasalahan | * Terkait Rehabilitasi pada lahan masyarakat, harus jelas lokasinya, pemiliknya dengan catatan memang harus an. Invenstor |
|  |  | * Terkait dengan dana hibah, kami tidak berani melaksanakan, apakan dari segi pertauran itu sudah betul | * Perlu adanya penegasan terhadap asal anggaran, itu merupakan anggaran daerah atau dibiayai dari Pusat, sehingga nanti pada saat lokus jangan sampai satu lokasi dibiayai oleh 2 anggaran, sehingga perlu dikonsultasikan lebih lanjut |
| 11 | JUSMALINDA | * Tahun kemarin ada dana DAK dengan kewenangan di luar kawasan, kami mohon agar lokasi BPDAS mengakomodir kegiatan KPHL Bukit Barisan | * Perlu dikonsultasikan lebih lanjut |

1. *Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Ke Kementerian LHK dan UPT Kemen LHK di Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.*

Kegiatan koordinasi ini dilakukan untuk harmonisasi antara rencana kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan rencana kegiataan Kementerian serta rencana kegiatan UPT Kementerian LHK yang lokus kegiatannya berada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 22 : Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) |
|  | 116,171,000 | 100,281,550 | 15,889,450 | 86.32 |
| Belanja Bahan Bakar | 2,175,000 | 1,351,350 | 823,650 | 62.13 |
| Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) |  |  |  |  |
| Belanja Seminar Kit Peserta | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 100.00 |
| Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | 300,000 | 300,000 | - | 100.00 |
| Belanja penggandaan | 2,574,000 | 2,450,000 | 124,000 | 95.18 |
| Belanja makan minum rapat | 640,000 | - | 640,000 | 0.00 |
| Belanja makanan dan minuman kegiatan | 17,640,000 | 16,260,000 | 1,380,000 | 92.18 |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 54,170,000 | 46,075,000 | 8,095,000 | 85.06 |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | 32,872,000 | 29,145,200 | 3,726,800 | 88.66 |
| Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber | 3,250,000 | 2,150,000 | 1,100,000 | 66.15 |
| Belanja Jasa Moderator | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100.00 |
| Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 150,000 | 150,000 | - | 100.00 |
| Belanja Pembaca Doa/Al-Quran | 150,000 | 150,000 | - | 100.00 |

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:

* Penghematan belanja BBM
* Penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan
* Penghematan perjalanan dinas luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan tiket
* Penghematan Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber dikarenakan awalnya direncanakan pembayaran honorarium diperuntukan untuk eselon III namun yang hadir adalah eselon IV sehingga dibayaran sesuai standar eselon IV.

1. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat Kemitraan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.300.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan (120 Orang) |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 289.641.600,- (96,55 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Realisasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan dapat diuraikan sebagai berikut :

Output pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan sebanyak 3 (tiga) angkatan berupa:

1) Pelatihan Penyusunan rencana Pengelolaan/Recana Kerja Usaha dengan peserta sebanyak 40 (Empat Puluh) peserta yang berasal dari lembaga/kelompok masyarakat yang masih dalam proses pengusulan atau pengajuan permohonan ijin pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam penyusunan rencana pengelolaan/rencana kerja usaha yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hutan yang diberkan ijin.

2) Pelatihan identifikasi dan inventarisasi Potensi Usaha Perhutanan Sosial yang diikuti oleh 40 (Empat Puluh) Peserta yang berasal dari Kelompok/Lembaga Pengelola Hutan yang telah mendapatkan Perijinan baik yang sudah dalam proses Verifikasi maupun yang telah mendapatkan Penetapan areal kerja maupun Hak pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ri yang ditujukan dalam meningkatkan kemampuan pengelola hutan dalam meidentifikasi potensi usaha melalui pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan maupun wisata alam dalam areal kerjanya.

3) Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari lembaga/kelompok pengelola yang mulai merintis usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, ekowista, jasa lingkungan baik dalam produksi maupun pengolahan untuk mendapatkan tambahan kemampuan dalam proses pasca produksi, pengemasan dan pemasaran hasil melalui kerjasama maupun pemasaran secara online.

4) Sekolah Lapang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (SL PHBM) yang diikuti oleh 60 (enam puluh) peserta yang berasal dari kelompok/lembaga masyarakat pengelola hutan yang berada dalam proses pengusulan, perijinan maupun pengembangan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan SDM pengelola hutan dalam ketrampilan dan kemampuan pengelolaan hutan di tapak/areal baik dalam perencanaan, rehabilitasi, pengamanan dan pemanfaatan hutan dengan melihat dan praktek langsung pada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari yang telah maju, yakni pada LPHN Sirukam di Kabupaten Solok yang telah memiliki berbagai kearifan perlindungan, usaha anyaman pandan, kerajinan bambu, program pohon asuh, FLR, Smart patrol, Agroforestry dll.

Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu berkembangnya wawasan, kapasitas dan kemampuan Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat/ Perhutanan Sosial di provinsi Sumatera Barat sehingga mendukung kelestarian hutan dan mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui perencanaan usaha yang kapabel, usaha berkelanjutan dan produk yang diterima pasar.

1. **Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.1.050.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan (40 Kelompok) |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 845.614.400,- (80,53 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Output pelaksanaan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. laporan terlaksananya Sosialisasi dan bimbingan teknis pengusulan Perhutanan Sosial melalui Fasilitasi usulan baru Usulan baru yang telah dikirim ada 6 usulan (HKm KSU ED Tabek Nagari Talang Babungo, HKM KSU Solok Radjo Nagari Air Dingin (Solok), Hutan Nagari Padang Air Dingin, Hutan Nagari Sako Utara Pasia Talang, Hutan Nagari Lubuk Gadang Selatan ( Solsel) dan Hutan Nagari Talang Babungo.

2) Laporan terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh KPH sebagian besar masih dalam proses pendampingan dan penyiapan Usulan yang meliputi Nagari Abai, Pekan Rabaa Utara, Lubuk Malako(Solok Selatan), Sumpur Kudus Selatan, Tanjung Lolo (Sijunjung), Siguntur, Banai, Sitiung (Dharmasraya), Guguak koto Gadang, Tanjung Balik Sumiso, Batu Banjanjang Tigo Lurah, Aie Batumbuk Gunung Talang (Solok), Panti, Air Manggis, Jambak (Pasaman), Kajai, Ranah Batahan, Desa Baru, Ujung Gading, Talamau (Pasaman Barat), Duku, Lubuk Alung, Pasar Usang, Sicincin (Padang Pariman), Atar, Sawahliek, Tepi selo, Pangian, Saruaso (Tanah Datar), Malalak, tilantang kamang, Baso, tanjung raya (Agam) dan Silaut, Air hitam, KBKA, Indera pura Kambang timur, lunang (Pesisir selatan).

3) Bimbingan Penyusunan Rencana Kerja menghasilkan beberapa draf dan rencana kerja yang telah masuk ke Dinas Kehutanan yang meliputi: 15 Rencana Pengelolaan Hutan Nagari/Rencana Kerja Usaha HKm baik yang sudah disahkan penyuluh maupun yang masih dalam proses perbaikan dan menunggu pengesahan oleh penyuluh meliputi : RPHN Simancung, RPHN Ranah Pantai Cermin, RPHN Koto Baru (Solok Selatan), RPHN Sungai Buluh (pariaman), RPHN Kamang Hilia, Padang Tarok, Simarosok (agam) RPHN Langki, RPHN Lubuk Tarok, RPHN Paru (sijunjung), RPHN Air Manggis, HN Tanjung Betung (Pasaman), RKUHKm karya setia, RKUHKm Musus Ssaiyo (Pasaman) RKU Hkm Sungai Tuo, RKU HKm Latang (Sijunjung), RKU Gunung Leco (Pasbar), dan RKU Hkm Sialangan (Pariaman).

4) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dilakukan meng hasilkan beberapa peningkatan usaha seperti usaha Pengolahan Gula Aren pada HKm Rap Hita Saiyo, Karya Setia, Beringin, pengembangan kerajinan, ukiran pada HKm Saiyo Padang Gelugur Pasaman, Usaha wisata Air dan kolam di HN Tanjung Betung Rao Selatan (Pasaman), Usaha Ekowisata di HN Sungai Buluh (Pariaman) Koto Baru, Usaha Silfopastura (ternak sapi/Kerbau) di HN Pakan rabaa, Pasir Talang Timur, HN Paru (Sijunjung) HN Paru (Sijunjung) HN Simancung (Solsel) dan HKm Sontra (Pasaman), Usaha Agroforestry pada HKm Gunung Leco, Maju bersama, HKm famili saiyo, HN Katiagaan, HN Air bangis (pasaman) HN Lubuk Karak dan Gunung Selasih (Dharmasraya).

5) Laporan terlaksananya Fasilitasi Perijinan dalam rangka melengkapi persyaratan usulan yang dikembalikan oleh KLHK telah dilaksanakan terhadap 30 Usulan dari 43 Usulan yang berkasnya dikembalikan dan diminta untuk dilengkapi lagi oleh KLHK, hasil fasilitasi dimaksud 21 usulan sudah diterima kembali oleh KLHK masing masing Usulan Hutan nagari Simpang Kapuak, Hutan Nagari Harau (50 Kota), Hutan Nagari Kamang Mudiak, Nagari sitalang, pasie laweh, kotorantang (agam), Hutan Nagari Sungai Langsek, Hutan Nagari Unggan, Hutan Nagari Kampung Dalam, Nagari Sako Utara, Hutan Nagari Buluh Kasok, Hutan Nagari Lalan, Nagari Sumpur Kudus, Hutan Nagari Tanjung Bonai Aur, Hutan Nagari Sibakur, HKm Sungai Tuo Nagari Tanjung Labuah, Hutan Nagari Durian Gadang, Hutan Nagari Solok Ambah (Sijunjung) , Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Nagari Padang Air Dingin (Solok Selatan) Nagari Air Manggih, Jambak, Limo Koto (Pasaman), Talang Babungo (Solok), Taratak Sungai Lundang, 1 usulan masih proses perbaikan yakni nagari KBKA (pessel).

6) Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalaian terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial baik ditingkat KPH kecuali pada KPHP Mentawai maupun di tapak yang dilaksakan menghasilkan beberapa hasil meliputi: beberapa LPHN/HKm/HTR telah melakukan pergantian kepengurusan dan pembaharuan keanggotaan, Sebagian besar LPHN dan Kelompok HKm juga menghadapi kendala internal terkait SDM, pembiayaan kegiatan, dan koordinasi ditingkat nagari. beberapa kabupaten progres perijinan HPHN/IUPHKm beberapa usulan perlu melengkapi persyaratan terutama copy KTP untuk HKm dan Pernag LPHN untuk Hutan Nagari, Kab. Sijunjung dari 16 Usulan baru 12 usulan yang melengkapi data, kab Solok dari 6 Usulan baru 2 usulan yang melengkapi data, Solok selatan dari target 10 Usulan baru 7 usulan yang dikirim, Kabupaten Agam 2 Usulan HN yang harus melengkapi data, Kabupaten 50 Kota dari 14 usulan 2 usulan perlu perbaikan.

7) Laporan hasil konsolidasi dan rekonsiliasi percepatan perijinan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian kehutanan dalam kurun waktu 2017 menghasilkan tambahan verifikasi dan perijinan yang berupa:

a) Tambahan proses verifikasi meliputi 29 Hutan nagari terdiri dari 14 di kab. 50 kota, 10 di kab agam, 2 di kab Dharmasraya, 2 dikab Sijunjung dan 1 di kab. Tanah Datar. 7 Hkm yang meliputi 1 hkm di Kab. Tanah Datar, 3 hkm di Kab. Pasbar dan 1 hkm di Kota Sawahlunto, 1 hkm di Kota padang panjang dan 1 hkm di 50 Kota.

b) Tambahan Perijinan berupa 12 Iuphkm dan 19 HPHN meliputi Iuphkm Musus Saiyo, (pasaman) Iuphkm Famili Sakato, Telago Bawah Gunung, Saiyo, ICU, Pasada Roha Bulu Laga (pasbar) Iuphkm Sungai Abu Mandiri, Hkm Sitanjung Koto tangah (50 kota), Hkm Padang Janiah (padang) Hkm rambayan manduang, Hkm Padang kubuak, hkm Kampung malayu saiyo (agam). Hutan Nagari Ganggo Hilir, Hutan Nagari Tanjung Betung, Hutan Nagari Muaro Sungai Lolo (pasaman) Hutan Nagari Muaro Takung (sijunjung) Hutan Nagari Sungai Rimbang, Hutan Nagari Kurai, Hutan Nagari Pandam gadang, Hutan Nagari Taeh Bukik, Hutan nagari Kubang, Hutan Nagari Banja loweh, Hutan Nagari Taram, Hutan Nagari Sungai balantiak (50 Kota), Hutan Nagari Kamang Hilia, Hutan Nagari Pagadih, Hutan Nagari Padang Tarok, Hutan Nagari Simarosok, Hutan Nagari Koto Kaciak, Hutan Nagari Baringin, Hutan Nagari Lubuk Basung (Agam).

Sedangkan Outcome pelaksanaan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan yaitu terjadinya Percepatan Perkembangan Perijinan dan Pengembangan Pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Perhutanan Sosial) sehingga meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

1. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.380.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat (94 Orang). |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 350.269.450,- (92,18 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan, dimana realisasi pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

***A. Lokakarya Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS)***

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan PNS dalam fasilitasi pendampingan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan peran penyuluh kehutanan dalam penyusunan rencana kerja Hutan Nagari/Hutan Kemasyarakatan.

Peserta rapat menghadiri lokakarya adalah penyuluh kehutanan PNS yang berada di KPH. Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 50 Orang

*Tabel 23 : Peserta Lokakarya Penyuluh Kehutanan PNS*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Jabatan | Jumlah |
| 1 | Pasaman | Penyuluh | 2 Orang |
| 2 | Sijunjung | Penyuluh | 8 Orang |
| 3 | Lima Puluh Kota | Penyuluh | 7 Orang |
| 4 | Solok Selatan | Penyuluh | 5 Orang |
| 5 | Agam | Penyuluh | 4 Orang |
| 6 | Pasaman Barat | Penyuluh | 6 Orang |
| 7 | Agam | Penyuluh | 6 Orang |
| 8 | Padang Panjang | Penyuluh | 1 Orang |
| 9 | Padang Pariaman | Penyuluh | 5 Orang |
| 10 | Solok | Penyuluh | 6 orang |

***B. Pembinaan KTH yang dilakukan oleh oleh KPH (pejabat struktural dan penyuluh kehutanan) di Kabupaten/Kota***

Pembinaan KTH dilaksanakan oleh KPH dengan melalui pendampingan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha sesuai prioritas kegiatan untuk setiap kelas KTH. Kelas Pemula prioritas pembinaannya pada aspek kelembagaan, Kelas Madya pada aspek kawasan dan Kelas Utama pada aspek usaha.

Pembinaan KTH oleh KPH yang telah dilaksanakan pada bulan September 2017 sebagai berikut :

*Tabel 24 : Lokasi kegiatan Pembinaan KTH*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Kelompok | Alamat |
| 1 | Sawahlunto | Lurah Basuang | Desa Batu Tanjung Kec. Talawi |
| 2 | Agam | Baringin Jaya | Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang |
| 3 | Padang Pariaman | Bukit Kandang Harimau | NagariSungai Buluah Timur Kec. Batang Anai |
| 4 | Solok | Tapi Tabek | NagariSungai Janiah Kec. Gunung Talang |
| 5 | Sijunjung | Ingin Maju | Kec. Lubuk Tarok |
| 6 | Sijunjung | Putra Harapan | Kec. Koto VII |
| 7 | Solok Selatan | Lubuk Gadang | Kec. Sangir |
| 8 | Solok Selatan | Pasir Talang Timur | Kec. Sungai Pagu |
| 9 | Lima Puluh Kota | Abadi | Kec. Suliki |
| 10 | Lima Puluh Kota | Harapan Maju | Kec. Harau |

**C. Pembinaan dan Temu Tugas Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM yang ada di KPH-KPH**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap PKSM sehingga dapat meningkatkan kapasitas, fasilitasi pendampingan penyuluh dan penguatan kelembagaan kelompok yang dibinanya serta melihat kemajuan fisik kegiatan peningkatan kelas KTH dari Pemula menjadi Madya.

bahwasannya tugas penyuluh yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan, menyusun rencana kegiatan penyuluhan Kehutanan, berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan, menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama dan mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan.

Kegiatan pembinaan dan temu tugas penyuluh kehutanan/PKSM yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

*Tabel 25 : Pembinaan Penyuluh/PKSM*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Alamat | Jumlah |
| 1 | Solok Selatan | Kec Pauah Duo | 1 Pksm |
| 2 | Solok Selatan | Kec. Sungai Pagu | 1 Pksm |
| 3 | Solok Selatan | Kec. Sangir | 1 Pksm |
| 4 | Tanah Datar | Kec. Batipuah | 1 Pksm |
| 5 | Tanah Datar | Kec. Rambatan | 1 Pksm |
| 6 | Tanah Datar | Kec. Padang Gantiang | 1 Pksm |
| 7 | Lima Puluh Kota | Kec. Harau | 1 Pksm |
| 8 | Lima Puluh Kota | Kec. Payakumbuh | 1 Pksm |
| 9 | Lima Puluh Kota | Kec. Akabiluru | 1 Pksm |
| 10 | Lima Puluh Kota | Kec. Lareh Sago | 1 Pksm |
| 11 | Lima Puluh Kota | Kec. Gunung Omeh | 1 Pksm |
| 12 | Lima Puluh Kota | Kec. Kapur IX | 1 Pksm |
| 13 | Solok | Kec. Gunung Talang | 1 Pksm |
| 14 | Solok | Kec. Koto Singkarak | 1 Pksm |
| 15 | Padang Pariaman | Kanagarian Padang Alai | 1 Pksm |
| 16 | Padang Pariaman | Kec. V Koto Timur | 1 Pksm |
| 17 | Sijunjung | Kec. Tanjung Gadang | 1 Pksm |
| 18 | Sijunjung | Kec. Koto VII | 1 Pksm |
| 19 | Agam | Kec. Tilatang Kamang | 1 Pksm |
| 20 | Dharmasraya | Kec. Pulau Punjung | 1 Pksm |
| 21 | Pasaman | Kec. Rao Selatan | 1 Pksm |
| 22 | Pasaman Barat | Kec. Talamau | 1 Pksm |
| 23 | Padang Panjang | Kec. Silaiang Bawah | 1 Pksm |

**D. Kunjungan Pekan Nasional (PENAS) Tani**

Pekan Nasioanal Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XV yang dilaksanakan di Provinsi Aceh pada tanggal 6 s/d 11 Mei 2017 telah dibuka oleh Presiden Jokowi. Ajang yang memamerkan capaian di bidang pertanian ini (dengan seluruh subsektornya) dihadiri oleh puluhan ribu peserta utusan dari berbagai daerah di Tanah Air. Dalam acara tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengutus 5 orang dengan nama-nama sebagai berikut :

*Tabel 26 : Personil Penas Tani*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Instansi |
| 1 | Yonefis, SH, MM | Kepala Bidang PPMHA | Dishut Sumbar |
| 2 | Rini Hasmira, SH | Kepala Seksi Penyuluhan | Dishut Sumbar |
| 3 | Meriyenti, S.Hut,M.Si | Staf Seksi Penyuluhan | Dishut Sumbar |
| 4 | Muryanto | Penyuluh | KPHL Sijunjung |
| 5 | Monalisa, S.Hut | Penyuluh | KPHL Lima Puluh Kota |

1. **Realisasi Anggaran dan Fisik**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan tahun 2017 ini bersumber dari DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai setelah perubahan Rp 380.000.000,- dengan Realisasi fisik mencapai 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 351.393.650,- Sisa anggaran sebesar Rp. 28.606.350,- sesuai dengan perincian sebagai berikut pada tabel dibawah.

*Tabel 27 : Realisasi Keuangan*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Kegiatan** | **Anggaran** | **Anggaran Perubahan** | **Realisasi** | **Sisa Anggaran** | **Perst**  **(%)** |
| **A.** | **Belanja Barang dan jasa** |  |  |  |  |  |
| **1** | *Belanja Bahan Pakai Habis* | 29.587.500 | 30.756.500 | 18.845.650 | 11.910.850 |  |
| **2** | *Belanja Bahan Material* | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - |  |
| **3** | *Belanja Jasa Kantor* | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | - |  |
| **4** | *Belanja cetak dan pengandaan* | 4.500.000 | 4.953.000 | 4.953.000 | - |  |
| **5** | *Belanja Sewa* | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |  |
| **6** | *Belanja makan dan minum* | 13.340.000 | 13.340.000 | 13.340.000 | - |  |
| **7** | *Belanja Pakaian Kerja Lapangan* | 3.412.500 | 3.412.500 | 3.412.500 | - |  |
| **8** | *Belanja Perjalanan Dinas* | 293.610.000 | 291.988.000 | 276.042.500 | 15.945.500 |  |
| **9** | *Honorarium PNS* |  | 5.500.000 | 4.750.000 | 750.000 |  |
| **10** | *Honorariun Non PNS* | 10.800.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | - |  |
|  | **J U M L A H** | **380.000.000** | **380.000.000** | **351.393.650** | **28.606.350** | **100** |

Sisa anggaran sebesar sebesar **Rp. 28.606.350,-** merupakan sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan yang terdiri dari :

1. Sisa dana belanja bahan pakai habis Rp. 11.910.850,- terdiri dari :Belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 11.910.850,-
2. Sisa dana belanja perjalanan dinas Rp. 15.945.000,- terdiri dari :Penginapan sebesar Rp. 15.945.500,-
3. Sisa dana honorarium PNS Rp. 750.000,- terdiri dari : Honor narasumber lokakarya sebesar Rp. 750.000,-
4. **Kegiatan Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) (100 orang) |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 90.820.600,- (90,82 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :: | | |

Output pelaksanaan kegiatan Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat :

1) Laporan terlaksananya fasilitasi forum rembuk (musyawarah) para Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Nagari Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh 120 orang yang meliputi perwakilan lembaga/kelompok pengelola hutan berbasis masyarakat (perhutanan sosial) dan instansi terkait yang meliputi: Dishut Prov Sumbar 10 orang, pemkot padang 5 orang, KKI war si 3 orang, BPDAS Agam Kuantan 2 Orang dan 100 Orang dari unsur pengelola hutan berbasis masyarakat yang mewakili Lembaga Pengelola Hutan Nagari, Kelompok Hutan Kemasyarakatan, dan Kelompok Hutan Tanaman Rakyat Sumatera Barat (lampiran laporan akhir kegiatan).

2) Terbangunnya kesepahaman dalam penyusunan AD ART forum Komunikasi PHBMN Sumbar dan tukar menukar pengalaman dalam Pengelolaan Kawasan Hutan.

3) Terpilihnya kepengurusan melalui Suksesi Kepengurusan Forum PHBM perode 2017 s/ d 2020

4) Sharing pengalaman Pengelolaan Hutan Nagari, HKm dan HTR yang berhasil

5) Usulan Program kerja Forum dan Penyiapan media komunikasi antar pengelola PHBM Sumbar

6) Berbagi pengalaman pelaksanaan kegiatan di masing masing lokasi PHBM/Perhutanan Sosial

Sedangkan Outcome pelaksanaan kegiatan Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat yaitu : terjadinya Percepatan Perkembangan Perijinan dan Pengembangan Pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Perhutanan Sosial) sehingga meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

1. **Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan (40 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan) (100 orang) |
| **-** | Outcome | : | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan (8,5 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 47.823.500,- (95,65 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/236/PDASRHL-2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove Tahun 2017.

Hasil pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove Tahun 2017 berupa Pelatihan Masyarakat Pengelola Mangrove di Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan/kwalitas sumber daya manusia masyarakat dalam mengelola mangrove di Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan Pelatihan Masyarakat Pengelola Mangrove melalui Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2017 bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat Jl. S. Parman Nomor 240 Ulak Karang Padang dan praktek lapangan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Peserta Pelatihan sebanyak 30 orang, terdiri dari Anggota Masyarakat Sekitar/Pengelola mangrove di Kabupaten/Kota , yaitu: Kabupaten Pasaman Barat 10 orang, Kabupaten Agam 5 orang, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman 5 orang, Kota Padang 5 orang dan Kabupaten Pesisir Selatan 5 orang.

Narasumber terdiri dari Narasumber Pusat (dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera) dengan materi “Pengembangan Pemanfaatan Hutan Mangrove dan Fasilitasi Kemitraan” dan “Pengelolaan Hutan Mangrove”; Narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kepala Dinas dengan materi “Kebijakan dan Perkembangan Pengelolaan Hutan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat” dan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan materi “Manfaat Pengelolaan Hutan mangrove untuk Mengurangi Lahan Kritis dan Mitigasi Iklim” .

* 1. **Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan :**
     1. **Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.89.288.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran kehutanan dan penggunaan peralatan IUPHHK hutan alam (3 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Optimalisasi PNBP sektor kehutanan dari HHK dan HHBK (81%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 82.225.850,- (92,09 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada pemegang izin di Kabupaten/Kota pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 12 Kabupaten sebagaimana yang telah direncanakan, diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto.  Realisasi kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. ***82.225.850,-*** atau sebesar ***92,09 %*** dari pagu dana sebesar Rp. ***89.288.000***.- dengan capaian Fisik sebesar ***100%.*** Sisa dana sebesar Rp. 7.062.150,- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari belanja bahan bakar dan belanja penginapan. | | |

* + 1. **Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengendalian peredaran hasil hutan (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 63.068.800,- (84,09 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten pada tahun 2017, terealisasi sebanyak 9 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar (2 kali), Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan sebesar Rp. ***63.068.800-*** atau sebesar *84.09* ***%*** dari pagu dana sebesar Rp. ***75.000.000***.- dengan capaian Fisik sebesar ***100%.*** Sisa dana sebesar Rp. ***11.931.200***,- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari belanja bahan bakar dan belanja penginapan.

* + 1. K**egiatan Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan, penatausahaan produksi hasil hutan olahan, realisasi pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan produksi hutan alam dan hutan tanaman (3 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 141.279.000,- (94,19 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Payahkumbuh dan Kota Solok.

Kegiatan Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam, Hutan Tanaman sebesar Rp. ***141.279.000,-*** atau sebesar ***94,19 %*** dari pagu dana sebesar Rp. ***150.000.000***.- dengan capaian Fisik sebesar ***100%.*** Sisa dana sebesar Rp. ***8.721.000***,- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari belanja penginapan.

* + 1. K**egiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan pengembangan produksi HHBK (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 133.951.300,- (89,30 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2017 terealisasi di 7 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Sawahlunto.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebesar Rp. ***133.951.300,-*** atau sebesar ***89,30 %*** dari pagu dana sebesar Rp. ***150.000.000***.- dengan capaian Fisik sebesar ***100%.*** Sisa dana sebesar Rp. ***16.048.700***,- merupakan sisa mati kegiatan yang berasal dari belanja penginapan.

* + 1. K**egiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan (10 Kelompok/30 Orang) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 125.579.200,- (83,72 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan 1 Kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) dimana realisasi pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. ***Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian HHBK di*** ***lokasi HKm/HN yang telah memiliki IUPHHK***

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pengendalian dan pembinaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada lokasi Hutan Nagari (HN) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah memiliki HPHN dan IUPHKm terutama HHBK, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat tentang lokasi Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan yang memiliki Izin Usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pengelola HN dan HKm untuk membuat database HHBK yang berada pada wilayahnya. Dengan adanya laporan rencana kerja (Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan) maka pengelolaan produk HHBK akan lebih baik, lebih transparan dan lebih tertata dan akan memberikan informasi yang jelas dan terukur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan juga nantinya informasi ini akan memudahkan pihak-pihak yang akan memberikan bantuan sesuai dengan potensi HHBK yang ada.

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian HHBK di lokasi HKm/HN yang telah memiliki IUPHHK pada Triwulan I di bulan Januari,Februari,Maret di Triwulan II di bulan Mei dan Juni.

*Tabel 28 : Lokasi kegiatan pembinaan dan pengendalian HHBK*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten | Kelompok | Alamat |
| 1 | Pasaman | Hkm Saiyo | Kec. Padang Gelugur |
| 2 | Pasaman | LPHN Air Manggis | Kec. Lubuk Sikaping |
| 3 | Pasaman |  | Kec. Alahan Mati |
| 4 | Sijunjung | LPHN Lubuk Tarantang |  |
| 5 | Sijunjung | LPHN Sungai Betung |  |
| 6 | Sijunjung |  | Kec. Sumpur Kudus |
| 7 | Solok | LPHN Sirukam | Kec. Payung Sekaki |
| 8 | Solok Selatan | LPHN Pakan Rabaa | Kec. Koto Gadang Parik Diateh |
| 9 | Solok Selatan | LPHN Pasir Talang Timur | Kec. Sungai Pagu |
| 10 | Pasaman Barat | LPHN Air Bangis | Kec. Sungai Beremas |

1. ***Kegiatan Identifikasi KTH dalam Pengembangan HHBK***

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi Kelompok Tani Hutan (KTH) yang sudah melaksanakan kegiatan pengembangan HHBK baik berupa bantuan atau yang dilaksanakan secara mandiri, selain memberikan motivasi kepada kelompok, juga berguna sebagai database tentang KTH yang sudah melaksanakan kegiatan Pengembangan HHBK dan berpotensi untuk diberikan bantuan dan juga kepada KTH dari pemula menjadi madya.

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan identifikasi KTH dalam pengembangan HHBK di pada Triwulan I di bulan Februari dan Maret di Triwulan II di bulan April.

*Tabel 29 : Lokasi kegiatan identifikasi KTH dalam pengembangan HHBK*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Kelompok | Alamat | HHBK |
| 1 | Sawahlunto | Lurah Basuang | Desa Batu Tanjung Kec. Talawi | Jeruk Nipis |
| 2 | Agam | Baringin Jaya | Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang | Aren, Pinus,Rotan Manau |
| 3 | Padang Pariaman | Bukit Kandang Harimau | NagariSungai Buluah Timur Kec. Batang Anai | Rotan Manau, Lebah, Objek Wisata |
| 4 | Solok | Tapi Tabek | NagariSungai Janiah Kec. Gunung Talang | Aren, Bambu, Lebah Madu |
| 5 | Sijunjung | Sarangkuah Dayuang | Nagari Sitiung Kec. Sitiung | Karet, Sawit. |
| 6 | Lima Puluh Kota | Topang Mosamo | Nagari Sialang Kec. Kapur IX | Karet, Rotan, Jernang |
| 7 | Padang Panjang | Agroforestry Aro Sepakat | Kec. Padang Panjang Timur | Jamur, Karet, Rotan |
| 8 | Solok Selatan | Pasir Talang Timur | Kec. Sungai Pagu | Lebah, Rotan, Aren |
| 9 | Lima Puluh Kota | Baiyo Batido | Kec. Situjuah Limo | Aren, Rotan Manau, Jamur |
| 10 | Lima Puluh Kota | Harapan Maju | Kec. Harau | Rotan, Gambir |

1. ***Kegiatan Pelatihan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PNS di KPH***

Tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas bagi PNS di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberikan penambahan wawasan bagi PNS yang berada di KPH dalam hal pengelolaan dan pendataan potensi HHBK yang berada di wilayah KPH mereka, sehingga akan bermanfaat dalam pembinaan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Hutan Nagari (HN) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mengelola HHBK.

Peserta pelatihan adalah Kelompok Tani Hutan yang berada di Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Nagari (HD) di Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 April 2017 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat Jl. S. Parman No. 240 Padang dengan jumlah peserta 30 Orang.

*Tabel 30 : Peserta kegiatan pelatihan HHBK*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten | Kelompok | Jumlah Peserta |
| 1 | Solok Selatan | LPHN Pasir Talang Timur | 2 Orang |
| 2 | Solok Selatan | LPHN Pakan Rabaa | 2 Orang |
| 3 | Solok Selatan | LPHN Lubuk Gadang Selatan | 2 Orang |
| 4 | Pasaman Barat | HKm Gunung Sigantang | 1 Orang |
| 5 | Pasaman Barat | KTH Abdi Sani | 1 Orang |
| 6 | Pasaman Barat | KTH Bina Usaha | 2 Orang |
| 7 | Pasaman | LPHN Alahan Mati | 2 Orang |
| 8 | Padang Pariaman | LPHN Lubuak Alung | 2 Orang |
| 9 | Padang Pariaman | HKm Sungai Buluah | 2 Orang |
| 10 | Padang Pariaman | KTH Simpang Tigo Kampung Paneh | 1 Orang |
| 11 | Padang Pariaman | KTH Usaha Mandiri | 1 Orang |
| 12 | Padang Pariaman | KTH Lembah Lestari | 2 Orang |
| 13 | Solok | LPHN Sariak Alahan Tigo | 2 Orang |
| 14 | Solok | LPHN Sirukam | 1 Orang |
| 15 | Solok | HKm Indudur | 2 Orang |
| 16 | Sijunjung | LPHN Lubuak Tarantang | 2 Orang |
| 17 | Sijunjung | LPHN Mangganti | 2 Orang |
| 18 | Sijunjung | LPHN Sisawah | 1 Orang |

1. ***Kegiatan Rapat pembinaan dan pengembangan Aneka Guna Hutan di Padang (PNS di KPH).***

Kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan konsep dan persepsi PNS di KPH tentang Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan terutama kegiatan Pengembangan HHBK, sehingga KPH mempunyai persepsi yang sama dengan Provinsi sebagai instansi induk dalam pengelolaan HHBK.

Peserta rapat adalah Koordinator, Penyuluh dan Ketua Kelompok Tani Hutan yang berada di KPH. Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 27 Orang.

*Tabel 31 : Peserta rapat pembinaan dan pengembangan Aneka Guna Hutan*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kabupaten/Kota | Nama | Jabatan |
| 1 | Agam | Ir. Afniwirman | Koordinator |
| 2 | Agam | Elimarni, S.Sos | Penyuluh |
| 3 | Agam | Mawardi | Ketua KTH Baringin Jaya |
| 4 | Padang Pariaman | Risman STP, M.Si | Kepala Resort |
| 5 | Padang Pariaman | Windra, SP | Penyuluh |
| 6 | Padang Pariaman | Supirman | Ketua KTH Generasi Muda Patalanagn |
| 7 | Padang Panjang | Novirman, SP,M.Si | Kepala Resort |
| 8 | Padang Panjang | Mada Rusli, SST | Penyuluh |
| 9 | Padang Panjang | Irwan | Ketua HKm Agroforestry Aro Sepakat |
| 10 | Solok | Zeptin Alex, S.Hut,MM | Koordinator |
| 11 | Solok | A.T Herysetiawan,SP | Penyuluh |
| 12 | Solok | Zulfidir | Ketua KTH Tapi Tabek |
| 13 | Solok Selatan | Hamdani, S.Sos | Koordinator |
| 14 | Solok Selatan | Yudia Falentina, A.Md | Penyuluh |
| 15 | Solok Selatan | Riki Patriyansyah | Ketua LPHN Pasir Talang |
| 16 | Sijunjung | Slamet Riyadi, SH | Koordinator |
| 17 | Sijunjung | Muryanto | Penyuluh |
| 18 | Sijunjung | Reny Rahmayulis, S.Hut | Penyuluh |
| 19 | Sijunjung | Jhon Aprisal | Ketua KTH Ingin Maju |
| 20 | Sijunjung | Abu Nawas | Ketua KTH Putra Harapan |
| 21 | Lima Puluh Kota | Nevin, S.Hut, M.Si | Koordinator |
| 22 | Lima Puluh Kota | Mimitra Delita P, S.Hut | Penyuluh |
| 23 | Lima Puluh Kota | Monalisa, S.Hut | Penyuluh |
| 24 | Lima Puluh Kota | Hady Ikhsan, S.Hut | Penyuluh |
| 25 | Lima Puluh Kota | Putra Delpi | Ketua KTH Harapan Maju |
| 26 | Lima Puluh Kota | Mariza Desvita | Ketua KTH Abadi |
| 27 | Lima Puluh Kota | Yulfahmi Khatib | Ketua KTH Topang Mosamo |

Sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 19.729.800,- merupakan sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan yang terdiri dari :

1. Sisa dana belanja bahan pakai habis terdiri dari :

- Belanja ATK

- Belanja bahan bakar minyak

1. Sisa dana belanja perjalanan dinas terdiri dari :

- Pendamping

- Penginapan

- Uang harian

1. Sisa dana honorarium Non PNS terdiri dari Jasa pakar/Praktisi
   * 1. K**egiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.878.342.500,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan (10 Kelompok/30 Orang) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 94,51 %  Realisasi Keuangan : Rp. 646.350.254,- (73,59 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan ada beberapa sub kegiatan :

* + - 1. Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan KPHL/KPHP

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) yang tepat dan benar. Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan merupakan pelaksanaan analisis lokasi melalui orientasi dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian hasil pengumpulan data dan informasi digunakan sebagai acuan penentuan lokasi pelaksanaan pengelolaan kawasan.

Secara garis besar Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

1. Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Berdasarkan hasil koordinasi dan penegumpulan data pada dinas/instansi yg membidangi Kehutanan selanjutnya ditentukan kawasan hutan yang akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan.

Dalam pelaksanaan Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan ini beberapa hal yang menjadi fokus perhatian adalah menyangkut hal-hal antara lain :

1. Orientasi Peta (koordinat peta, jenis tutupan lahan, tingkat kritis, kelerengan)
2. Orientasi Lapangan (kondisi tutupan lahan, kondisi topografi, aksesibilitas, lokasi)
3. Data Administrasi Pemerintahan (jorong, nagari, kecamatan, kabupaten)
4. Data Kawasan meliputi Nama kawasan, Blok/Petak, Koordinat GPS, Data DAS, Fisiografi, Ketinggian tempat, Kelerengan, Iklim dan curah hujan, Jenis Tanah, Tutupan Lahan, Flora dan Fauna dan lain-lain.
5. Data Administrasi meliputi Nama Jorong, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten
6. Data Sosial Ekonomi meliputi data Demografi dan Kelembagaan Masyarakat
7. Data Sebaran Penggunaan Lahan meliputi Jenis Penggunaan Lahan, Luas
8. Data Jumlah Kasus Gangguan Lahan Hutan
9. Data Sarana dan Prasarana
10. Kendala dan Permasalahan
11. Saran dan Tindaklanjut

**Tabel 32 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  |  | **Kab. Tanah Datar** | **13 s/d 14 Feb 2017** | **Hendra Bakti Putra, Agitha Putri Br Bangun, Wandra Zulia Farma** | **3,440,000** | **Terdapatnya Hasil Hutan Bukan Kayu 9Pinus) yang telah dikelola oleh kelompok tani dan perorangan sehingga perlu diadakannya pengelolaan lebih lanjut dan kemitraan. Selain dari HHBK terdapat potensi pemandangan di Nagari Saruso** |  |
|  |  | **Kota Sawahlunto** | **16 s/d 17 Feb 2017** | **Cucu Sukarna, Sudirman, Fernando** | **3,340,000** | **Terdapat Hasil Hutan Bukan Kayu (Pinus) yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha oleh pemerintah.** |  |
|  | **Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan** | **Kab. Lima Puluh Kota** | **27 s/d 28 Feb 2017** | **Hendra Bakti Putra, Rucitra, Yoga Aprianto** | **2,740,000** | **Terdapat potensi air terjun , hasil hutan bukan kayu (Rotan, Jernang, Damar dan Madu) di Jorong Mangunai Tinggi, Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban** |  |
|  |  | **Kab. Lima Puluh Kota** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Emsyarfi, Yusuf Nur, Joni Saputra** | **1,080,000** | **Terdapat potensi jasa lingkungan berupa Genangan PLTA Koto Panjang dan air yang dimanfaatkan pada Jorong Panang, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Baru** |  |
|  |  | **Kab. Pesisir Selatan** | **15 s/d 16 Juni 2017** | **Purnama, Rucitra, Fernando Simbolon** | **3,090,000** | **Terdapat potensi gambir, Buah - buahan ( Durian, Manggis), getah (Karet) dari kawasan hutan sehingga harus dikelola lebih maksimal oleh KPH.** |  |
|  |  | **Kab. Pesisir Selatan** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Masrizal, Revina Febriani, Toni Andriatna** | **1,080,000** | **Terdapat potensi Air Terjun pada Jorong Palangai Gadang, Nagari Palangai Gadang, Kec. Ranah Pasir** |  |
|  |  | **Kab dan Kota Solok** | **1 s/d 2 Agustsus 2017** | **Syafruddin, Dewi Safnita, Desi Afrizal** | **1,080,000** | **Terdapat potensi HHBK (Pinus) pada Jorong Bulukan Nagari Talang Babungo** |  |
|  |  | **Kab. Dhamasraya** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Ali Nafri, Alyandrison, Eka Febriandi** | **1,080,000** | **Tidak terdapat potensi hasil hutan dikarenkan terjadi perambahan pada kawasan hutan** |  |
|  |  | **Kab. Sijunjung** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Dian Y widra, Febri Syahli, Peri Antoni** | **1,080,000** | **Terdapat kayu -kayuan, asam gelugur dan asam kandis serta karet pada Nagari Kampung Dalam** |  |
|  |  | **Kab. Dhamasraya** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Hamdani, Hasan, Anton Gusman** | **3,440,000** | **Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh terdapat potensi kayu yang harus dikelola lebih bijaksana agar potensi ilegal loging lebih terkendali.** |  |
|  |  | **Kab. Agam** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Khairi, Andi Junaidi, Melia Rizki Yuanita** | **1,220,000** | **Terdapat potensi HHBK yang harus dikenali lebih lanjut dengan pelaksanan Inventarisasi** |  |
|  |  | **Kab Agam** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Afniwirman, Risman, Syafrizal** | **3,440,000** | **Terdapat potensi HHBK yang harus dikenali lebih lanjut dengan pelaksanan Inventarisasi** |  |
|  |  | **Kab. Pasaman** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Mursal Efendi, zulkifli, Mon Muldizar** | **1,080,000** | **Nagari Lubuk Layang dan Nagari Padang Mentinggi mempunyai potensi Getah Pinus dan rotan** |  |
|  |  | **Kab. Pasaman** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Yandesman, Meriyanti, Warisno** | **2,430,000** | **Jorong Tombang Nagari Sinuruik mempunyai pottensi Sarang Burung Walet dan rotan yang wajib dikembangkan** |  |
|  | **Sosialisasi dan Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan** | **Kab. Kepulauan Mentawai** | **30 Okt s/d 1 Nov 2017** | **Zunnaidi, Panda, puset dan muklis** | **4,700,000** | **Desa Mara di Kec Sipora Selatan terdapat HHBk rotan jenis manau dan tabu-tabu yang dikelola harus lebih efektif dan efesien.** |  |
|  |  | **Kab. Kepulauan Mentawai** | **30 Okt s/d 1 Nov 2017** | **Pribet, Riza Nofa, Dasa Putra, Lastro Patar** | **4,700,000** | **Desa nemnem leleu terdapat potensi rotan manau dan tabu-tabu yang tidak dimanfatkan optimal** |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **39,020,000** |  |  |

* + - 1. Sosialisasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan

Sosialiasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan merupakan penyampaian pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar hutan denagn harapan kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara pelaksana kegiatan dan masyarakat sekitar hutan dan pemangku kepentingan

Secara garis besar Sosialisasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

* 1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi dan masyarakat terkait yang membidangi Kehutanan di daerah.

Tehnik yang dilakukan dalam koordinasi ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah usaha/kegiatan untuk menyampaikan tujuan tertentu demi mendukung suatu tujuan dan memberikan kejelasan bagi pihak terkait. Sosialisasi ini dilakukan antara lain dengan pejabat/petugas dan masyarakat sekitar hutan.

1. Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

3. Pembuatan kesepakatan dibuat saat koordinasi pelaksanaan dan kerjasama antara KPHL Bukit Barisan dengan pejabat/petugas dan masyarakat sekitar hutan.

b. Sosialisasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Setelah Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan hasil koordinasi dan penegumpulan data pada dinas/instansi yang membidangi Kehutanan selanjutnya ditentukan kawasan yang akan dijadikan lokasi tanam dilakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dikawasan tersebut demi tercapainya kesepahaman.

Dalam penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada pejabat/petugas dan masyarakat sekitar hutan dilakukan dengan teknik sosialisasi dua arah. Dimana pihak KPHL Bukit Barisan dan peserta memiliki hubungan komunikasi yang baik. KPHL Bukit Barisan menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi ini. Selain itu penyampai menyampaikan kawasan yang akan dikelola dan kegitan yang akan dilaksanakan berupa Pembangunan Hutan Tanaman Jabon. Peserta yang merupakan masyarakat sekitar hutan dapat mengajukan pertanyaan yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Selain sosialisasi pihak KPHL Bukit Barisan bersama masyarakat sekitar hutan akan bekerja sama demi pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, lestari, efektif dan efisien.

**Tabel 33 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | **Sosialiasi Kegiatan HHK, HHBK dan Jasling** | **Kota Sawahlunto** | **15 s/d 16 Mei 2017** | **Cucu Sukarana, Angga Nurmalis** | **2,740,000** | **Terlampir** |  |
|  |  | **Kab. Tanah Datar** | **19 s/d 20 Juni 2017** | **Hendri, Eka, Okta** | **3,360,000** |  |  |
|  |  | **Kab Solok** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **Novi, Marwadi, Sandri** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Pesisir Seltan** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **Madriyanto, Yusfiandratna, Hendri** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Pasaman** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **yandesman, Hendri, Mon Muldzar** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Agam** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **afniwirman, Yaflis, Julismar** | **1,220,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Dhmasraya** | **1 s/d 2 Agustus 2017** | **Ali Nafri, Alyandri, Eka** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Lima Puluh Kota** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **yusrizal, Azizah, Siska** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Sijunjung** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **Slamet, Dian, Azwar** | **1,080,000** |  |  |
|  |  | **Kab. Solok Selatan** | **3 s/d 4 Agustus 2017** | **Hamdani, Yudia, Laila** | **3,440,000** |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **17,240,000** |  |  |

1. Penguatan Kelembagaan Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan dan Persiapan MoU

Kelompok tani hutan perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun sistem dan usaha pengelolaan kawasan hutan KPHL bukit Barisan. Sistem dan usaha akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kelembagaan yang kuat.

Secara garis besar kegiatan Penguatan Kelembagaan Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan dan Persiapan MoU ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

Tehnik yang dilakukan dalam koordinasi ini adalah sebagai berikut :.

1. Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

2. Pemberian informasi teknis baik secara pelatihan maupun referensi teknis yang terdapat pada Dinas/Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota.

3. Jika Lokasi belum dilakukan kerjasama atau pembentukan kelompok tani, tim KPHL Bukit Barisan akan menyarankan pembentukan kelompoh tani hutan dan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai dasar dari kemitraan bersama dengan masyarakat.

4. Intansi/kelembagaan terkait akan menyususun dan mempersiapkan Nota kesepahaman bersama dengan KPHL Bukit Barisan.

1. Penguatan Kelembagaan Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan dan Persiapan Mou

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

* 1. Mendorong dan membanguan kelompok tani hutan kegiatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan agar mampu bekerjasama di bidang kehutananan secara berkelompok.
  2. Menumbuh-kembangkan kelompok tani hutan melalui fasilitasi bantuan dan akses permodalan, posisi tawar, peningkatan fasilitas dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efesiensi dan efektifitas usaha tani.
  3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota

Persiapan Mou dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

1. Negoisasi. Ini merupakan suatu proses dan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama antar para pihak.
2. Memorandum of Understanding (MoU)

MoU merupakan pencatanan atau pendokumentasian hasil negoisasi awal tersebut dalam bentuk tertulis.

**Tabel 34 : Hasil Pelaksanaan Kegitan terlampir.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Penguatan Kelembagaan Kegiatan HHBK dan Jasling dan Persipan Mou | Kab. Pesisir Selatan | 8 s/d 9 Agustus 2017 | Eka Meinarsih, Angga Febriano, Effendi | 2,290,000 | Terlampir |  |
|  |  | Kab. Sijunjung | 7 s/d 8 Agustus 2017 | Slamet Riyadi, Syahbudin, Azwar Badran | 1,080,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 7 s/d 8 Agustus 2017 | Madriyanto, Yusfiandrita, Hendrio Fadly | 1,080,000 |  |  |
|  |  | Kab. Dhamasraya | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Hendri, Zulbani, Saut Simajuntak | 1,080,000 |  |  |
|  |  | Kab. Agam | 7 s/d 8 Agustus 2017 | Khairi, Melia Rizki, Muharmen Ismet | 1,220,000 |  |  |
|  |  | Kab. Lima Puluh Kota | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Prima Deswita, Sumiardi, Jamal Husni | 1,260,000 |  |  |
|  |  | Kab. Tanah Datar | 8 s/d 9 Agustus 2017 | Hendra Bakti putra, Suhardi, Darwin | 2,290,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pasaman | 3 s/d 4 Agustus 2017 | terra Dharma, Didi Mulyadi, Efrizal | 1,220,000 |  |  |
|  |  | Kab. Solok | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Bakhrinaldi, darwin, Yentinofa | 1,080,000 |  |  |
|  |  | Kab. Dhamasraya | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Hamdani, Hasan, Anton Gusman | 3,440,000 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | **16,040,000** |  |  |

* 1. Inventarisasi HHBK dan Jasling

Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat.

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunanya, serta jasa yang berasal dari hutan

Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu bertujuan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang potensi hasil hutan bukan kayu yang dilakukan secara lengkap baik jenis, jumlah, kondisi lingkugan dan lain-lain.

Inventarisasi Jasa Lingkungan bertujuan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang potensi jasa lingkungan di suatu kawasan tertentu.

Secara garis besar Inventarisasi HHBK dan Jasling di KPHL Bukit Barisan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan.

2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkunga.

**Tabel 35 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan | Kab. Pesisir Selatan | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Yulietni, Masrizal, Iswandi Putra, Revina Febriani, Toni Andriatna | 2,700,000 | Dilaksanakan Inventarisasi Jasa Lingkungan di Nagari Palangai Gadang, Kec. Ranah Pasirdan ditemukan potensi Air Terjun dan penampungan bak PDAM yang harus dibentuk kelembagaan dan pembangunan fasilitas umum |  |
|  |  | Kab. Solok | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Z. A Vildro, Zaid Hafuszul, Silfa Gusmiarti, zulfahmi, Dewi Safnita | 2,700,000 | Dilaksanakan Inventarisasi HHBK Pinus, namun belum dilaksanakan Inventarisasi jumlah menyeluruh |  |
|  |  | Kab Dhamasraya | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Ali Nafri, Suardi, Syahrul Mubaraq, wira dewata, Hidayati | 2,700,000 | Untuk Inventarisasi HHBK dan Jasling Kab. Dhamasraya memiliki potensi yang rendahhal ini terjadi dikarenakan terjadi perambahan |  |
|  |  | Kab. Sijunjung | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Dian, Febri Syahli, Peri Antoni, Yandri Ramli, Dharmansyah | 2,700,000 | Inventarisasi HHBK dilaksanakan di Nagari Lubuk Tarok Nagari Kampung Dalam Kec. Lubuk Tarokdi temukan potensi Pasak Bumi 10.257/ 100 Ha, Rotan 17.500/100 Ha, Karet Tanaman 5.893/ 100 Ha, Durian 179/ 100 Ha, Asam Kandis 1.250/ 100 Ha, Manau 4 /100 Ha |  |
|  |  | Kab. Dhamasraya | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Hamdani, Hasan, Anton Gusman, Busrizal, Yudia falentina | 4,820,000 | Wali Nagari Timpeh di inventariasi potensi HHBk berupa jernang, pasak bumi, gaharu dan rotan) |  |
|  |  | Kab. Agam | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Nareswen, Usdianto, Risman, Andi junaidi, Suhet Tarmizi | 2,700,000 | Inventarisasi HHBK ditemukan potensi Rotan, Karet dan Kopi namun belum dilakukan perhitungan potensi secara signifikan |  |
|  |  | Kab. Lima Puluh Kota | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Nevin, Joni Saputra, Bora Prasetya, Roni Yulius | 2,370,000 | Pelaksanaan Inventarisasi dilaksanakn di Nagari Tanjung Pauah, Kec. Pangkapan Koto Baru ditemukan tegakan Pinus hasil reboisasi selain itu ditemukan rotan manau, gaharu, dan lebah madu namun belum ditemukan jumlah potensi yang signifikan |  |
|  |  | Kab. Pasaman | 7 s/d 9 Agustus 2017 | Yunaidi, Murasal Efendi, Zulkifli, Frans Hardi, Efrizal | 2,700,000 | Potensi Jasa Lingkungan di Kanagarian Padang Mentinggi, Kecamatn Rao, Kab. Pasaman yaitu potensi bentang alam yang mampu dikembangkan menjadi ekowisata, terdapat juga pengelolaan getah pinus oleh PT. Inhutani IV, |  |
|  |  | Kab. Mentawai | 6 s/d 9 November 2017 | Pribel, Riza Nofa Satria, Dasa Putra, Lastro Patar | 5,200,000 | Inventarisasi dilaksanakan di Desa Nemnem Leleu di Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai di temukan potensi HHBK terdiri atas manau , tabu-tabu, jernang dan bambu dan potensi jasa lingkungan seperti air terjun dan gowa |  |
|  |  | Kab. Mentawai | 6 s/d 9 November 2017 | Zunaidi, Panda Afrianas, Puset, Muklis | 5,200,000 | Inventarisasi dilaksanan di Desa Mara Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai hasil yang didapatkan yaitu potensi HHBK( manau, tabu-tabu, jernang dan rotan) dan Jasa Lingkungan (air Terjun dan gowa) |  |
|  |  | Kab. Tanah Datar | 23 s/d 26 Mei 2017 | Eka Meinarsih, Hani, Wandra Zulia Farma, Rucitra, Pono | 7,040,000 |  |  |
|  |  | Kab. Tanah Datar | 19 s/d 22 Mei 2017 | Yusra, Yoga Aprianto, Angga Febriano, Irfan oktavianus, Zulyasri | 5,760,000 |  |  |
|  |  | Kab. Tanah Datar | 23 s/d 26 Mei 2017 | Cucu Sukarna, Yoga Aprianto, Fernando Simbolon, Prima Praditya Wahyudi, Yendra | 7,040,000 |  |  |
|  |  | Kab. Tanah Datar | 19 s/d 22 Mei 2017 | Sudirman, Gema Yudistira, Herlinawati, Soter Marudut, doris Ramli | 5,760,000 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | **59,390,000** |  |  |

**Tabel 36 : Data Inventarisasi HHBK KPHL Bukit Barisan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor Tim** | **Pelaksana** | **Nomor Jalur** | **Panjang Track Jalur (meter)** | **Luasan (m²)** | **Nomor Petak** | | **Jumlah Pinus (pohon)** | | |
| **1** | Hendra Bakti Putra, S.T | 1a - 1b | 1.000 | 20.000 | HP.128 HP.130HP.132 | | 2.179 | | |
| Gema Yudistira, SE | 2a – 2b | 1.000 | 20.000 |
| Nur Apni Reskiani  Agitha Putri Bangun  Darliswarwati  Elisda  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 3a - 3b | 1.000 | 20.000 |
| **2** | Wandra Zulia Farma, S.Hut | 4a - 4b | 1.000 | 20.000 | HP.135  HP.140  HP.141  HP.147  HP.149  HP.151 | | 267 | | |
| Rucitra, S.Hut | 5a - 5b | 1.000 | 20.000 |
| Pono Raharjo  Anton  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 | 6a - 6b | 1.000 | 20.000 |
| **3** | Sudirman, S.Hut | 7a - 7b | 1.000 | 20.000 | HP.147  HP.152  HP.153  HP.155  HP.156 | | 232 | | |
| Gema Yudistira, SE | 8a - 8b | 1.000 | 20.000 |
| Herlinawati  Sorter Marudut Nababan Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 9a - 9b | 1.000 | 20.000 |
| **4** | Ir. Eka Meinarsih | 10a - 10b | 1.000 | 20.000 | HP 163  HP 165  HP 166  HP 167  HP 169 | | 2.242 | | |
| Kamisal | 11a - 11b | 1.000 | 20.000 |
| Prima Praditya Wahyudi  Fatma Yulis  Maju Karo Karo  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 12a - 12b | 1.000 | 20.000 |
| **5** | Cucu Sukarna, SIP | 13a - 13b | 500 | 10.000 | HP.157  HP.376 | | 695 | | |
| Yoga Afrianto, SP | 14a - 14b | 500 | 10.000 |
| Fernando Simbolon | 15a - 15b | 500 | 10.000 |
| Prima Praditya Wahyudi  Yendra  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 16a - 16b | 500 | 10.000 |
| **6** | Yoga Afrianto, SP | 17a - 17b | 500 | 10.000 | HP.121  HP.126 | | 302 | | |
| Angga Febriano | 18a - 18b | 500 | 10.000 |
| Zulyasri | 19a -19b | 500 | 10.000 |
| Irfan Oktavianus  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 20a - 20b | 500 | 10.000 |
| **7** | Wandra Zulia Farma, S.Hut | 21a - 21b | 500 | 10.000 | HL.172  HL.173 | | 251 | | |
| Rucitra, S.Hut | 22a - 22b | 500 | 10.000 |
| Fernando Simbolon  Pono Raharjo | 23a - 23b | 500 | 10.000 |
| Anton  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 24a - 24b | 500 | 10.000 |
| **8** | Hendra Bakti Putra, ST | 25a - 25b | 500 | 10.000 | HP.192HP.397  HP.205  HP.214 | | 2.050 | | |
| Agitha Putri Br. Bangun | 26a - 26b | 500 | 10.000 |
| Nur Apni Riskiani | 27a - 27b | 500 | 10.000 |
| Gema Yudistira, SE | 28a - 28b | 500 | 10.000 |
| Novita Anika, S.Hut  Herlinawati  Agitha Putri Bangun  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 | 29a - 29b | 500 | 10.000 |
| **9** | Boy Martin, SH | 30a - 30b | 300 | 6.000 | HL.69 | | 0 | | |
| Angga Febriano | 31a - 31b | 300 | 6.000 |
| Nur Apni Riskiani | 32a - 32b | 300 | 6.000 |
| Rudi Hartono,S.Sos |  |  |  |
| Mursyid, M.SP  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 |  |  |  |
| **TOTAL LUAS** | | |  | **428.000** |  | | **8.218** | | |
|  |  | | | | |  | |  |  | |

Keterangan :

* Luas Total Hasil Analisis Peta Kerja = 3.433,8 Ha
* Jumlah Pinus = 8.218 Pohon
* Intensitas Sampling = 1%

1 Pohon Pinus menghasilkan 0,9 s/d 1 Kg Getah Pinus per-Bulan

Jadi :

* 428.000 m² = 42,8 Ha
* 8.218 Pohon / 42,8 Ha = 193 Pohon/ Ha
* 193 Pohon x 3.433,8 Ha = 662.724 Pohon

**Tabel 37 : Luas Areal Potensi Pinus di Kabupaten/Kota**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KABUPATEN/KOTA** | **LUAS AREAL POTENSI PINUS (Ha)** |
| 1.  2.  3. | Kabupaten Tanah Datar  Kota Sawahlunto  Kabupaten Solok | 3.316,33  242,03  478,39 |

* 1. Verifikasi Kemitraan

Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan kemitraan atas pemanfaatan potensi kawasan hutan di wilayah KPHL Bukit Barisan di lapangan. Verivikasi ini bertujuan agar pemangku kemitraan mendapat kepastian prosedur dalam pengakuan kemitraan.

Secara garis besar verivikasi Kemitraan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

* + - 1. Pengajuan Kemitraan
         1. Permohonan kemitraan diajukan oleh perseorangan, badan hukum maupaun masyarakat hukum adat.
         2. Permohonan diajukan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan
         3. Persiapan dokumen kemitraan seperti data pemohon, data kawasan yang akan dimitrakan, surat pernyataan dari pemohon dan peta lokasi.
      2. Validasi dokumen permohonan kemitraan
         1. Validasi terhadap kelengkapan dokumen
         2. Validasi dilakukan oleh Tim KPH bersama bidang-bidang di Dinas Kehutanan terkait kegiatan kemitraan.
      3. Verifikasi permohonan dan calon kemitraan
         1. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh KPH
         2. Tim Verifikasi melaksanakan tugas di lapangan untuk memastikan:

Keberadaan dan keabsahan pemohon maupun dokumen pemohon.

Keberadaan dan keabsahan hutan yang dimohon

Kondisi tutupan lahan

Keberadaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola KPH

**Tabel 38 : Hasil Pelakasanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
| 1 | Verivikasi Kemitraan | Kab. Lima Puluh Kota | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Nevin, Emsyarfi, Bora Prasetya | 1,220,000 | PT Tanjung Pauh Angrisari ingin berpartisipasi dalam pengembangan kawasan hutan lindung dan Danau Koto Panjang dengan membentuk suatu usaha Agrowisata dan Ekowisata serta Agroindustri dengan nama " Ekowisata Agroindustri Danau kotopanjang) |  |
| 2 |  | Kab. Pasaman | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Yandesman, Terra Dharma, rizki Hamid | 2,740,000 | Nagari Sinuruil Kec Talamau terdapat satu Hkm dan dua lagi dalam proses perizinan. HKM yang telah berjalan yaitu HKm Ingin Makmur dengan IUPHKm seluas 528 Ha |  |
| 3 |  | Kab. Peisir Selatan | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Madriyanto, Indah Khairunisyah, Hilman Nici | 1,080,000 | Kemitraan kehutanan harus memakai prinsip, kesepakatan, kesetaraan, saling mengutungkan dan lokasl spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi |  |
| 4 |  | Kab dan Kota Solok | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Z. A vildro, Novi Eka Putri, Yentinofa | 1,080,000 | Kemitraan Kehutanan dilaksanakan oleh KPH baik dengan masyarakat sekitar hutan, penanam modal dan instansi terkait lainnya |  |
| 5 |  | Kab Dhamasraya | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Ali Nafri, Alyandrison, Harwandi | 1,080,000 | Mendatangi kelompok tani suka maju yang berda pada jorong Aur Jaya Nagari Koto Panjang Kec. Koto Baru dan membrikan informasi tentang program/kegiatan kehutanan yang telah/belum dilaksanakan |  |
| 6 |  | Kab. Sijunjung | 14 s/d 15 Agustus 2017 | Slamet Riyadi, Mardhiat, Manurung | 1,080,000 | Terdapat Usaha Kemitraan Pemanfaatan Aliran Air dengan masyarakat sekitar |  |
| 7 |  | Kab. Dhamasraya | 21 s/d 22 Agustus 2017 | Busrizal, Laila Fitria | 1,440,000 | Belum dapat dilakukan kerjasama pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dengan pola kemitraan |  |
| 8 |  | Kab. Agam | 7 s/d 8 Agustus 2017 | Afniwirman, Yaflis, Nasar | 1,220,000 | Belum dapat dilakukan kerjasama pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dengan pola kemitraan |  |
| 9 |  | Kota Sawahlunto | 8 s/d 9 Agustus 2017 | Yusra, Pamuji, Defitri | 2,400,000 | Belum dapat dilakukan kerjasama pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dengan pola kemitraan |  |
| 10 |  | Kab. Tanah Datar | 8 s/d 9 Agustus 2017 | Ita Rahmawati, Gema Yudistria, Doris Ramli | 2,680,000 | Wali Nagari Koto Tangah mengetahui bahwa tiga kelompok tani yang mengusulkan pola kerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kelompok Tani Batang Nago, Kelompok Tani Padang Manyanda dan Kelompok Tani lakuak Batuang |  |
| 11 |  | Kab. Pesisir Selatan | 8 s/d 9 Agustus 2017 | bambang Suyono, Refriasel, Sarni | 3,620,000 | Masyarakat mengharap apabila dimungkinkan pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan antara masyarakat Nagari Mandeh dengan KPHL bukit BArisan |  |
|  | TOTAL |  |  |  | **19,640,000** |  |  |

* 1. Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Kelola KPH

Bimbingan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur di KPHL Bukit Barisan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

* 1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

Tehnik yang dilakukan dalam koordinasi ini adalah sebagai berikut :.

1. Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

2. Pemberian informasi teknis baik secara pelatihan maupun referensi teknis yang terdapat pada Dinas/Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota.

b. Bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur

Bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur dilaksanakan di lokasi penanaman Pembangunan Jalan Enterpreteur. Dilakukan kepada kelompok tani hutan atau pekerja lapangan penanaman Pembangunan Bank Buah.

Prosedur bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur antara lain:

1. Koordinasi dengan kepala desa atau ketua kelompok tani yang terkait dengan Pembangunan Jalan Enterpreteur.
2. Menyampaikan informasi teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur yang sesuai dengan Rancangan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur kepada kelompok tani dan pekerja lapangan terkait dengan Pembangunan Jalan Enterpreteur.
3. Diskusi aktraktif dengan peserta bimbingan teknis dengan tujuan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Data dan informasi yang didapatkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur selanjutnya dianalisa dan disajikan dalam laporan.

**Tabel 39 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Bimbingan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 26 s/d 27 Oktober 2017 | Angga Febriano, Agitha Putri, Prima Praditya | 3,060,000 | telah dilakukan pembangunan jalan enterpreteur penanaman batu pecah belas sepanjang 500 m dan jalan tapak 1000 meter |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 12 s/d 13 Oktober 2017 | M. ramdhon Rifqi, Herlinawati, Nur Apni | 3,060,000 | telah dilakukan pembangunan jalan enterpreteur penanaman batu pecah belas sepanjang 250 m dan jalan tapak 700 meter |  |
|  | TOTAL |  |  |  | **6.120.000** |  |  |

1. Penilaian Jalur Enterpreteur

1. pelaksanaan dilaksanakan dengan mengukur panjang jalan dan ketebalan penanaman batu pecah mesin/tangan di lokasi yeng telah diatur dan direncanakan pada peta pelaksanaan

**Tabel 40 : Hasil Pelaksanan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 11 s/d 12 Desember 2017 | Eka Meinarsih, Hendra Bakti putra, Rucitra, Agitha putri Br Bangun | 3,550,000 | Pembuatan Jalan enterpreteur yang telah diberi batu kurang lebih 1500 Meter, pembutan jalan tapak telah mencapai 90 % dan terdapat kendala pelaksanan yaitu cuaca buruk |  |

* + 1. K**egiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (40 %). |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.190.500.000- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya data jasa lingkungan wisata alam di wilayah KPH (1 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (81 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 144.461.700,- (75,83 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan Kegiatanan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola HPH terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1. Orientasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHl BB

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) yang tepat dan benar. Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan merupakan pelaksanaan analisis lokasi melalui orientasi dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian hasil pengumpulan data dan informasi digunakan sebagai acuan penentuan lokasi pelaksanaan pengelolaan kawasan.

Secara garis besar Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

* + - * 1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

* + - * 1. Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Berdasarkan hasil koordinasi dan penegumpulan data pada dinas/instansi yg membidangi Kehutanan selanjutnya ditentukan kawasan hutan yang akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan.

**Tabel 41 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Orientasi Potensi Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan | Kab. Tanah Datar | 16 s/d 17 Feb 2017 | Boy Martin, Abdul Muthalib, Prima Praditya | 2,740,000 | Terdapat Potensi HHBK (Pinus) pada Nagari Atar |  |
|  |  | Kota Solok | 16 s/d 17 Feb 2017 | Hendra Bakti Putra, Yusra, Novita Anika | 2,740,000 | Terdapat potensi HHBK (Rotan dan Karet ) |  |
|  |  | Kab. Padang Pariaman | 15 s/d 16 Mei 2017 | Jumiyanta, Yoga Aprianto, Prima Praditya W | 2,430,000 | Potensi yang ada pada Nagari Sikucur Induk berupa Jasa Lingkungan Air Terjun, Potensi Air Bersih PDAM Kota Padang Pariaman, Potensi HHBK Durian dan Pinang, Potensi Wisata alam Pemandangan |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 7.910.000 |  |  |

1. Sosialisasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHl BB

Sosialiasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan merupakan penyampaian pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar hutan denagn harapan kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara pelaksana kegiatan dan masyarakat sekitar hutan dan pemangku kepentingan.

Secara garis besar Sosialisasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

* + 1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi dan masyarakat terkait yang membidangi Kehutanan di daerah.

* 1. Sosialisasi Kegiatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Setelah Orientasi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan hasil koordinasi dan penegumpulan data pada dinas/instansi yang membidangi Kehutanan selanjutnya ditentukan kawasan yang akan dijadikan lokasi tanam dilakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dikawasan tersebut demi tercapainya kesepahaman.

Dalam penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada pejabat/petugas dan masyarakat sekitar hutan dilakukan dengan teknik sosialisasi dua arah. Dimana pihak KPHL Bukit Barisan dan peserta memiliki hubungan komunikasi yang baik. KPHL Bukit Barisan menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi ini. Selain itu penyampai menyampaikan kawasan yang akan dikelola dan kegitan yang akan dilaksanakan berupa Pembangunan Hutan Tanaman Jabon. Peserta yang merupakan masyarakat sekitar hutan dapat mengajukan pertanyaan yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Selain sosialisasi pihak KPHL Bukit Barisan bersama masyarakat sekitar hutan akan bekerja sama demi pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, lestari, efektif dan efisien.

**Tabel 42 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
| **1** | **Sosialisasi Potensi Kawasan Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan** | **Kab. Tanah Datar** | **15 s/d 16 Mei 2017** | **Hendra Bakti Putra, Sasri, Agitha Putri** | **3.440.000** | **Terlampir** |  |
| **2** |  | **KAb. Tanah Datar** | **15 s/d 16 Juni 2017** | **Yozawardi, Abdul Muthalib, Tuti** | **2,740.000** |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **6.180.000** |  |  |

1. Koordinasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPHl BB

Kelompok tani hutan perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal. Koordinasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun sistem dan usaha pengelolaan kawasan hutan KPHL bukit Barisan. Sistem dan usaha akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kelembagaan yang kuat.

Secara garis besar kegiatan Koordinasi Potensi Kawasan Hutan kegiatan pokok yaitu :

* 1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

Tehnik yang dilakukan dalam koordinasi ini adalah sebagai berikut :.

* Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan, kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

Pemberian informasi teknis baik secara pelatihan maupun referensi teknis yang terdapat pada Dinas/Instansi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota.

**Tabel 43 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Koordinasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Hendra Bakti Putra, Agitha Putri Br. Bangun dan yulisaman | 2,290,000 | Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia kaya akan potensi hasil hutan yang harus lebih ditekankan dalam pengumpulan datanya, seperti potensi jasa lingkungan (landscap dan air) serta potensi hhbk seperti rotan dan lain-lain, masyarakat dan pemerintahan mengharpkan pemberdyaan masyarakat yang lebih intens. |  |
|  | Koordinasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Rucitra, Prima Praditya, Syafrial Toni | 2,400,000 | Nagari Mandeh terdapat potensi yang dapat dikembangkan yaitu rotan, manau, karet, petai, jengkol dan durian serta terdapat pembuatan arang bakau, madu, sirup mangrove kue mangrove dan kerajinan ukiran |  |
|  | Koordinasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 1 s/d 2 Agustus 2017 | Abdul Muthalib, Yoga Aprianto, Fernando Simbolon | 3,060,000 | memiki potensi kawasan hutan yaitu Air Terjun Tujuh Tingkat, HHBK (durian, Rotan, Manau ) yang berdapa dalam kawasan KP |  |
|  | Koordinasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan | Kab. Pesisir Selatan | 8 s/d 9 Agustus 2017 | Jumianta, Mardiyios, wandra Zulia farma | 3,060,000 | Nagari Mandeh terdapat potensi rotan manau, keret, petai dan jengkol, buah durian, buah barangan dan pengelolaan mangrove yang telah didata dan dicatat oleh Wali Nagari Mandeh. |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 10.810.000 |  |  |

1. Inventarisasi Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah Kelola KPH.

Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat.

Inventarisasi Jasa Lingkungan bertujuan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang potensi jasa lingkungan di suatu kawasan tertentu.

Secara garis besar Inventarisasi HHBK dan Jasling di KPHL Bukit Barisan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

a. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

* 1. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Inventarisasi hasil hutan bukan kayu dan Jasa Lingkungan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan lokasi atau potensi Air, tutupan Lahan, Carbon, Keanekaragaman hayati dll

**Tabel 44 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor Tim** | | **Pelaksana** | **Nomor Jalur** | **Panjang Track Jalur (meter)** | | **Luasan (m²)** | **Nomor Petak** | **Jumlah Pinus (pohon)** | | | **Anggaran** |
| **1** | | Ir. Eka Meinarsih | 10a - 10b | 1.000 | | 20.000 | HP 163  HP 165  HP 166  HP 167  HP 169 | 2.242 | | | Rp. 6.320.000 |
| Kamisal | 11a - 11b | 1.000 | | 20.000 |
| Prima Praditya Wahyudi  Fatma Yulis  Maju Karo Karo  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 12a - 12b | 1.000 | | 20.000 |
| Angga Febriano | 18a - 18b | 500 | | 10.000 |
| Zulyasri | 19a -19b | 500 | | 10.000 |
| Irfan Oktavianus  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 20a - 20b | 500 | | 10.000 |
| **2** | | Wandra Zulia Farma, S.Hut | 21a - 21b | 500 | | 10.000 | HL.172  HL.173 | 251 | | | Rp. 5.760.000 |
| Rucitra, S.Hut | 22a - 22b | 500 | | 10.000 |
| Fernando Simbolon  Pono Raharjo | 23a - 23b | 500 | | 10.000 |
| Anton  Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | 24a - 24b | 500 | | 10.000 |
| **3** | | Hendra Bakti Putra, ST | 25a - 25b | 500 | | 10.000 | HP.192HP.397  HP.205  HP.214 | 2.050 | | | Rp. 7.760.000 |
| Agitha Putri Br. Bangun | 26a - 26b | 500 | | 10.000 |
|  | 27a - 27b | 500 | | 10.000 |
| Gema Yudistira, SE | 28a - 28b | 500 | | 10.000 |
| Novita Anika, S.Hut  Herlinawati  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 | 29a - 29b | 500 | | 10.000 |
| **4** | | Boy Martin, SH | 30a - 30b | 300 | | 6.000 | HL.69 | 0 | | | Rp. 6.320.000 |
| Angga Febriano | 31a - 31b | 300 | | 6.000 |
| Nur Apni Riskiani | 32a - 32b | 300 | | 6.000 |
| Rudi Hartono,S.Sos |  |  | |  |
| Mursyid, M.SP  Yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2017 |  |  | |  |
| **5** | Hendra Bakti Putra, S.T | | 1a - 1b | 1.000 | 20.000 | | HP.128 HP.130HP.132 | | 2.179 | Rp. 6.320.000 | |
|  | | 2a – 2b | 1.000 | 20.000 | |
| Nur Apni Reskiani  Agitha Putri Bangun  Darliswarwati  Elisda Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2017 | | 3a - 3b | 1.000 | 20.000 | |
|  | TOTAL | |  |  |  | |  | |  | **Rp. 32.480.000** | |

1. **Verifikasi Kemitraan**

Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan kemitraan atas pemanfaatan potensi kawasan hutan di wilayah KPHL Bukit Barisan di lapangan. Verifikasi ini bertujuan agar pemangku kemitraan mendapat kepastian prosedur dalam pengakuan kemitraan.

Secara garis besar verivikasi Kemitraan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Pengajuan Kemitraan

* + - 1. Validasi dokumen permohonan kemitraan
      2. Verifikasi permohonan dan calon kemitraan

**Tabel 45 : Hasil Pelakasanaan Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
| 1 | Verivikasi Kemitraan | Kab Tanah Datar | 29 s/d 30 November 2017 | Hendra Bakti Putra, Agitha Putri, farida | 2.740.000 | Belum terdapat Kemitraan yang diverivikasi dikarenakan belum adanya masyarakat yang mengajukan perizinan atau pun klarifikasi pada tanggal tersebut, namun tim pelaksana menyampaikan prosedur perizinan kepada masyarakat jika ingin mengajukan perizinan terkait di kawasan KPH. |  |
| 2 |  | Kab Tanah Datar | 29 s/d 30 November 2017 | Rucitra, Utami Sri rezeki, Fernando | 2,430,000 | Belum terdapat Kemitraan yang diverivikasi dikarenakan belum adanya masyarakat yang mengajukan perizinan atau pun klarifikasi pada tanggal tersebut, namun tim pelaksana menyampaikan prosedur perizinan kepada masyarakat jika ingin mengajukan perizinan terkait di kawasan KPH. |  |
| 3 |  | Kab Tanah Datar | 29 s/d 30 November 2017 | Wandra Zulia, Yoga, Herlinawati | 2,430,000 | Belum terdapat Kemitraan yang diverivikasi dikarenakan belum adanya masyarakat yang mengajukan perizinan atau pun klarifikasi pada tanggal tersebut, namun tim pelaksana menyampaikan prosedur perizinan kepada masyarakat jika ingin mengajukan perizinan terkait di kawasan KPH. Kemitraan kehutanan harus memakai prinsip, kesepakatan, kesetaraan, saling mengutungkan dan lokasl spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi |  |
| 4 |  | Kab Tanah Datar | 4 s/d 5 Desember 2017 | Abdul Muthalib, Delfini, Septiana putri | 2,430,000 | Belum terdapat Kemitraan yang diverivikasi dikarenakan belum adanya masyarakat yang mengajukan perizinan atau pun klarifikasi pada tanggal tersebut, namun tim pelaksana menyampaikan prosedur perizinan kepada masyarakat jika ingin mengajukan perizinan terkait di kawasan KPH. Kemitraan Kehutanan dilaksanakan oleh KPH baik dengan masyarakat sekitar hutan, penanam modal dan instansi terkait lainnya |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 10.030.000 |  |  |

1. Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPH

Bimbingan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur di KPHL Bukit Barisan ini terbagi 2 kegiatan pokok yaitu :

1. Koordinasi pelaksanaan

Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

1. Bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur

Bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur dilaksanakan di lokasi penanaman Pembangunan Jalan Enterpreteur. Dilakukan kepada kelompok tani hutan atau pekerja lapangan penanaman Pembangunan Bank Buah.

Prosedur bimbingan teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur antara lain:

* + 1. Koordinasi dengan kepala desa atau ketua kelompok tani yang terkait dengan Pembangunan Jalan Enterpreteur.
    2. Menyampaikan informasi teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur yang sesuai dengan Rancangan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur kepada kelompok tani dan pekerja lapangan terkait dengan Pembangunan Jalan Enterpreteur.
    3. Diskusi aktraktif dengan peserta bimbingan teknis dengan tujuan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Data dan informasi yang didapatkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pembangunan Jalan Enterpreteur selanjutnya dianalisa dan disajikan dalam laporan.

**Tabel 46 : Hasil Pelaksanaan Kegiatan Terlampir**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Pelaksana** | **Anggaran** | **Hasil** | **Ket** |
|  | Bimbingan Teknis Pengelolaan Potensi Kawasan Hutan Pada Wilayah | Kab. Pesisir Selatan | 30 s/d 31 Oktober 2017 | Yusra, Wandra Zulia, Yulisaman | 2,400,000 | Terlampir |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 23 s/d 24 Oktober 2017 | Eka Meinarsih, Abdul Muthalib, Effendi | 2,780,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 19 s/d 30 Oktober 2017 | Hendra Bakti Putra, ST, Agitha {Putri Br Bangun, Fernando Simbolon | 3,440,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 16 s/d 17 Oktober 2017 | Hendra Bakti putra, Angga Febriano Asri, Yoga Aprianto | 3,440,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 9 s/d 10 Oktober 2017 | Eka Meinarsih, Rucitra, Prima praditya | 3,440,000 |  |  |
|  |  | Kab. Pesisir Selatan | 23 s/d 24 Oktober 2017 | Hendra Bakti Putra, Rucitra, Prima Praditya W | 3,440,000 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 18,940,000 |  |  |

* 1. **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan :**
     1. **Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya kualitas dan mutu benih/bibit tanaman hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.4.200.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas (250.000 batang /10 Unit/3 sertifikat/15 Kab/Kota |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 1.653.361.300,- (39,37 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/304/BPTH-2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Bibit Tanaman Hutan Tahun 2017.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.700.000.000,-

Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.653.361.300,- atau sebesar 97,256%. Dana yang bersisa sebesar Rp. 46.638.700,- atau sebesar 2,744% dengan rincian sebagai berikut :

* Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 2.172.450,-
* Belanja Bahan Materia Rp. 61.200,-
* Belanja cetak dan penggandaan Rp. 80.450,-
* Belanja sewa tempat (sosialisasi kebun lokus) Rp. 1.700.000,-
* Perjalanan Dinas Rp. 10.167.200,-
* Honorarium non PNS Rp. 31.457.400,-
* Belanja Modal Pengadaan Rak Bibit Rp. 1.000.000,-

Realisasi anggaran terendah berada pada honorarium non PNS, disebabkan upah non PNS yang tidak dapat disalurkan karena terlambatnya anggaran perubahan disahkan.

Realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari :

* + - 1. Terlaksananya pembuatan bibit tanaman hutan

Pembuatan bibit berada di areal persemaian UPTD BPTH seluas ± 0.04 Ha dengan kapasitas bibit maksimal 300.000 batang (rak bibit bertingkat). Tahun 2017 target penyediaan bibit untuk didistribusikan kepada masyarakat sebanyak 150.000 batang ditambah dari pembuatan bibit pada kebun lokus yang berada di kabupaten/kota sebanyak minimal 100.000 batang. Per 31 Desember 2017 telah tersalurkan bibit sebanyak 150.000 batang kepada perorangan, kelompok tani, instansi pemerintah dan lembaga.

Anggaran yang dibebankan untuk pembuatan bibit berasal dari Dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 406.848.300,- dengan komposisi pembiayaan :

* Anggaran fisik (peralatan/bibit/media/bahan kimia) sebesar Rp. 288.387.800,-
* Anggaran pendukung (upah-upah) sebesar Rp. 81.754.600,-
* Perjalanan dinas untuk peningkatan kualitas bibit sebesar Rp. 36.705.800,-

Dalam pelaksanaan pembuatan bibit tanaman hutan ditemukan kendala dalam hal penyediaan bibit yang tidak tepat waktu. Hal tersebut diakibatkan musim panen tidak sesuai rencana dan jadwal penarikan dana pada aliran kas yang telah dibuat.

Solusi yang dapat dilakukan adalah *reschedule* pembayaran kepada pemilik/pengelola sumber benih.

* + - 1. Terlaksananya identifikasi calon lokasi sumber benih

Identifikasi calon lokasi sumber benih adalah kegiatan yang bertujuan memberikan jaminan sumber benih tanaman hutan milik perorangan/lembaga yang telah dikelola dengan baik. Produk akhir dari kegiatan ini adalah diterbitkannya sertifikat sumber benih tanaman hutan.

Sesuai dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2017 target pelaksanaan sertifikasi adalah sebanyak 3 lokasi sumber benih baru, dengan alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 14.422.700,-

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan identifikasi calon sumber benih ini adalah sulitnya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan disebabkan belum masuknya permohonan sertifikasi dari pemilik/pengelola sumber benih. Akibatnya rencana kegiatan tidak sesuai dengan schedule penarikan dana pada aliran kas Seksi Pengembangan Sumber Benih.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka pada awal tahun anggaran 2018 akan segera disampaikan rencana kegiatan sertifikasi melalui koordinator wilayah Dinas Kehutanan yang ada di kabupaten/kota.

* + - 1. Terlaksananya monitoring pendistribusian bibit

Kegiatan monitoring pendistribusian bibit persemaian UPTD BPTH merupakan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang lalu, agar pendistribusian bibit tepat sasaran maka perlu selalu dimonitor.

Sesuai target dari DPA tahun anggaran 2017 dana yang terealisasi untuk monitoring pendistribusian bibit persemaian sebesar Rp. 18.060.000,- dari Rp. 21.780.000 yang dialokasikan. Capaian target sebanyak 9 kab/kota dapat terpenuhi/terealisasi, namun belum mencapai 50 persen dari jumlah total bibit terdistribusi. Hal ini disebabkan luasnya sebaran penanaman bibit sehingga Tim kesulitan melakukan pengecekan secara detail.

Untuk mengatasi kendala yang ada maka Seksi Pengembangan Sumber Benih di tahun 2018 akan mencoba membuat pemetaan lokasi penanaman berbasis aplikasi untuk memudahkan mengetahui lokasi penanaman bibit dari UPTD BPTH.

* + - 1. Terlaksananya pembinaan sumber benih bersertifikat

Pembinaan teknis sumber benih bersertifikat bertujuan untuk mempertahankan keberadaan pohon induk tanaman hutan sebagai sumber benih yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Tahun 2017 berhasil dilaksanakan pembinaan terhadap 10 pemilik/pengelola sumber benih Sumatera Barat, yang satu diantaranya merupakan hasil kolaborasi kegiatan yang didanai oleh BPDASHL Agam Kuantan. Dana yang terealisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.320.000,- dari Rp. 24.200.000,- yang dialokasikan. Kekurangan pembiayaan kegiatan merupakan hasil efisiensi penginapan yang telah disahkan pada pembahasan anggaran perubahan Bulan Oktober 2017.

Kendala dalam hal pelaksanaan pembinaan teknis sumber benih bersertifikat adalah lokasi yang relatif susah dijangkau jika cuaca kurang baik serta rendahnya keinginan pemilik/pengelola sumber benih untuk tetap mempertahankan pohon induk jika tidak ada insentif dari pemerintah.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah tetap menyampaikan tujuan dan manfaat dari mempertahankan sumber benih serta menunjukkan wadah pemasaran bagi produk sumber benih Sumatera Barat melalui kelompok media sosial yang dikelola oleh insan perbenihan itu sendiri.

* + - 1. Terlaksananya pembuatan kebun bibit lokus.

Kebun bibit lokus merupakan manifestasi persemaian UPTD BPTH di wilayah KPH yang dibuat dan dikelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme swakelola. Kriteria pemilihan kelompok adalah kelompok tani/kelompok tani hutan/lembaga desa di wilayah nagari pangan atau *bufferzone* dengan status lahan berada di luar kawasan hutan.

Hak dan tanggung jawab kelompok sebagai pemegang mandat pembuatan kebun lokus dituangkan dalam SPKS yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ketua Kelompok Tani. Jumlah kelompok pengelola kebun lokus adalah 20 unit dengan total anggaran per kelompok sebesar Rp. 46.000.000,- terdiri dari 1) biaya pembelian peralatan/perlengkapan persemaian, 2) biaya bahan kimia, 3) biaya pembelian media dan bibit serta 4) upah-upah.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan 20 unit kebun lokus sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.188.709.450,- terdiri dari :

* Biaya sesuai SPKS Rp. 48.702.300,- per kelompok. Total sebesar Rp. 974.046.000,-
* Biaya pendukung (sosialisasi/survei lokasi/monitoring dan evaluasi/pembinaan kelompok) sebesar Rp. 214.663.450,-

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebun lokus di bulan Desember 2017 yang lalu, diperkirakan 70% kelompok telah siap untuk mendistribusikan bibit di kebun lokus mereka. Hal itu berarti minimal 280.000 batang telah siap dibagikan kepada anggota kelompok/masyarakat sekitar pada bulan Desember 2017.

Kendala selama pelaksanaan pembuatan kebun lokus adalah adanya kelompok tani yang belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan bibit sebanyak 20.000 batang (minimal) sampai awal Bulan Desember 2017 sehingga kelompok yang bersangkutan kami berikan teguran lisan. Namun pada saat SPKS berakhir seluruh bibit sudah tersedia di areal persemaian kebun lokus kelompok.

* + 1. **Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya kualitas dan mutu benih/bibit tanaman hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp125.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya data produksi, peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan RHL serta pembangunan hutan tanaman, terbentuknya pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan (13 Kabupaten/Kota/dokumen laporan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp115.960.450,- (92,77 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  **Realisasi Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.**  Pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan rencana telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/098/UPTD BPTH -2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2017.  Kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 125.000.000,-. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 115.960.450,- atau sekitar 92,77 %.  Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 9.039.550,- atau sebesar 7,23 % dengan rincian sebagai berikut :   * Belanja BBM perjalanan dinas sebesar Rp 1.319.550,- * Foto copy sebesar Rp 100,- * Belanja perjalanan dinas dalam daerah :   √ Uang penginapan Eselon III/IV sebesar Rp 938.000,-  √ Uang penginapan staf golongan III,II sebesar Rp 5.838.000,-  Total uang penginapan yang bersisa seperti tersebut di atas sebesar Rp 6.776.000, sebagian digunakan kembali untuk menindak lanjuti adanya permohonan yang masuk terkait penetapan pengada/ pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An.CV.Rimba Nusa Flona di Kab.Pasaman Barat dan monitoring produksi dan peredaran benih/bibit An.Nandhya Agro Utama di Kab.50 Kota   * Belanja perjalanan dinas luar daerah (tidak dapat dilaksanakan) karena tidak adanya undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:   √ Uang harian Eselon III/IV sebesar Rp 1.800.000,-  √ Uang penginapan Eselon III/IV sebesar Rp 992.000,-  Transportasi :  √ Tiket Pesawat sebesar Rp 2.952.000,-  √ Taksi Sumbar sebesar Rp 380.000,-  √ Taksi Jakarta sebesar Rp 420.000,-  Realisasi fisik kegiatan ini secara keseluruhan adalah sebesar 100 % yang terdiri dari :   1. Terlaksananya monitoring produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan di Kabupaten/kota pada 22 lokasi (16 PPBTH terdaftar dan 6 SB bersertifikat) . Berdasarkan data dan laporan yang diterima (15 laporan) diperoleh data jumlah produksi bibit tahun 2017 dipengada/pengedar sebanyak 1.520.800 batang (tanaman hutan dan MPTS) . Anggaran sebesar Rp 37.320.000 dengan realisasi fisik 100%. 2. Terlaksananya penilaian lapangan permohonan rekomendasi pengada/ pengedar bibit tanaman hutan terdaftar (PPBTH) pada 7 lokasi calon PPBTH terdaftar di Provinsi Sumatera Barat (sesuai permohonan) dengan rincian ;  * Alokasi Dana dari DPA perubahan sebesar Rp 20.640.000,- (6 lokasi sesuai permohonan yang masuk); * Alokasi Dana dari sisa lebih penginapan perjalanan dinas Eselon dan staf dari DPA perubahan sebesar Rp 2.740.000,- (1 lokasi/permohonan yang masuk); * Realisasi fisik kegiatan sebesar 116,67%;   Ke 7 lokasi PPBTH terdaftar tersebut di atas, telah diterbitkan SK Penetapannya oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provisi Sumatera Barat;   1. Terlaksananya sertifikasi mutu bibit tanaman hutan terdaftar, pada 2 lokasi PPBTH terdaftar pada 2 lokasi calon PPBTH terdaftar (sesuai permohonan) dengan rincian ;  * Alokasi Dana dari DPA perubahan sebesar Rp 6.880.000,- (2 lokasi); * Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %   Ke 2 lokasi sertifikasi mutu bibit tanaman hutan terdaftar tersebut di atas, telah diterbitkan Sertifikatnya (1 sertifikat , 1 surat ket mutu bibit).   1. Terlaksananya cetak leaflet dan data base perbenihan tanaman hutan tahun 2017 dengan rincian ;  * Pengadaan/pencetakan dengan pihak pengada barang dan jasa yaitu Pekerjaan Pengadaan Cetak Leaflet perbenihan tanaman hutan sebanyak 5.000 lembar dan Pengadaan Cetak Data Base perbenihan tanaman hutan tahun sebanyak 100 buku sebagaimana Surat Penawaran Nomor 280/SP/DPA-OPD/UPTD BPTH-2017 tanggal 01 November 2017 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV.Renal Jaya, dengan nilai kontrak Rp.33.700.000,- * Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan telah di distribusikan ke Instansi kehutanan lingkup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota (UPTD KPH), Pengada/pengedar bibit tanaman hutan terdaftar, pengelola sumber benih, dan kelompok tani/LSM bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.  1. Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka meengikuti kegiatan perbenihan tanaman hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya undangan dari Kementerian LHK , sehingga kegiatan tersebut di atas tidak terlaksana. Alokasi dana sebesar Rp 6.544.000,- menjadi sisa mati kegiatan. | | |

* + 1. **Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya kualitas dan mutu benih/bibit tanaman hutan (40%) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp. 60.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan (4 Lokasi) |
| **-** | Outcome | : | Persentase penurunan luas lahan kritis (0,42 %). |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 47.430.950,- (79,05 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Realisasi pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik pada Tahun 2017 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Belanja Langsung) yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi Rp. 47.430.950,. dengan realisasi fisik 100%.  Sedangkan realisasi kinerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik dimana target sebesar Rp. 60.000.000, - dengan realisasi Rp. 47.430.950 dan realisasi fisik 91 %.  Terdapat selisih target keuangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.569.050 dari pagu dana/ anggaran tahun. Selisih tersebut terdiri dari efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp 7.169.050,-. adalah murni efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja bahan pakai habis (bahan bakar minyak untuk kegiatan), belanja bahan material, dan belanja cetak penggandaan, sedangkan sisa sebesar Rp. 5.400.000,- adalah merupakan perjalanan dinas luar provinsi yang tidak dapat dibelanjakan atau kegiatannya tidak dilaksanakan.  Efisiensi/ sisa anggaran tersebut di atas, tidak mengurangi capaian realisasi fisik pada pos-pos belanja tersebut, karena secara substansi output tercapai maksimal.  Tidak terlaksanannya kegiatan perjalanan dinas luar provinsi, disebabkan oleh karena tidak adanya kegiatan rapat-rapat, sosialisasi dan penguatan SDM yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya genetik yang dilkasanakan Kementrian LHK beserta jajarnya melibatkan UPTD BPTH. | | |

* 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**
     1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 76.314.150,- (76,31 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 76.314.150,- (76,31 %) dengan fisik 100 %. Sisa mati sebesar Rp. 23.685.850,- terdiri dari : sebesar Rp. 3.300.000.- merupakan sisa mati belanja perangko, materai dan benda pos, sebesar Rp. 19.932.250,- sisa penghematan BBM caraka, sebesar Rp.120.000,- sisa mati paket pengiriman, dan sebesar Rp. 333.600,- sisa mati honor. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.527.500.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 76.314.150,- (76,31 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan semula Rp. 1.000.000.000,-, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 527.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 293.410.941,- (55,62 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 234.089.050,- merupakan sisa mati, karena masih ada pembayaran listrik, air, telepon dibayar oleh kabupaten, untuk pembayaran bulan Desember 2017 baru dapat dibayarkan di Januari 2018, sehingga menjadi hutang jangka pendek. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) | |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.1.000.000,- (Pagu DPPA) | |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan (1 Tahun) | |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) | |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 989.323,- (98,93 %) | |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana semula Rp. 15.400.000,- , setelah perubahan menjadi Rp. 1.000.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 989.323 (98,93 %) dengan fisik 100 %. | | | |
|  | | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) | |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.1.055.920.360,- (Pagu DPPA) | |
| **-** | Output | : | Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor (1 Tahun) | |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) | |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 980.140.241,- (92,82 %) | |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana sebesar Rp. 1.055.920.360,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 980.140.241,- (92,82 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar 75.780.119,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai yang ada dalam kontrak. | | | |
|  | | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.125.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya alat-alat tulis kantor (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 124.919.000,- (99,94 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 124.919.000,- (99,94 %) dengan fisik 100 %. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.120.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan dan penggandaan untuk dinas dan UPTD (1 Tahun) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 120.000.000,- (100 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 120.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 120.000.000,- (100 %) dengan fisik 100 %. | | |
|  | | | |

* + 1. **Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.62.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 62.000.000,- (100 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp. 62.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 62.000.000,- (100 %) dengan fisik 100 %. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.41.400.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan warta perundang-undangan (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 10.704.000,- (25,86 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan dana sebesar Rp. 41.400.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.704.000,- (25,86 %) dengan fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 30.696.000,- merupakan penyediaan bahan bacaan untuk UPTD KPH yang sampai saat ini belum definitif. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 52.034.000,- (69,38 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- tidak mengalami perubahan, realisasi keuangan sebesar Rp. 52.034.000,- (69,38 %) dengan fisik (100 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 22.966.000,- merupakan sisa mati | | |

* + 1. **Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 423.542.379,- (76,87 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Realisasi Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :  Tabel 47 : Realisasi Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) | |  |  |  |  |  | | Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) | 8.371.000 | 8.371.000 | - | 100 | | Perjalanan dinas dalam daerah | 158.200.000 | 143..415.000 | 14.785.000 | 90.65 | |  |  |  |  |  | | Perjalanan dinas luar daerah | 267.168.000 | 199.772.448 | 67.395.552 - | 74,77 | | Perjalanan dinas luar negeri | 117.261.000 | 71.983.931 | 45.277.069 | 61.39 | | Jumlah | 551.000.000 | 423.542.379 | 127.457.621 | 76.87 |   Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:   * Penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan * Penghematan perjalanan dinas luar daerah yang merupakan dari sisa uang harian, penginapan,dan tiket (sesuai undangan). * Penghematan perjalanan dinas luar negeri yang merupakan sisa uang harian dan tiket.   Manfaat dari Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lancarnya pembiayaan dalam hal menghadiri rapat-rapat dan menyelesaikan berbagai keperluan terkait teknis kehutanan baik yang diadakan di Kabupaten dan Kota Dalam Daerah, Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat.dan Luar Negeri.. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.8.500.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 8.500.000,- (100 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 8.500.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.500.000,- (100 %) dengan fisik 100 %. | | |

* + 1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.15.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam, pembaca Al-Qur’an dan Ustad (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 14.000.000,- (93,33 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- tidak mengalami perubahan, realisasi keuangan sebesar Rp. 14.000.000,- dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp.1.000.000,- merupakan sisa mati makan dan minuman rapat. | | |

* 1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :**
     1. **Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.199.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 194.745.000,- (97,86 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 199.000.000,-, realisasi sebesar Rp. 194.745.000,- (97,86 %) dengan fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 4.255.000,-. | | |

* + 1. **Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.1.276.500.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase pelayanan administrasi perkantoran (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 1.225.708.500,- (96,02 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pengadaan Dinas Operasional dengan dana sebesar Rp. 1.276.500.000,-, realisasi sebesar Rp. 1.225.708.500,- (96,02 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 50.791.500,- merupakan sisa mati. | | |

* + 1. **Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor (32 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 97.888.000,- (97,89 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 97.888.000 (97,89%) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.112.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak. | | |

* + 1. **Kegiatan Pengadaan Meubeleur :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.34.500.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor (32 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 34.331.000,- (99,51 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pengadaan Meubeleur dengan dana semula sebesar Rp. 50.000.000,- namun karena ada beberapa item barang harus digeser ke pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, setelah perubahan menjadi Rp.34.331.000,- (99,51 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 169.000,- merupakan sisa mati. | | |

* + 1. **Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.115.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terpenuhinya pengadaan dan perlengkapan kantor (14 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 114.566.000,- (99,19 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan  Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 115.500.000,-, relisasi keuangan sebesar Rp. 114.566.000,- (99,19 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 934.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak. | | |

* + 1. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (11 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 74.708.000,- (99,61 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 74.708.000,- (99,61%) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 292.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak. | | |

* + 1. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (5 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 99.821.000,- (99,82 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 99.821.000,- (99,82 %) dengan fisik (100 %).. Sisa anggaran sebesar Rp. 179.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak. | | |

* + 1. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.415.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 292.034.552,- (70,37 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana sebesar Rp. 415.000.000,- , realisasi sebesar Rp. 292.034.552,- (70,37 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 122.965.448,- merupakan sisa mati. | | |

* + 1. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.200.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (287 Unit) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 56.630.000,- (28,32 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 56.630.000,- (28,32 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 143.370.000,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai biaya terhadap barang yang diusulkan untuk diperbaiki. | | |

* + 1. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya sarana dan prasarana yang layak fungsi (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.60.000.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pemeliharaan instalasi air dan saluran air rumah dinas kantor (1 Tahun) |
| **-** | Outcome | : | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (100%) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 59.872.000,- (99,79 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan dengan dana sebesar Rp. 60.000.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 59.872.000,- (99,79 %) dengan fisik (100 %), sisa anggaran sebesar Rp. 128.000,- merupakan sisa mati. | | |

* 1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur :**
     1. **Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan Disiplin Aparatur (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.309.420.000,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNSD dan PTT beserta kelengkapannya (573 Stel) |
| **-** | Outcome | : | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 264.069.000,- (85,34 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan dana sebesar Rp. 309.420.000,- tidak ada perubahan, ini dilaksanakan melalui lelang dengan harga satuan, realisasi keuangan sebesar Rp. 264.069.000,- (85,34 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 45.351.000,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai dengan harga satuan, kontrak telah di addendum dikarenakan banyak pegawai yang sudah pindah kembali ke kabupaten/kota dan telah pension. | | |

* 1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**
     1. **Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Peningkatan Disiplin Aparatur (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.229.075.240.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan (15 Kali) |
| **-** | Outcome | : | Rata-rata lama PNS mengikuti diklat (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 110.475.400,- (48,23 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan dana sebesar Rp. 155.251.640,- setelah perubahan menjadi Rp. 229.075.240,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.475.400 (48, 23 %). Sisa anggaran sebesar 118.599.840,- merupakan sisa mati. | | |

* 1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**
     1. **Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya dokumen penyelenggaraan pemerintah yang tepat waktu (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.74.880.000.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LKJ, LKPJ dan laporan tahunan (5 Dokumen) |
| **-** | Outcome | : | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada Dinas Kehutanan (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 73.181.350,- (97,73 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat dilihat pada table berikut :  Tabel 48 : Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2017   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) | |  |  |  |  |  | | Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) | 2.000.000 | 1.606.350 | 393.650 | 80.32 | | Belanja cetak | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 100.00 | | Belanja Pengandaan | 8.450.000 | 8.450.000 | - | 100 | | Belanja Perjalanan dinas dalam derah | 35.530.000 | 34.225.000 | 1.305.000 | 96.33 | | Honorarium petugass pemeriksa hasil pengukuran kikerja SKPD | 14.400.000 | 14.400.000 | - | 100.00 | | Honorarium pengelola SIMBANGDA | 12.000.000 | 12.000.000 | - | 100.00 | |  | 74.880.000 | 73.181.350 | 1.698.650 | 97.73 |   Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut :   * Penghematan bahan bakar minyak * Penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan.   Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan tentang penatausahaan keuangan pada 9 UPTD KPH se Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia tentang pengelolaan keuangan pada setiap UPTD sehingga diharapkan PNS UPTD KPH lebih mampu dalam mengelola SPJ sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat mempercepat pencapaian realisasi keuangan. | | |

* + 1. **Kegiatan Penatausahaan Keuangan OPD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya dokumen penyelenggaraan pemerintah yang tepat waktu (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.337.700.000.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada Dinas Kehutanan (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 334.438.600,- (99,03 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Realisasi Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dapat dilihat pada table berikut :  Tabel 49 : Realisasi Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun 2017   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) | | Belanja Pengandaan | 11.500.000 | 11.500.000 |  | 100 | | Honorarim Pengelola  Keuangan Daerah | 241.200.000 | 239.250.000 | 1.950.000 | 99,19 | | Honorarium Pengelola SIPKD | 24.000.000 | 23.000.000 | 1.000.000 | 95.83 | | Honorium Pengelola SIPKD | 12.000.000 | 12.000.000 |  | 100 | | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | 37.000.000 | 36.688.600 | 311.400 | 99,16 | | Honorarium pengelola SIPKD | 12.000.000 | 12.000.000 |  | 100 | |  | 337.700.000 | 334.438.600 | 3.261.400 | 99.03 |   Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut :   * Penghematan Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah. * Penghematan Honorarium Pengelola SIPKD. * Penghematan Honorarium Pegawai tidak tetap. | | |

* 1. **Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Asset :**
     1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya dokumen perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang tepat dan cermat (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.815.366.000.000.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renstra, dan RPHJP KPH (6 Dokumen) |
| **-** | Outcome | : | Tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 618.059.300.,- (75,80 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD adalah menyusun dokumen RKA, DPA, DPPA (pergeseran), DPPA (perubahan) Renstra dan RPHJP KPH.  Kegiatan ini dilakukan oleh dua unit kerja yaitu Sub Bagian Program Anggaran dan Seksi Perencanaan hutan. Sub Bagian Program Anggaran melaksanakan penyusunan dokumen RKA, DPA, DPPA (pergeseran), DPPA (perubahan) Renstra yang penyampaiannya sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan oleh Bappeda dan Bakeuda Provinsi Sumatera Barat.  Pelaksanaan penyusunan RPHJP dilakukan melalui penyusunan buku tata hutan oleh tim pakar dan penyusunan buku RPHJP 4 UPTD KPH oleh tim pakar.  Perjanjian Kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Perjanjian Kinerja pada bulan Februari 2017 dan pada November 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kembali Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan sesuai masukan tim Kemenpan RB kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera barat.  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan RKT pada bulan Februari 2017 dan pada November 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kembali RKT 2018 yang telah disempurnakan sesuai masukan tim Kemenpan RB kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera barat. | | |

Sub Bagian Program Anggaran menyusun lima dokumen pelaporan yang telah disampaikan ke Bappeda sesuai tata waktu. Dokumen tersebut adalah:

* 1. LKjIP, Laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terhadap perjanjian kinerja dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat akan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2018.
  2. LKPJ, Laporan kinerja pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2018
  3. LPPD, Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Tahun 2017 akan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2018
  4. Evaluasi Renja, Renstra, sesuai hasil rapat koordinasi evaluasi kinerja OPD yang diselenggarakan Bappeda di aula Bappeda pada Desember 2017 maka setiap OPD harus menyampaikan hasil evaluasi renja, Renstra OPD pada tanggal 10 Januari 2018. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan meyerahkan paling lambat tanggal 10 Januari 2018 tersebut. Sebelumnya Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan hasil evaluasi renja, renstra hingga bulan Mei ke Bappeda pada bulan Mei 2017.
  5. Laporan TWI, TWII, TWIII, TW IV, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan laporan tri wulan setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 10 sesuai tata waktu yang ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 50 : Realisasi Kegiatan Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) |
|  | 815,366,000 | 619,559,300 | 195,806,700 | 75.99 |
| Belanja alat tulis kantor | 6,092,000 | 5,516,000 | 576,000 | 90.54 |
| Belanja Bahan Bakar | 6,977,500 | 3,214,900 | 3,762,600 | 46.08 |
| Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) |  |  |  |  |
| Belanja Seminar Kit Peserta | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 80.00 |
| Belanja peralatan/perlengkapan | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.00 |
| pakai habis |  |  |  |  |
| Belanja obat-obatan | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.00 |
| Belanja Transportasi | 45,000,000 | 45,000,000 | - | 100.00 |
| Belanja cetak | 6,500,000 | 6,500,000 | - | 100.00 |
| Belanja penggandaan | 21,568,500 | 18,367,400 | 3,201,100 | 85.16 |
| Belanja makan minum rapat | 4,800,000 | 4,460,000 | 340,000 | 92.92 |
| Belanja makanan dan minuman kegiatan | 32,640,000 | 28,180,000 | 4,460,000 | 86.34 |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 213,516,000 | 180,972,000 | 32,544,000 | 84.76 |
| Belanja perjalanan dinas luar daerah | 101,232,000 | 84,820,400 | 16,411,600 | 83.79 |
| Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber | 296,000,000 | 174,800,000 | 121,200,000 | 59.05 |
| Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 37,000,000 | 36,688,600 | 311,400 | 99.16 |
| Jasa pembuatan peta | 24,640,000 | 24,640,000 | - | 100.00 |
| Belanja Jasa Moderator | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 0.00 |
| Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.00 |
| Belanja Pembaca Doa/Al-Quran | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.00 |

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:

* Penghematan biaya seminar kit semula direncanakan 50 buah untuk satu kegiatan konsultasi publik namun menurut hemat kami seminar kit cukup dibagikan ke 40 org peserta sesuai undangan.
* Penghematan biaya obat-obatan karena dilapangan tidak terjadi hal-hal yang berdampak buruk.
* penghematan perjalanan dinas luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan tiket pesawat.
* penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan

Penghematan biaya nara sumber karena direncanakan bahwa untuk penyusunan buku tata hutan dan RPHJP untuk empat KPH masing-masing adalah empat orang pakar namun setelah dikonfirmasi ke perguruan tinggi terkait yang memilki kompetensi yang sesuai hanya 4 orang untuk penyusunan buku tata hutan dan 4 orang untuk penyusunan buku RPHJP sehingga sisa dana dapat dihemat.

* + 1. **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya dokumen perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang tepat dan cermat (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.278.480.000.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan (2 Laporan) |
| **-** | Outcome | : | Tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 225.594.250.,- (81,01 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan : | | |

Tabel 51 : Realisasi Kegiatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincian Belanja | Pagu dana | Realisasi | Sisa Dana | Capaian (%) |
|  | 278,480,000 | 224,094,250 | 54,385,750 | 80.47 |
| Belanja alat tulis kantor | 5,387,000 | 3,371,700 | 2,015,300 | 62.59 |
| Belanja Bahan Bakar | 20,600,000 | 7,383,550 | 13,216,450 | 35.84 |
| Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan) |  |  |  |  |
| Belanja penggandaan | 9,369,000 | 3,440,000 | 5,929,000 | 36.72 |
| Belanja makan minum rapat | 2,300,000 | 2,238,000 | 62,000 | 97.30 |
| Belanja makanan dan minuman kegiatan | 55,200,000 | 51,826,000 | 3,374,000 | 93.89 |
| Belanja pakaian kerja lapangan | 8,904,000 | 7,350,000 | 1,554,000 | 82.55 |
| Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 176,720,000 | 148,485,000 | 28,235,000 | 84.02 |

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan di atas merupakan penghematan/ efisiensi sebagai berikut:

* Penghematan belanja penggandaan
* Penghematan belanja pakaian kerja lapangan, pakaian kerja lapangan hanya diberikan satu kali jika anggota tim monev ditugaskan lebih dari satu kali.
* Penghematan perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan dan pengehamatan uang harian karena direncanakan eselon III/IV namun dilaksanakan oleh staf.
  + 1. **Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Capaian Program | : | Meningkatnya dokumen perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang tepat dan cermat (100 %) |
| **-** | Input | : | Jumlah dana sebesar Rp.253.828.000.,- (Pagu DPPA) |
| **-** | Output | : | Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian asset (12 Bulan) |
| **-** | Outcome | : | Tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset (100 %) |
| **-** | Realisasi | : | Realisasi Fisik : 100 %  Realisasi Keuangan : Rp. 179.676.100.,- (70,79 %) |
| - | Pelaksanaan Kegiatan :  Realisasi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD pagu anggaran sebesar Rp. 253.828.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 179.676.100 (70,79 %) dengan fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 74.151.900,- merupakan sisa mati. | | |

**3. Permasalahan dan Solusi**

* + - * 1. **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2017 yang berupa Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

* + - 1. Dengan belum definitnya UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 9 Unit menyebabkan penganggaran yang semula diperuntukkan bagi operasional KPH tersebut tidak dapat direalisasikan secara maksimal sehingga menyebabkan realisasi anggaran kecil.
      2. Adanya penambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dari Pusat pada akhir anggaran 2017 dan belum ada pedoman umum/petunjuk teknis penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan belum ada aturan yang memperbolehkan Provinsi untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam kawasan hutan. Hal inilah menyebabkan realisasi rendah.
      3. Adanya penghematan/efisiensi anggaran yang berasal dari :
* Penghematan belanja pakai habis.
* Penghematan belanja cetak dan penggandaan.
* Penghematan belanja makanan dan minuman.
* Penghematan belanja honorarium.
* Penghematan bahan/material.
* Penghematan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan sisa penginapan dan BBM.
* Penghematan perjalanan dinas luar daerah yang merupakan sisa penginapan dan tiket pesawat.
  + - 1. Tingginya klaim kepemilikan masyarakat terhadap lahan yang berada di dalam kawasan hutan negara dalam bentuk status tanah ulayat; Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan yang harus selalu terjaga; Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola-pola pengelolaan hutan dan potensi wisata alam hutan yang berwawasan kelestarian lingkungan.
    1. **Solusi**

Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembentukan KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 Unit di Kabupaten/Kota.
2. Dengan adanya penambahan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyurati ke Pusat bahwa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang telah turun pada akhir anggaran 2017 Dinas Kehutanan tidak sanggup untuk melaksanakannya mengingat petunjuk teknis belum jelas dan waktu terbatas. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan agar dana tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

3) Sehubungan dengan adanya sisa anggaran yang merupakan penghematan/ efisiensi anggaran ke depan perencanaan akan ditingkatkan.

* + 1. Memberikan pemahaman - pemahaman kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan tentang status keberadaan hutan sebagai daerah penyangga kehidupan; Melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan keamanan program dan kegiatan melalui penentuan pilihan lokasi kegiatan dengan sangat selektif; Membuat Memorandum of Understanding/Kesepahaman (MoU) dengan perangkat pemerintah terendah dan perangkat masyarakat adat sebelum kegiatan dilaksanakan.